



UNIVERSITAS INDONESIA

**KEPENTINGAN POLITIK PERANCIS DI SURIAH
PADA MASA PEMERINTAHAN NICOLAS SARKOZY**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Magister Sains (M.Si) Dalam Bidang Politik dan Hubungan Internasional
pada Program Studi Timur Tengah dan Islam
Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia**

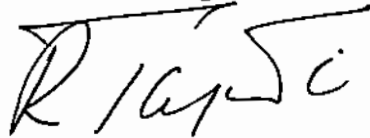
**WIWID PURWAWAN
NPM: 0606025191**

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI TIMUR TENGAH DAN ISLAM
POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL DI TIMUR TENGAH
JAKARTA
JULI 2009**

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Nama Mahasiswa : Wiwid Purwawan
NPM : 0606025191
Kekhususan : Kajian Timur Tengah dan Islam
Konsentrasi : Politik dan Hubungan Internasional
Judul Tesis : Kepentingan Politik Perancis di Suriah pada masa pemerintahan Nicolas Sarkozy
Tanggal disetujui : 10 Juli 2009

Pembimbing Tesis



(Achmad Ramzy Tajoedin, MPA)

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri,
Dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk

Telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Wiwid Purwawan

NPM : 0606025191

Tanda Tangan :

Tanggal : 10 Juli 2009



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Wiwid Purwawan
NPM : 0606025191
Program Studi : Timur Tengah dan Islam
Judul Tesis : Kepentingan Politik Perancis di Suriah Pada Masa Pemerintahan Nicolas Sarkozy

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains (M.Si) pada Program Studi Timur Tengah dan Islam ~~Fakultas~~ Program Pascasarjana Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. A. Hanief Saha Ghafur, M.Si (.....)

Pembimbing : Achmad Ramzy Tajoedin, MPA (.....)

Penguji : Drs. M. Hamdan Basyar, M.Si (.....)

Reader/ Pembaca Ahli : Zainuddin Djafar, Ph.D (.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 15 Juli 2009

RIWAYAT HIDUP

Wiwid Purwawan

Tempat/Tanggal Lahir

Ponorogo, 06 Pebruari 1980

Pendidikan

S2 Politik dan Hubungan Internasional Pusat Studi Timur Tengah dan Islam
Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.

S1 Fakultas Syari'ah Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA)
Jakarta.

DIII Program Studi Bahasa Arab Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab
(LIPIA) Jakarta.

Kulliyatul Mu'allimin Al Islamiyah (KMI) Pondok Pesantren Darul Fikri Ponorogo.

SD Negeri Bringin II, Ponorogo.

Pekerjaan

2007 – Sekarang Manajer Program PT. Maju Bersama Indonesia

2006 – Sekarang Manajer Program Pesantren Mahasiswa El Tahfidh,
Cileungsi Bogor

Email

wwd_80@yahoo.co. id

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji segenap syukur hanya milik Allah SWT, kepada-Nya aku berserah dan hanya kepada-Nya aku kembali. Hanya karena rahmat, karunia, dan keridhoan-Nya lah penulis memiliki kekuatan, kemauan, kesempatan dan kemudahan dalam menyelesaikan tesis yang merupakan salah satu syarat kelulusan Program Master di Program Pasca Sarjana Kajian Timur Tengah dan Islam, Universitas Indonesia.

Tesis ini berjudul ” *Kepentingan Politik Perancis di Suriah pada masa pemerintahan Nicolas Sarkozy*”. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui Mengetahui kepentingan politik Perancis di Suriah pada masa pemerintahan Nicolas Sarkozy, Mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi hubungan Perancis-Suriah pada masa pemerintahan Nicolas Sarkozy dan untuk Mengetahui masa depan hubungan Perancis-Suriah.

Penulis sangat menyadari bahwa tesis ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak yang begitu ikhlas dalam memberikan bantuan baik moril maupun materil. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada: -

1. Bpk. Mustafa Edwin Nasution, PhD. Ketua Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
2. Bpk. Achmad Ramzy Tadjoedin, MPA. selaku dosen selaku pembimbing tesis yang selalu sabar dan ikhlas memberikan bimbingan dan ilmunya.
3. Bpk. DR. A. Hanief Saha Ghafur sebagai ketua sidang, Bapak Drs. M. Hamdan Basyar, M.Si. sebagai penguji dan Bapak DR. Zainudin Dja'far, sebagai pembaca ahli tesis ini.
4. Seluruh staf pengajar PSTTI UI yang telah banyak membagikan ilmu, dan pengalaman dan motivasi kepada penulis.
5. Seluruh pengurus dan rekan di IFC, Ustadz, Mas Haryono dkk.

6. Keluargaku, bapak, ibu, Siti Fathiyah istriku yang sabar, ibu dari anakku Salman Bassaam yang tak putus asa latihan berdiri, *shabron ya Aaly fa inna mau'idukumul jannah- insyaallah*, bang Sahal, Sahil atas pinjeman notebooknya, *al isti'arah al muntahiyah bit tamlik* kalau bisa.
7. Seluruh teman-teman angkatan XI PHI, , Suja'i, Muclis, Machrus Khadijah, Wiwi, Uly, dan Bu Elia, terutama kang Husen yang setia menemani hingga akhir masa study. *Kang mudah-mudahan berkah. amin*
8. Juga PHI angkatan 13, Mas Aliardo, Khowarizmi, Wira, tidak lupa juga cak Nuris yang ngirimin alamat-alamat website. *Nafa'akumullah bi ulumikum.*
9. Seluruh staf administrasi PSTTI UI (Mba Herlin, Mas Fery, Mas Erwin, Mas Hidayat dkk) yang telah banyak membantu selama masa kuliah saya.
10. Seluruh pihak terkait lainnya yang belum mungkin disebutkan satu per satu disini.

Penulis sangat sadar tesis ini masih jauh dari sempurna sehingga sangat mengharap do'a dan masukan-masukan dari berbagai pihak dalam menyempurnakannya. *Akhirul kalam Alhamdulillah Rabbil 'Alamin.*

Wallahu'alam bis shawab.

Jakarta, 11 Juli 2009

Penulis
Wiwid Purwawan

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademis Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wiwid Purwaawan
NPM : 0606024812
Konsentrasi : Politik dan Hubungan Internasional
Program Studi : Kajian Timur Tengah dan Islam
Fakultas : Program Pasca Sarjana
Jenis karya : Tesis

Demi mengembangkan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Kepentingan Politik Perancis Di Suriah Pada Masa Pemerintahan Nicolas Sarkozy

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Jakarta
Pada tanggal : 15 Juli 2009
Yang menyatakan

Wiwid Purwawan
0606025191

ABSTRAK

Nama : Wiwid Purwawan
Program Studi : Kajian Timur Tengah dan Islam
Judul : Kepentingan Politik Perancis di Suriah pada masa pemerintahan Nicolas Sarkozy

Pasca turunnya popularitas Amerika sebagai negara super power terkemuka, wacana kepemimpinan global muncul ke permukaan. Sehingga negara-negara besar diantaranya Perancis tergoda untuk memperluas pengaruhnya di dunia internasional. Timur Tengah sebuah kawasan strategis menjadi target perluasan pengaruh Perancis. Perancis menghadapi berbagai kendala menyangkut kondisi politik kawasan, kendala yang menghadapkan Perancis kepada pilihan-pilihan sulit karena menyangkut keberpihakan. Masalah pertentangan antar golongan di Lebanon, krisis Palestina-Israel, dan polemik nuklir Iran. Semua permasalahan tersebut menuntut Perancis untuk melakukan politik luar negeri dan mengeluarkan kebijakan yang tepat.

Suriah dan Lebanon adalah dua negara Timur Tengah yang memiliki hubungan historis dengan Perancis. Pada saat pengaruh Perancis di Lebanon menguat dan mulai mapan, tetapi masih menyisakan kekhawatiran sebelum perdamaian menyeluruh terwujud di Timur Tengah. Maka pada masa pemerintahan Presiden Nicolas Sarkozy seorang yang dikenal ambisius dan progresif, Perancis menempuh berbagai cara untuk mewujudkan kepentingannya dikawasan, seperti pendekatan yang intensif kepada Suriah, dan menggalang kekuatan dengan membentuk Uni Mediterania, sebuah kekuatan pendukung bagi kemapanan posisi Perancis di tingkat regional Eropa maupun internasional. Pendekatan Perancis kepada Suriah merupakan pilihan strategis, dimana Suriah sering disebut sebagai penentu bagi masa depan perdamaian Timur Tengah.

Kata kunci: *kebijakan luar negeri Perancis, kepentingan nasional, Nicolas Sarkozy, Suriah.*

ABSTRACT

Name : Wiwid Purwawan
Study Program : Mid-East and Islamic Studies
Title : Political Interest of French in Suriah at a Period of Nicolas Sarkozy Administration

Post lowering of United States popularity as state Super Power is notable, global leadership discourse emerged to surface. So that big nations between it's of French tempted to extend the influence in international world.

Mid-East was a strategic area, has become goals extension of French influence. French face various constraints concerning areas politics condition, constraint confronting French at difficult choices because concerning the siding. There's an Inter-communities problem in Lebanon, Palestinian-Israel crisis, and Iran nuclear polemic. All the problems claim French for doing overseas politics and spend correct policy.

Suriah and Lebanon is two states in the Middle East had historical relationship with French. At the time of French influence in Lebanon is strong and start establishing, but still leave over one care before peace totally presentation of in the East Middle. Hence at a period of government of President Nicolas, Sarkozy, progressive and ambitious recognized one, French go through various means for realizing the importance in area, like intensive approach to Suriah, and look after strength with forming Uni Mediterania, a strength of supporter for settled condition of position of French in level of regional Europe and also International. Approach of French to Suriah is strategic choice, which Suriah often called as determinant to the future of peace in the East Middle

Keyword: Foreign Policy of French, National Interest, Nicolas Sarkozy, Suriah.

التجريد

ويويد بورواوان :	الاسم
الدراسات العليا للشرق الأوسط و الإسلام :	قسم
مصالح فرنسا السياسية في سورية على عهد نيجولاس ساركوسي	العنوان
سياسة فرنسا الخارجية ، مصالح الشعب ، نيجولاس ساركوسي ، سورية	الكلمات المفتاحية

بعد أن اندرست أثر هيمنة أمريكا كالدولة الحاكمة في العالم ، تبدو ظاهرة عالمية باحتياج العالم إلى قيادة جديدة تحكم العالم بالمساوات والعدل . هذه الظاهرة تدعو البلاد الكبيرة كفرنسا إلى تعميم دورها الفعال في العالم كله والسيطرة عليه . فالشرق الأوسط هي الأقطار التي تهدفها النفوذ الفرنسي . تجد فرنسا في نفوذها عراقل شتتي ، هذه العراقل و جهت فرنسا و نفوذها أمام الاختيارات والمواقف السياسية الصعبة ، أنها قد تطلب موقفا لا تريده فرنسا نفسها خاصة ما يتعلق بالولاء . من تلك العراقل التعارض المؤدي إلى التقاتل بين القوات المحلية في لبنان ، و حرب الفلسطينية مع إسرائيل و ما يتعلق بتطوير القوة النووية في إيران .

سورية و لبنان بلادان ذا العلاقة التاريخية مع فرنسا ، بعد أن قويت نفوذ فرنسا في لبنان و تمكنت ، لا تزال تشعر فرنسا بوجود محاذير خاصة قبل أن أيعم السلام سائر الشرق الأوسط . فبناء على مصالح فرنسا في الأقطار تسعى فرنسا على عهد نيجولاس ساركوسي كل سعي ، كتجديد العلاقة الدولية مع سورية بقدر كبير من الاقتراب منه ، وإنشاء اتحاد الدول حول البحر الأبيض المتوسط الذي يساند النفوذ الفرنسي في أوروبا و رفع مستواها في العالم . سياسة فرنسا في سورية اختيار إستراتيجي نظرا إلى أن سورية بيدها الكلمة الخاتمة في مستقبل السلام في الشرق الأوسط ، كذا قاله غير واحد من الناس .

RINGKASAN EKSEKUTIF

Perancis merupakan salah satu negara yang memegang peranan penting di dunia internasional, terutama di percaturan politik Eropa. Republik ini merupakan negara pendiri Uni Eropa yang sekaligus merupakan negara anggota Uni Eropa yang memiliki luas daratan terbesar. Selain itu, Perancis juga merupakan negara pendiri NATO dan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memiliki keanggotaan tetap di Dewan Keamanan. Perancis juga dikenal sebagai salah satu dari tujuh negara dunia yang memiliki kekuatan nuklir.

Perancis adalah salah satu diantara negara industri terkemuka di dunia. Sebagai negara industri, pasar dan ketersediaan bahan mentah dan energi merupakan hal yang paling vital. Seperti negara-negara besar lainnya Perancis memandang Timur Tengah merupakan kawasan yang strategis bagi keberlangsungan hidup negara-negara industri, selain potensi pasar Timur Tengah yang masih tergolong kosong, Timur Tengah merupakan pusat penghasil sumber energi terbesar didunia.

Sejak penguasaan Perancis atas daerah Lebanon dan Suriah, Perancis telah memulai menancapkan minatnya kepada Timur Tengah, bersama dengan teman sejawatnya Inggris dan Itali, Perancis berupaya menguasai kawasan Timur Tengah. Dengan berbagai cara menanamkan pengaruhnya di kawasan tersebut, mulai dari politik pecah belah sampai pendirian negara Lebanon yang sarat dengan kepentingan Perancis.

Pada mulanya Perancis memfokuskan perhatiannya kepada Lebanon karena disana terdapat golongan Maronit dari kalangan Kisten. Golongan ini didorong untuk menjadi dominator di Lebanon, hingga akhirnya Perancis berhasil “membangkitkan” lahirnya Lebanon modern sebagaimana yang ia inginkan dalam rangka menancapkan pengaruhnya di Timur Tengah dengan menjadikan golongan Maronit sebagai penentu kebijakan di Lebanon. Dengan demikian Lebanon bagaimanapun sulit untuk terbebas dari pengaruh Perancis.

Disamping Lebanon, Suriah juga mendapat perhatian khusus dari Perancis, karena bagaimanapun negara tetangga Lebanon tersebut secara historis, geografis dan

sosiologis mempunyai hubungan yang erat dengan Lebanon. Sikap Suriah terhadap Lebanon, bahwa Suriah tidak setuju dengan pemisahan antara keduanya akan ada pengaruh pada masa depan negara Lebanon.

Untuk itu pada abad 21 ini dimana Perancis sedang dipimpin oleh seorang yang progresif, Nicolas Sarkozy, melakukan pendekatan-pendekatan kepada negara Suriah, dimana Suriah sekarang sedang berada di bawah kepemimpinan yang toleran bagi siapapun yang ingin menjalin kerjasama dengan negara tersebut. Pada saat yang sama pemerintahan presiden Sarkozy telah menetapkan kebijakan luar negeri yang terbuka bagi hubungan semua negara terutama mempererat hubungan dengan negara-negara bekas jajahan Perancis di kawasan Timur Tengah dan Afrika. Menjadikan Suriah sebagai target utama politik luar negeri Perancis adalah karena alasan strategis dimana Suriah menempati posisi yang khas diantara negara-negara Timur Tengah, juga kondisi intern Suriah yang tidak menjadi kendala bagi penanaman pengaruh Perancis di negara tersebut.

Langkah langkah berani diambil oleh Perancis untuk menarik hati Suriah, seperti pada bulan Juli 2008 Sarkozy mengundang presiden Suriah, Basyar Asad, pada perayaan Hari Bastille yang sempat mengundang kontroversi didalam negeri Perancis. Membaiknya hubungan Perancis dengan Suriah bertepatan dengan momentum yang tepat, ini merupakan babak baru bagi perkembangan politik luar negeri Perancis di kawasan Timur Tengah, dimana kekuatan utama dunia yang menguasai Timur Tengah, Amerika Serikat, pamornya mulai turun pasca agresinya di Irak.

Perbaikan hubungan tersebut merupakan hal yang sama-sama diinginkan oleh kedua belah pihak, baik Perancis maupun Suriah. Perancis sebagai negara industri dunia sebagaimana negara-negara maju lainnya jelas berkepentingan dengan Timur Tengah, dan dengan melakukan perbaikan hubungan dengan Suriah, setelah Lebanon, Perancis akan semakin kuat pengaruh dan posisi tawarnya di Timur Tengah dan dunia internasional. Juga Suriah mulai leluasa berperan dalam proses politik kawasan Timur Tengah setelah beberapa tahun belakangan di isolasi oleh Amerika karena keterlibatannya membantu milisi Hizbullah, juga Perancis karena terlalu jauhnya

campur tangan di Lebanon, berikut negara-negara Timur Tengah yang *se iya sekata* dengan kedua kekutan tersebut.

Dari uraian diatas maka rumusan masalah dalam tesis ini adalah bahwa dalam konteks hubungan Perancis dan Timur Tengah, dua negara Lebanon dan Suriah memiliki kedudukan yang penting bagi Perancis, secara historis keduanya merupakan koloni dimana pengaruh Perancis di kedua negara tersebut harus tetap eksis demi berperannya Perancis di kawasan Timur Tengah. Dan pada masa pemerintahan Sarkozy posisi Suriah bagi Perancis terlihat strategis dilihat dari sikap Sarkozy terhadap Suriah, ia menyatakan bahwa perdamaian Timur Tengah akan melalui Perancis dan Suriah.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dalam tesis ini disusun pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Mengapa Suriah menjadi titik fokus politik luar negeri Perancis di Timur Tengah pada masa pemerintahan Nicolas Sarkozy?
2. Faktor-faktor apa yang melatarbelakangi Perancis menjalin hubungan dengan Suriah pada masa pemerintahan Nicolas Sarkozy?
3. Bagaimana prospek hubungan luar negeri Perancis-Suriah pada masa yang akan datang?

Terjawabnya pertanyaan penelitian diatas diharapkan dapat mencapai tujuan penelitian yaitu untuk; (1) Mengetahui alasan di jadikannya Suriah sebagai titik fokus politik luar negeri Perancis pada masa pemerintahan Nicolas Sarkozy di Timur Tengah. (2) Mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi hubungan Perancis-Suriah pada masa pemerintahan Nicolas Sarkozy. (3) Mengetahui masa depan hubungan Perancis-Suriah.

Dalam pelaksanaannya, karena keterbatasan dan agar lebih focus dalam penelitian ini, maka penelitian ini dibatasi beberapa hal sebagai berikut: Bagaimana kepentingan nasional Perancis terbentuk, bagaimana kepentingan tersebut membentuk politik luar negeri Perancis di Suriah, dan bagaimana proses terbentuknya politik luar negeri Perancis di Suriah.

Paradigma yang digunakan dalam penelitian adalah Paradigma kualitatif dengan metode studi kasus. Paradigma kualitatif memandang realitas (objek penelitian) dalam kenyataan yang berjalan sesuai dengan teori dan kerangka pemikiran menurut interpretasi peneliti. Adapun metode penelitian studi kasus (*Case Study*) adalah suatu pendekatan mempelajari, menerangkan, dan menginterpretasi suatu kasus dalam konteksnya secara natural tanpa ada intervensi dari pihak luar. metode penelitian studi kasus mempunyai manfaat menjelaskan hubungan sebab akibat dalam hubungan nyata, menjelaskan sebuah konteks kehidupan, evaluasi dan eksplorasi.

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu berupa dokumen dari berbagai sumber tidak langsung. Data tersebut merupakan dokumen eksternal yang berupa bahan-bahan informasi yang di *release* oleh media massa secara tidak langsung dari sumbernya, dihasilkan oleh majalah, bulletin, jurnal dan berita yang disiarkan oleh media massa.

Berdasarkan interpretasi dan analisa dari data-data yang dikumpulkan oleh peneliti, kepentingan nasional Perancis berorientasi kepada keberlangsungan dan kesejahteraan bangsa Perancis dengan politik luar negeri yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal seperti, lingkungan, kependudukan, politik, ekonomi, sosial, dan kepemimpinan nasional. Juga faktor-faktor eksternal seperti, kondisi politik internasional yang merupakan peluang dan tantangan bagi setiap negara yang memperjuangkan eksistensi dan pengakuan dari dunia sekelilingnya.

Perancis sebagai salah satu kekuatan dunia pada masa pemerintahan Nikolas Sarkozy menginginkan sebuah kepemimpinan global yang baru. Dimana menurut Perancis hegemoni Amerika sudah tidak lagi mampu menciptakan kesejahteraan dan keamanan dimana penduduk dunia dapat hidup dengan harmonis. Untuk itu Perancis ingin tampil sebagai kekuatan baru yang dapat mengayomi seluruh penduduk dunia.

Ketika pengaruh Amerika menurun karena kegagalannya di berbagai misi di Timur Tengah, Perancis mendapatkan peluang untuk memulai langkahnya dengan berperan aktif menciptakan Timur Tengah yang aman dengan menyelesaikan berbagai permasalahan kawasan tersebut. Langkah Perancis tersebut selain di

latarbelakangi oleh ambisi internasionalnya, tentu kepentingan lain seperti ekonomi mewarnai langkah politik luar negeri Perancis. Langkah yang telah telah ditempuh oleh Perancis untuk memperkuat pengaruhnya di dunia internasional, Perancis memperkuat posisinya di kawasan Eropa dengan berusaha untuk menjadi dominan dalam memainkan perannya di Eropa, lalu ditopang dengan perannya dalam mendirikan Uni Mediterania yang mengumpulkan negara-negara Eropa dan Timur Tengah disekitar mediterania yang strategis. Dalam usaha Perancis di Timur Tengah, Perancis mendapati bahwa negara Suriah merupakan kunci dan negara yang paling dapat “dimanfaatkan” oleh Perancis berdasarkan beberapa alasan strategis. *Pertama*, Suriah merupakan negara yang bebas dari pengaruh Amerika, dimana kemandirian sikap dalam berbagai masalah dapat diambil sebagai pilihan oleh negara ini. Ia juga bebas dari pengaruh negara besar manapun di Eropa, hal itu tercermin dalam politik luar negeri Suriah.

Kedua, Suriah merupakan negara yang majemuk dari sisi keyakinan agama penduduknya, dimana satu kelompok dengan yang lainnya terus berusaha untuk mendominasi dan memperjuangkan ideologinya masing-masing, sehingga secara intern Suriah selalu terancam oleh api dalam sekam permusuhan antar warga, ditambah masih adanya kelompok-kelompok yang belum menerima sistem *Ba'ats* yang sosialis sebagai sistem dalam bernegara. Disini pemimpin yang berkuasa di Suriah memerlukan dukungan dari luar. Perancis melihat ini sebagai peluang untuk masuk lebih jauh menanamkan pengaruhnya di Suriah, dimana pengaruh Perancis sebelumnya telah ada dalam negara tersebut, sehingga Suriah diharapkan menjadi kuda troya bagi Perancis.

Ketiga, kepemimpinan nasional Suriah. Suriah dibawah presiden Basyar Asad tidak sekuat kepemimpinan ayahnya, Hafizh Asad. Terbukti dibawah kepemimpinan Basyar Asad Perancis berhasil menggiring Suriah dan Lebanon untuk menandatangani kesepakatan pengiriman duta besar dari keduanya. Eksistensi Lebanon tanpa gangguan Suriah telah terwujud, dimana ini sangat berarti bagi peran Perancis di Lebanon.

Keempat, alasan ekonomi. Suriah sebagai negara berkembang akan banyak membangun infrastruktur dan sarana-sarana, mulai dari transportasi dan listrik. Selain itu Suriah seperti negara Timur Tengah lainnya pendapatannya sebagian besar dari minyak dan gas.

Sedangkan faktor-faktor yang mendorong Perancis untuk menjalin hubungan dengan Suriah disamping ambisi internasionalnya dengan memperkuat pengaruhnya di negara-negara Timur Tengah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan kepentingan nasional. Pada saat Perancis menuai kritik dalam penerapan *Laicitas* terutama dari kalangan Islam, Perancis berusaha membayarnya dengan menebar simpati kepada negara-negara yang berpenduduk mayoritas muslim, sekaligus meredam reaksi dari negara-negara lain yang bertujuan untuk menurunkan citra Perancis. Selain itu bersama dengan bekerjasama dengan Suriah Perancis ingin membuktikan model diplomasi yang sama sekali berbeda dengan model diplomasi unilateral yang Amerika terapkan di Timur Tengah. Karena menurut Perancis permasalahan di Timur Tengah hanya bisa diselesaikan dengan diplomasi multilateral.

Lalu bagaimana prospek hubungan Perancis dengan Suriah dimasa mendatang, melihat aksi dari Suriah yang belum semuanya sesuai dengan komitmen yang dikehendaki oleh Perancis suatu saat ada kemungkinan hubungan tersebut akan tidak berjalan baik. Dalam kasus nuklir Iran harapan Perancis kepada Suriah masih Jauh, karena Suriah "tidak berani" untuk mengatakan tidak bagi keseluruhan program nuklir Iran. Juga usaha berdamai dengan Israel, selama Israel tidak menyetujui syarat yang diminta Suriah, nampaknya harapan Perancis kepada Suriah untuk berdamai dengan Israel juga masih jauh.

Penelitian ini masih memiliki banyak keterbatasan. Oleh karena itu diharapkan akan ada penyempurnaan penelitian di masa yang akan datang. Untuk penelitian selanjutnya kami menyarankan adanya penelitian yang spesifik dalam bidang ekonomi dalam hubungan Perancis-Suriah. Juga yang menyangkut perbedaan dan persamaan antara identitas politik Suriah dan Perancis.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
RIWAYAT HIDUP	v
KATA PENGANTAR.....	vi
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
KARYA ILMIAH.....	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
AT TAJRID	xi
RINGKASAN EKSEKUTIF	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
 BAB I	
Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Pokok Masalah	4
1.2.1 Identifikasi Masalah	5
1.2.2 Pembatasan Masalah	5
1.3 Fokus Masalah dan Pertanyaan Penelitian.....	5
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Sistematika Pembahasan Tesis.....	7

BAB II	
Kerangka Teori	9
2.1 Pengantar	9
2.2 Teori kepentingan nasional	9
2.3 Teori kebijakan luar negeri	11
2.4 Teori politik luar negeri	13
2.5 Kerangka konseptual	16
BAB III	
Metodologi Penelitian	18
3.1 Pengantar	18
3.2 Ruang Lingkup Penelitian	18
3.2.1 Batasan Obyek Masalah	18
3.2.2 Karakteristik Data Penelitian	19
3.3 Paradigma Penelitian	20
3.4 Metode Penelitian	21
3.5 Unit Analisis Penelitian	22
3.6 Metode Pengumpulan Data	22
3.7 Metode analisa data	24
BAB IV	
Ruang Lingkup Politik Perancis di Suriah	26
4.1 Hubungan Perancis-Suriah dari waktu ke waktu	26
4.2 Hubungan Perancis-Suriah dari waktu ke waktu	33
4.3 Kepentingan Nasional Perancis: Faktor Internal dan Eksternal	36
4.3.1 Faktor Internal	36
4.3.2 Faktor Eksternal	44
a. Posisi Perancis dalam perpolitikan internasional	44
b. Perancis dan Uni Eropa	48
c. Perancis dan perdamaian Timur Tengah	49

4.4 Politik luar negeri Perancis di Suriah	
pada masa pemerintahan Nicolas Sarkozy	50
4.5 Potensi nasional dan lingkungan politik Suriah	53
4.5.1 Letak strategis Suriah.....	54
4.5.2 Masyarakat	55
4.5.3 Politik dan kepemimpinan nasional Suriah	57
4.5.4 Ekonomi	59
4.5.5 Hubungan Suriah dengan negara-negara Timur Tengah	61
4.5.6 Kebijakan luar Negeri Suriah pada masa pemerintahan Basyar Asad	65
4.5.7 Prospek Hubungan Perancis-Suriah	67

BAB V

Kesimpulan dan Saran	70
5.1 Kesimpulan	70
5.2 Saran	72
5.3 Saran untuk penelitian selanjutnya	73
Daftar Pustaka	74
Daftar Lampiran	

DAFTAR LAMPIRAN

	Hal
Lampiran 1	Peta negara Suriah L-1 1
Lampiran 2	Oil: Proved reservesL-2 2
Lampiran 3	Fifteenth Ambassadors' Conference Speech by M. Nicolas Sarkozy L -3 4
Lampiran 4	Laporan kunjungan delegasi Komisi I DPR-RI ke negara Suriah L-4 19



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perancis merupakan salah satu negara yang memegang peranan penting di dunia internasional, terutama di percaturan politik Eropa. Republik ini merupakan negara pendiri Uni Eropa yang sekaligus merupakan negara anggota Uni Eropa yang memiliki luas daratan terbesar. Selain itu, Perancis juga merupakan negara pendiri NATO dan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memiliki keanggotaan tetap di Dewan Keamanan. Perancis juga dikenal sebagai salah satu dari tujuh negara dunia yang memiliki kekuatan nuklir.

Perancis adalah salah satu diantara negara industri terkemuka di dunia. Sebagai negara industri, pasar dan ketersediaan bahan mentah dan energi merupakan hal yang paling vital. Seperti negara-negara besar lainnya Perancis memandang Timur Tengah merupakan kawasan yang strategis bagi keberlangsungan hidup negara-negara industri. Selain potensi pasar Timur Tengah yang masih tergolong kosong, Timur Tengah merupakan kawasan yang strategis dengan berbagai sumber daya minyak. Siapa yang menguasai wilayah ini hampir bisa dipastikan akan mendominasi dunia. Ada beberapa alasan mengapa Timur Tengah menjadi wilayah yang strategis bagi dunia. Pertama, secara geopolitik, kawasan Timur Tengah terletak pada pertemuan Eropa, Asia, Afrika sehingga kawasan ini merupakan pintu masuk utama ke ketiga benua tersebut. Timur Tengah juga berbatasan dengan laut Tengah, laut Merah, laut Hitam, laut Kaspia, Teluk Parsi, dan Samudera Hindia. Di kawasan ini juga terdapat jalur-jalur perairan yang strategis, yaitu Selat Bosphorus, Selat Dardanella, Terusan Suez, Selat el-Mandeb, dan Selat Hormuz. Jadi Timur Tengah secara geografis, geopolitis, dan geostrategis merupakan kawasan yang selalu menjadi pusat perhatian masyarakat internasional, karena letaknya yang menghubungkan benua Eropa, Afrika, dan Asia.

Kedua, kandungan kekayaan alam, terutama minyak. Penemuan minyak di daerah Timur Tengah menambah nilai strategis kawasan ini. Sebab, minyak adalah sumber energi utama bagi industri dunia, terutama Barat, yang belum bisa

digantikan oleh sumber energi lainnya. Enam puluh persen cadangan minyak dunia ada di Timur Tengah. Apalagi, biaya eksploitasi minyak di Timur Tengah sangat rendah. Timur Tengah memiliki 28 dari 33 ladang minyak yang tergolong "supergiant". Sampai akhir tahun 2008 cadangan minyak yang ada di Timur Tengah adalah 754,1 milyar barel atau 59,9 % dari cadangan minyak dunia yang berjumlah 1258,0 milyar barel.¹

Ketiga, negara-negara di Timur Tengah, berkat kekayaan yang diperoleh dari rezeki minyak, telah menjadi negara-negara pengimpor senjata dari Timur maupun dari Barat. Kawasan ini sangat menarik bagi negara-negara pengeksport senjata yang dengan mudah dapat memperoleh devisa secara sangat menguntungkan lewat lalu lintas perdagangan senjata mereka. Amerika Serikat, Uni Sovyet (Rusia), Inggris, Prancis, beberapa negara Eropa Timur dan sejumlah negara Amerika Latin serta Republik Rakyat Cina adalah negara-negara yang menaruh minat besar dalam perdagangan senjata di Timur Tengah.²

Keempat, faktor ideologi. Timur Tengah merupakan tempat lahirnya agama-agama besar dunia (Yahudi, Nasrani, Islam). Pada masa lampau, persoalan agama ini bisa menjadi sumber konflik lewat intervensi asing. Perancis, misalnya, sering mengklaim sebagai pembela gereja Kristen Latin dan Maronit untuk menguasai Suriah dan Lebanon. Rusia selalu membela gereja-gereja Kristen Ortodok. Pada masa sekarang, dari kawasan ini muncul gerakan-gerakan Islam ideologis yang menentang penjajahan Kolonial Barat. Potensi kekuatan Ideologi Islam yang besar di daerah ini mengkhawatirkan penjajah Barat. Bisa disebut, gerakan-gerakan Islam pasca keruntuhan Khilafah Islam muncul dari kawasan ini.

Posisi Timur Tengah yang strategis telah membuat kawasan ini menjadi kawasan yang diperebutkan oleh kekuatan-kekuatan politik dunia. Hal ini menunjukkan bahwa negara-negara besar sangat membutuhkan negara-negara Timur Tengah yang kaya minyak, dimana negara-negara besar tersebut adalah negara-negara industri yang selalu membutuhkan cadangan-cadangan energi sekaligus pasar bagi produk industri mereka, termasuk Perancis adalah diantara

¹ <http://www.bp.com/statisticalreview>, diakses pada tanggal 17 juni, pukul 14.52 WIB

² Taylor, Alan R., Pergeseran-Pergeseran Aliansi dalam Sistem Perimbangan Kekuatan Arab, Amarpres, 1990

negara yang berkepentingan dengan Timur Tengah, mengingat Perancis adalah salah satu diantara negara industri.

Antara Perancis dan Timur Tengah secara umum merupakan jalinan interdependensi, sebuah jalinan yang saling membutuhkan, dimana kerjasama yang seharusnya terjalin adalah kerjasama yang saling menguntungkan. Konflik apapun yang terjadi di Timur Tengah akan berakibat kerusakan bagi kawasan tersebut. Untuk itu usaha perdamaian seharusnya diciptakan oleh negara-negara yang berkepentingan, termasuk Perancis.

Sejak penguasaan Perancis atas daerah Lebanon dan Suriah, Perancis telah memulai menancapkan minatnya kepada Timur Tengah, bersama dengan teman sejawatnya Inggris dan Itali, Perancis berupaya menguasai kawasan Timur Tengah. Dengan berbagai cara Perancis menanamkan pengaruhnya di kawasan tersebut. Pada mulanya Perancis memfokuskan perhatiannya kepada Lebanon karena disana terdapat golongan Maronit dari kalangan Kisten. Golongan ini didorong untuk menjadi dominator di Lebanon, hingga akhirnya Perancis berhasil "membidani lahirnya Lebanon modern sebagaimana yang ia inginkan dalam rangka menancapkan pengaruhnya di Timur Tengah dengan menjadikan golongan Maronit sebagai penentu kebijakan di Lebanon. Dengan demikian Lebanon bagaimanapun sulit untuk terbebas dari pengaruh Perancis.

Disamping Lebanon, Suriah juga mendapat perhatian khusus dari Perancis, karena bagaimanapun negara tetangga Lebanon tersebut secara historis, geografis dan sosiologis mempunyai hubungan yang erat dengan Lebanon. Sikap Suriah terhadap Lebanon, bahwa Suriah tidak setuju dengan pemisahan antara keduanya akan ada pengaruh pada hubungan kedua negara.

Pada abad 21 ini, hubungan Perancis dengan Suriah tetap berlanjut, meskipun berbagai dinamika terjadi dalam hubungan tersebut, pasang surut mewarnai hubungan kedua negara. Pada masa pemerintahan presiden Perancis Jacques Chirac, Perancis memutus hubungan tingkat tinggi dengan Suriah karena peristiwa pembunuhan mantan PM Lebanon, Rafik Al Hariri. Perancis menuduh Suriah berada dibalik peristiwa itu. Tetapi sikap Perancis terhadap Suriah berubah setelah terpilihnya Nicolas Sarkozy menggantikan Jacques Chirac sebagai presiden Perancis, saling mengunjungi terjadi diantara kedua negara. Bahkan

Sarkozy pada bulan Juli 2008 mengundang presiden Suriah Basyar Asad pada perayaan Hari Bastille yang sempat mengundang kontroversi didalam negeri Perancis. Selanjutnya pada bulan September 2008 yang lalu Presiden Perancis Nicolas Sarkozy mengunjungi Damaskus, dimana kunjungan tersebut bukan sekedar kunjungan biasa, tapi untuk menormalkan kembali hubungan bilateral kedua negara yang sempat terputus selama 3 tahun lebih sejak pembunuhan mantan PM Lebanon, Rafiq Hariri bulan Februari 2005.

Kunjungan tersebut sebagai pertanda bahwa Suriah, selaku salah satu tulang punggung dunia Arab ditinjau dari kekuatan militernya mulai pulih perannya dalam proses politik kawasan. Kunjungan tersebut sekaligus sebagai pengakuan akan peran penting negara Suriah di tingkat regional Arab. Bagi Perancis sendiri, kunjungan tersebut sebagai pertanda kembalinya peran historis di kawasan, lewat pintu Suriah setelah lebih dari tiga dekade belakangan ini absen dan terpinggirkan oleh hegemoni AS di Timur Tengah.

Pada masa pemerintahannya, presiden Sarkozy telah menetapkan kebijakan luar negerinya dengan membuka hubungan dengan semua negara terutama mempererat hubungan dengan negara-negara bekas jajahan Perancis di kawasan Timur Tengah dan Afrika, dan Suriah adalah target utama bagi politik luar negeri Perancis. Dimana Perancis mengetahui bahwa ia bukan satu-satunya pemain di Timur Tengah.

Meskipun Sarkozy termasuk penganut paham *Gaullisme*³, namun ia tidak ingin melanjutkan kebijakan tradisional yang menganut garis bersebrangan dengan AS. Ia mencoba melibatkan diri sebagai pelengkap AS di Timur Tengah dengan tetap memelihara wilayah-wilayah pengaruh Perancis di kawasan terutama Lebanon agar tidak beralih ke pengaruh AS.

1.2 Pokok Masalah Penelitian

³ Gaullism adalah ideologi politik Perancis didasarkan pada pemikiran dan tindakan dari Charles de Gaulle. Pemikiran utama dari de Gaulle dalam masalah kebijakan internasional adalah kebijakan nasional yang independen, dengan beberapa konsekuensi praktis, adalah Perancis seharusnya tidak harus bergantung pada luar negeri untuk mempertahankan hidup dan Perancis harus menolak sikap kepada kuasa asing, baik Amerika Serikat atau Uni Soviet. Lihat <http://www.bambooweb.com/articles/G/a/Gaullist.html>, <http://www.encyclopedia.com/doc/1O46-Gaullism.html>

1.2.1 Identifikasi Masalah

Membaiknya hubungan Perancis dengan Suriah merupakan babak baru bagi perkembangan politik luar negeri Perancis di kawasan Timur Tengah. Perbaikan hubungan tersebut merupakan hal yang sama-sama diinginkan oleh kedua belah pihak, Perancis sebagai negara industri sebagaimana negara-negara maju lainnya jelas berkepentingan dengan Timur Tengah, dan dengan diperbaiknya hubungan Perancis-Suriah, Suriah mulai leluasa berperan dalam proses politik kawasan Timur Tengah.

Berdasarkan hal ini maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah apakah nilai strategis dari pulihnya hubungan Perancis-Suriah bagi kepentingan politik Perancis di kawasan Timur Tengah pada masa pemerintahan Nikcolas Sarkozy?

1.2.2 Pembatasan Masalah

Untuk meneliti seluruh identifikasi masalah diatas diperlukan suatu usaha dari peneliti. Dan jika peneliti memiliki keterbatasan kemampuan, maka penelitian hanya akan dibatasi pada:

1. Bagaimana kepentingan nasional Perancis terbentuk.
2. Bagaimana kepentingan tersebut membentuk politik luar negeri Perancis di Suriah.
3. Bagaimana ruang lingkup politik luar negeri Perancis dan Suriah.

1.3 Fokus Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Dalam sebuah pidato kenegaraan bulan Agustus 2007 dihadapan duta-duta besar Perancis di seluruh dunia, Sakozy menyebutkan bahwa Perancis bukan satu-satunya negara yang memiliki posisi istimewa diantara negara-negara didunia, terkait masalah-masalah Timur Tengah Perancis harus turut memainkan perannya, dalam masalah politik Lebanon Perancis adalah teman bagi semua orang Lebanon, Perancis berkomitmen pada resolusi 1559 dan 1701 DK PBB, bahwa Perancis akan memberikan kemerdekaan dan kedaulatan secara penuh kepada

Lebanon, juga ia menghimbau kepada Suriah untuk berperan lebih jauh dalam usaha perdamaian di Timur Tengah.⁴

Dalam hubungan Perancis dan Timur Tengah, dua negara Lebanon dan Suriah memiliki kedudukan yang penting bagi Perancis, secara historis keduanya merupakan koloni dimana pengaruh Perancis di kedua negara tersebut harus tetap eksis demi berperannya Perancis di kawasan Timur Tengah. Dan pada masa pemerintahan Sarkozy posisi Suriah bagi Perancis terlihat strategis dilihat dari sikap Sarkozy terhadap Suriah, ia menyatakan bahwa perdamaian Timur Tengah akan melalui Perancis dan Suriah.⁵

Atas dasar fakta sebagaimana diuraikan diatas, maka penelitian ini hendak menganalisa berbagai permasalahan terkait kepentingan politik Perancis di Suriah pada masa pemerintahan Nicolas Sarkozy. Karenanya, fokus permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Mengapa Suriah menjadi titik fokus politik luar negeri Perancis di Timur Tengah pada masa pemerintahan Nicolas Sarkozy?
2. Faktor-faktor apa yang melatarbelakangi Perancis menjalin hubungan dengan Suriah pada masa pemerintahan Nicolas Sarkozy?
3. Bagaimana prospek hubungan luar negeri Perancis-Suriah pada masa yang akan datang?

1.4 Tujuan Penelitian

Sebagaimana telah dipahami oleh banyak orang dalam dunia penelitian bahwa tujuan penelitian harus berbanding lurus dengan fokus permasalahan yang menjadi konsem utama dari sebuah penelitian. Dengan kata lain, tujuan penelitian adalah merupakan implementasi logis dari rumusan penelitian.

Berangkat dari paradigma inilah, maka tujuan penelitian yang mengambil tema "Kepentingan Politik Perancis di Suriah Pada Masa Pemerintahan Nicolas Sarkozy", hal ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

⁴ http://www.nytimes.com/2007/06/05/world/europe/05france.html?_r=1, diakses pada 17 Juni 2009, pukul 14.52 WIB.

⁵ *ibid*

1. Mengetahui alasan di jadikannya Suriah sebagai titik fokus politik luar negeri Perancis pada masa pemerintahan Nicolas Sarkozy di Timur Tengah.
2. Mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi hubungan Perancis-Suriah pada masa pemerintahan Nicolas Sarkozy.
3. Mengetahui masa depan hubungan Perancis-Suriah.

1.5 Sistematika Pembahasan Tesis.

Dalam rangka untuk memudahkan alur-pikir pembahasan tesis ini, maka tesis yang mengambil tema *Kepentingan Politik Perancis di Suriah pada masa pemerintahan Nicolas Sarkozy* ini akan dibagi kedalam bagian-bagian yang terdiri dari bab dan sub-bab.

Bab pertama akan mengidentifikasi latar belakang politik Perancis di Suriah, dimana kondisi strategis Timur Tengah merupakan daya tarik bagi semua negara di dunia, khususnya negara-negara industri maju. Lalu dirumuskan masalah penelitian, berikut tujuan penelitian dan sistematika pembahasan tesis.

Bab dua, akan membahas kerangka teori. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tentang kepentingan nasional, kebijakan luar negeri dan politik luar negeri, dari penelusuran teori-teori tersebut lalu disusunlah kerangka konseptual.

Bab tiga adalah Metodologi dan Data Penelitian, yang terdiri dari Ruang Lingkup, Batasan Obyek Masalah, Penelitian, Paradigma Penelitian, Metode Penelitian, Karakteristik Data Penelitian, , Metode Pengumpulan Data dan Analisis Data Kasus.

Bab empat adalah Analisis dan Pembahasan. Bab ini merupakan uraian hasil penelitian dengan mengacu pada tahap-tahap penelitian. Bab ini akan membahas ruang lingkup politik Perancis dan Suriah, mulai dari sejarah hubungan kedua negara dari waktu-kewaktu, lalu hubungan kedua negara pada masa pemerintahan Nicolas Sarkozy, kemudian bagaimana politik luar negeri Perancis terbentuk berdasarkan potensi nasional Suriah, baik dari segi geografi, kependudukan, ekonomi, hubungan Suriah dengan negara-negara tetangga dan kepemimpinan nasional Suriah.

Sedangkan bab lima yang meruoakan bab terakhir dari penelitian ini, maka berisi penutup yang menakup kesimpulan dan saran. Yaitu kesimpulan yang menjawab semua pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. Juga bab ini berisi saran untuk penelitian selanjutnya.



BAB II

KERANGKA TEORI

2.1 Pengantar

Dalam teori Hubungan Internasional, pelaksanaan politik luar negeri bermula dari kondisi intern negara yang bersangkutan, bermula dari kepentingan nasional politik luar negeri dijalankan dengan berbagai instrumen yang ada. Dan dalam pelaksanaan politik luar negeri negara, hal tersebut telah terumuskan berupa kebijakan-kebijakan berdasarkan kepentingan nasional. Pada saat interaksi terjadi antara para aktor hubungan internasional, maka sikap dan respon terhadap sebuah kejadian pada masing-masing aktor akan berpengaruh pada sukses atau tidaknya pelaksanaan politik luar negeri suatu negara dalam rangka mempertahankan dan memperjuangkan kepentingan nasional.

2.2 Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional suatu bangsa ialah nilai-nilai dasar yang dianut oleh suatu bangsa itu. Nilai-nilai bangsa merupakan budaya bangsa yang terbentuk melalui proses panjang sejarah dan pengalamannya.⁶ Kepentingan-kepentingan yang digariskan suatu bangsa biasanya selalu mengacu pada upaya kesatuan dan persatuan bangsa yang lebih sempurna, terciptanya keadilan, ketenangan dan kedamaian domestik, pertahanan yang memadai, kesejahteraan ekonomi, dan berkah yang diberikan oleh kebebasan, tidak hanya untuk generasi sekarang tapi juga untuk generasi mendatang. Nilai-nilai dasar itu hanya bisa direalisasikan jika Negara dan bangsa dapat eksis berkesinambungan dalam lingkungan yang aman dan damai, sehingga kemerdekaan, integritas wilayah, lembaga-lembaga yang fundamental, dan suatu tingkat kehidupan politik, sosial ekonomi dan kemampuan militer yang lebih tinggi dapat terjamin.⁷

Adapun Jack C Plano dan Roy Olton mendefinisikan kepentingan nasional adalah sebagai berikut:

⁶ Habib, Hasnan A, *kapita selekta: strategi dan Hubungan Internasional*, Centre for Strategic and Internasional studies (CSIS), Jakarta, 1997, hal.312

⁷ Collins, Jhon M. *Grand Strategy: Principle and practices* (Maryland: Naval Institute Press, 1973, hal. 74

*"The fundamental objective ultimate determinant that guides the decision maker of state in making foreign policy. The national interest of state is typically a highly generalized conception of those element that constitute the state most vital need. These include self preservation, independence, territorial integrity, an economic well being."*⁸

Sementara menurut Donald E. Neurcherlein, kepentingan nasional adalah: produk suatu sistem politik dimana para pemimpin tiba pada suatu keputusan tentang pentingnya pengaruh suatu peristiwa luar terhadap keadaan negerinya. Menurutnya, kepentingan nasional terdiri dari empat kepentingan jangka panjang yang mendasari kebutuhan politik luar negeri suatu Negara.⁹

1. Kepentingan pertahanan nasional (*defense interest*), yaitu melindungi rakyat, wilayah, institusi, suatu Negara dari ancaman atau serangan fisik oleh kekuatan asing.
2. kepentingan ekonomi (*economic interest*), yaitu kepentingan untuk meningkatkan serta untuk melindungi perdagangan internasional termasuk kepentingan usaha swasta di luar negeri.
3. Kepentingan keteraturan internasional, yaitu terbentuknya lingkungan internasional yang aman (*world order interest*). Pertentangan antara Negara dapat diselesaikan secara damai. Kepentingan ini dapat juga berhubungan dengan masalah perimbangan kekuatan (*balance of power*) dan system aliansi militer.
4. kepentingan ideologi (*promotion of values*) yaitu yang bertujuan untuk melindungi dan menghidupkan nilai-nilai yang menjadi landasan Negara dan warga Negara dalam berupaya bersama-sama meyakini dan mempercayai nilai-nilai tersebut sebagai sebuah kebaikan yang universal.

Dengan katalain, kepentingan nasional adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan bangsa/Negara atau sehubungan dengan hal yang dicata-citakan. Dalam hal ini kepentingan nasional relatif tetap dan sama

⁸ Jack C Plano and Roy Olton, *The International Dictionary*, Holt Rinehart, Winston Inc, Western Michigan University, New York, 1973, hal. 127

⁹ Donald E. Neurcherlein, *The Concept of National Interest A Time for New Approaches*, Orbit, Vol.23, 1979, hal. 75

diantara semua Negara/ bangsa adalah keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayahnya) serta kesejahteraan. Kedua hal pokok ini yaitu, keamanan (security) dan kesejahteraan (prosperity) merupakan dasar dalam merumuskan atau menetapkan kepentingan nasional bagi setiap Negara.

2.3 Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri merupakan sikap dan komitmen suatu negara terhadap lingkungan eksternal, strategi dasar untuk mencapai tujuan kepentingan nasional yang harus dicapai diluar batas wilayahnya, dan hal itu diterapkan dalam sejumlah keputusan yang dibuat dalam kebijakan politik suatu bangsa. Para aktor pengambil kebijakan luar negeri (*foreign policy*) suatu bangsa akan mempertimbangkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap formulasi kebijakan politik luar negerinya. Kebijakan luar negeri suatu Negara biasanya juga bisa dipahami dengan melihat pandangan objektif dan kapabilitas bangsa, serta kebijakan dalam berfikir dan moralitas bangsa.

Dalam menentukan kebijakan luar negerinya suatu Negara sering dipengaruhi oleh faktor ikatan etnik, ideologi atau keagamaan. Terkadang suatu pemerintah memberikan bantuan, dukungan atau perlindungan kepada etnis atau penduduk yang memiliki persamaan dalam hal politik, sosial, dan keyakinan agama.¹⁰ Pada umumnya ikatan persamaan antara suatu kelompok sangat kuat terutama pertalian etnis. Jika suatu negara tetangga suatu negara yang memiliki pertalian etnis diyakini mendapat penindasan dan tekanan, maka suatu pemerintahan negara yang memiliki pertalian pertalian etnis akan berusaha melindungi dan membebaskannya. Sebagai contoh keterlibatan Perancis dalam proses pembentukan negara Lebanon dikarenakan Kristen Maronit sebagai mayoritas di daerah itu, juga seperti dukungan orang-orang Arab terhadap perjuangan pembebasan Palestina dari cengkeraman penjajah Israel.

Suatu negara memiliki tujuan yang akan dicapai dalam menjalankan kebijakan luar negerinya. Menurut K.J. Holsti setidaknya terdapat empat tujuan yang harus dicapai oleh semua negara sekarang ini:¹¹

¹⁰ Holsti, K.J, *International Politics A Framework for analysis*, sixth edition, (United State of America, Prentice-Hall, Ind, 1992) hal. 109

¹¹ *Ibid*, hal. 83

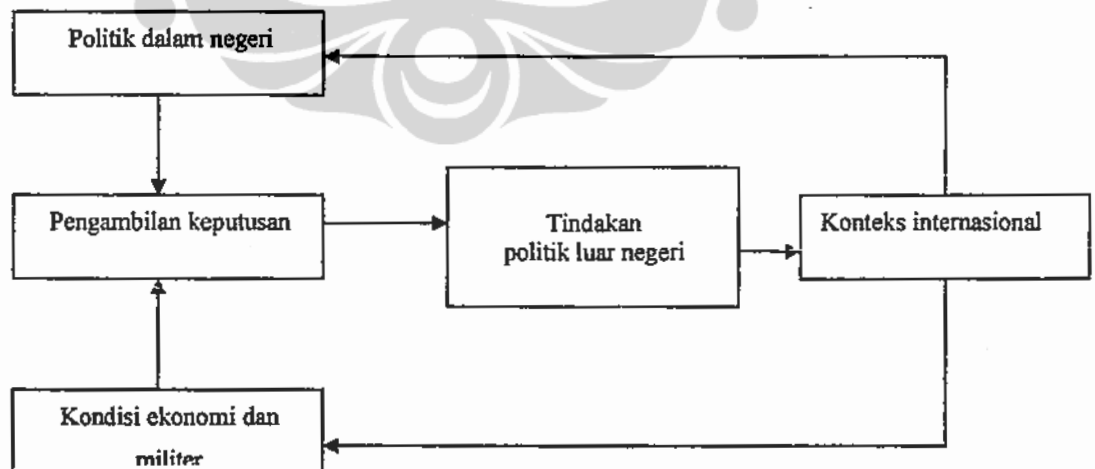
1. Keamanan (security)
2. Otonomi (authonomy)
3. Kesejahteraan (welfare)
4. Status dan prestise.

Keempat hal tersebut merupakan prioritas-prioritas yang ingin dicapai oleh setiap negara, tetapi tidak semua negara memiliki prioritas-prioritas yang sama dalam pencapaian tujuan kebijakan luar negerinya.

Sedangkan menurut William D.Coplin kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh beberapa faktor determinan, yaitu: ¹²

- a. Kondisi politik dalam negeri, termasuk faktor budaya sebagai dasar tingkah laku politik.
- b. Kondisi ekonomi dan militer domestik, termasuk faktor geografis yang selalu mendasari pertimbangan pertahanan dan keamanan.
- c. Pengambil keputusan, yaitu orang-orang yang memiliki tanggung jawab resmi dan pengaruh aktual dalam mengambil keputusan-keputusan yang menyangkut keterlibatan negaranya dalam pergaulan dunia.
- d. Konteks Internasional, yaitu pengaruh negara-negar lain atau konsentrasi politik Internasional.

Berikut ini merupakan gambaran yang mengilustrasikan bagaimana faktor-faktor yang disebutkan diatas berinteraksi untuk menghasilkan tindakan politik luar negeri pada suatu negara.



¹² William D. Coplin, *Intreduction to Internattional Politics, A Theoretical Overview* (Terjemahan M. Marbum), (Bandung.: CV. Sinar Baru, 1992), hal. 30

Sumber: William D Coplin, *Introduction to International Politics*)

Kajian mengenai teori proses pembuatan keputusan luar negeri (The Decision Making Process) menjelaskan bahwa politik luar negeri dipandang sebagai hasil berbagai pertimbangan rasional yang berusaha menetapkan pilihan atas berbagai alternatif yang ada, dengan keuntungan sebesar-besarnya ataupun kerugian yang sekecil-kecilnya (optimalisasi hasil). Para pembuat keputusan juga diasumsikan bisa memperoleh informasi yang cukup banyak sehingga bisa melakukan penelusuran tuntas terhadap semua alternatif kebijakan yang mungkin dilakukan dan semua sumber yang bisa dipakai untuk mencapai tujuan yang mereka tetapkan.¹³

2.4 Politik Luar Negeri

Politik luar negeri menurut Couloumbis dan Wolfe adalah sintesis dari tujuan atau kepentingan nasional dengan power dan kapabilitas. Tujuan politik luar negeri adalah untuk mewujudkan kepentingan nasional. Tujuan tersebut memuat gambaran atas keadaan negara di masa mendatang dan kondisi masa depan yang diinginkan. Adapun pelaksanaan politik luar negeri didahului oleh penetapan kebijaksanaan dan keputusan serta harus memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan pada faktor-faktor nasional sebagai faktor internal dan faktor-faktor internasional sebagai faktor eksternal.¹⁴

Menurut James N. Rosenau ada lima variabel yang berpengaruh terhadap pembuatan politik luar negeri. Dengan mengacu kepada pendapat Rosenau, Couloumbis dan Walfe membahas lima variabel tersebut, yaitu:

1. Variabel Ideosinkretik

Variabel ideosinkretik berkaitan dengan image dan karakter pribadi pembuat keputusan, antara lain mengenai ketenangan lawan ketergesaan, kemarahan lawan prudensi, ketakutan lawan percaya diri sendiri. Tidak dapat dipungkiri bahwa karakteristik psikologis para pemimpin serta para pembuat

¹³ Mohtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*, (Jakarta, LP3ES, 1990), hal. 276

¹⁴ Suprpto, R, *Hubungan Internasional: system, ineraksi dan perilaku*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 1997

keputusan, demikian juga para pelaksana politik mempunyai pengaruh atas hasil politik.

Kita bisa mengatakan bahwa variabel ideosinkretis relatif lebih mudah untuk menjelaskan keputusan-keputusan di negara-negara otoriter dan totaliter ketimbang di negara-negara demokratis yang kompetitif. Sifat pribadi seorang pemimpin yang diktator mudah terefleksikan dari semua kategori keputusan daripada sifat pribadi pemimpin demokratis yang harus mendengar dan memperhatikan pendapat pihak-pihak lain.

Disamping itu kita juga bisa berasumsi bahwa dampak variabel ideosinkretik lebih besar kepada keputusan-keputusan yang bersifat pragmatis yang dilihat pada masa-masa krisis, keterbatasan waktu, ancaman yang menjadi beban di pundak pemimpin negara beserta beberapa penasehatnya.

2. Variabel Peranan

Variabel peranan biasanya didefinisikan sebagai peraturan-peraturan perilaku yang diharapkan dari seseorang sesuai dengan pekerjaannya. Seseorang yang memegang peranan spesifik, hasil perilakunya dimodifikasi oleh harapan dan ekspektasi publik. Disamping para pemimpin oposisi sering membesar-besarkan perbedaan kebijaksanaan mereka terhadap kebijaksanaan yang sedang berkuasa, mereka juga cenderung mengemukakan janji-janji yang dibuat untuk memaksimalkan harapan dan ekspektasi para pemilih, tetapi setelah berkuasa cenderung membisu bahkan mendekati peran pendahulunya yang berkuasa sebelumnya.

Variabel peranan dikatakan lebih operatif dalam sistem demokrasi yang kompetitif karena perilaku pembuat keputusan lebih transparan dan terbuka terhadap kritikan sehingga penyimpangan-penyimpangan dari ekspektasi yang biasa berlaku mengenai peranan dalam suatu jabatan bisa menyebabkan tergesernya seorang pemimpin dari kekuasaannya.

3. Variabel Birokratis

Variabel ini menyangkut struktur dan proses pemerintahan serta efeknya terhadap politik luar negeri. Menurut Graham Allison dan Morton Halperin

kompleksitas birokrasi merupakan karakteristik yang terdapat pada hampir semua negara termasuk negara terbelakang. Allison serta penulis lain mengatakan, bahwa disamping sebagian besar kebijakan merefleksikan kepentingan-kepentingan biro-biro pemerintah, dinas-dinas, militer dan divisi-divisi lainnya yang saling bertentangan, secara konstan juga bersaing untuk melindungi kelangsungan hidup serta pertumbuhan birokrasi mereka yang sempit dan memaksimalkan keterlibatan maupun pengaruhnya dalam proses pembuatan keputusan. Para penstudi politik birokratis berpikir bahwa daripada mempelajari kebijaksanaan-kebijaksanaan Amerika di Eropa dan di Rusia lebih baik berpikir menurut pandangan Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, CIA, dan Departemen Luar Negeri yang saling bersaing mempengaruhi keputusan-keputusan Presiden Amerika Serikat.

Para penstudi politik birokratis mengatakan bahwa negara-negara besar khususnya negara-negara industri yang memiliki birokrasi yang besar dan kompleks lebih merasakan dampak variabel birokratis tersebut. Mereka juga mengatakan bahwa partai politik, kelompok penekan, mass media yang bebas, dan opini publik jauh lebih berpengaruh terhadap politik luar negeri pada negara yang menganut sistem demokrasi yang kompetitif daripada negara-negara otoriter dan totaliter.

4. Variabel Nasional

Variabel nasional mencakup berbagai atribut nasional yang mempengaruhi hasil politik luar negeri. Variabel nasional mencakup hal-hal berikut ini, variabel lingkungan, variabel kependudukan, variabel politik, variabel ekonomi, variabel sosial, dan variabel karakter nasional.

5. variabel sistemik

Karena adanya dalam suatu sistem antara unit yang satu terhadap yang lain maka muncullah variabel sistemik. Disini perhatian diarahkan kepada variabel eksternal yang berpengaruh terhadap keputusan-keputusan politik luar negeri dari negara-negara yang kita amati atau analisis.

Kita melihat bahwa politik luar negeri dari negara yang dipengaruhi oleh sistem *balance of power* akan berbeda dari politik luar negeri dari negara-negara yang dipengaruhi sistem bipolar Perang Dingin. Dalam sistem *balance of power*, politik luar negeri negara lebih fleksibel dan pragmatis karena sistem internasional dimana *balance of power* tersebut berada terbuka bagi perubahan-perubahan sehingga memerlukan penyesuaian-penyesuaian politik luar negeri, sedangkan dalam sistem bipolar Perang Dingin sistem tersebut memberikan dampak apakah suatu negara terdesak untuk masuk kedalam aliansi yang berorientasi ideologis. Perang dingin dapat dikatakan tidak damai tetapi juga tidak perang. Dalam sistem ini hubungan yang bersifat permusuhan, penggunaan kekerasan tetap bertahan walaupun tidak mengesampingkan kemungkinan dilakukannya perundingan.

Variabel systemic bertalian erat dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan maupun tindakan negara lain dimana kebijaksanaan dan tindakan tersebut dapat merangsang politik luar negeri negara lain. Para teoritis hubungan internasional yang beraliran tradisional dan beraliran scientific beranggapan bahwa politik luar negeri merupakan sekumpulan respon terhadap kesempatan dan tantangan eksternal. Politik luar negeri tidak dapat dipisahkan dari tujuan negara. Adapun tujuan tersebut adalah untuk mempertahankan apa yang sudah dimiliki atau untuk mencapai atau memaksimalkan kesempatan-kesempatan dalam batas-batas prudensi guna memperoleh yang baru dan yang berkaitan dengan apa yang sudah dicapai. Respons yang diberikan maupun kesempatan yang terbuka tidak akan lepas dari tujuan negara.

2.5 Kerangka Konseptual

Dari penelusuran yang dilakukan maka kerangka konseptual dalam penelitian yang mengambil tema Kepentingan Politik di Timur-Tengah: *Studi Kasus Kepentingan Politik Perancis di Suriah* adalah bahwa kepentingan tersebut terbentuk berdasarkan kepentingan nasional Perancis yang berorientasi kepada keberlangsungan dan kesejahteraan bangsa Perancis dengan format kebijakan luar negeri yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal seperti, lingkungan, kependudukan, politik, ekonomi, sosial, dan kepemimpinan nasional. Juga faktor-faktor eksternal seperti, faktor-faktor internasional. Kemudian kebijakan tersebut

dijalankan dengan politik luar negeri yang fleksibel sesuai perimbangan kekuatan di kawasan Timur Tengah, dimana kekuatan-kekuatan negara-negara besar lain tidak absen dalam percaturan politik di Timur Tengah demi menjaga atau memperoleh kepentingan politik masing-masing.



BAB III

Metodologi Penelitian

3.1 Pengantar

Dalam setiap penelitian ilmiah memerlukan metodologi, hal ini untuk mengarahkan peneliti atau penulis kepada tujuan dan target penelitian itu sendiri. Sebuah kelaziman dalam kajian dan studi masalah-malsalah sosial dan politik, maka pendekatan yang dipakai adalah pendekatan kualitatif. Penelitian dimaksudkan untuk mengkaji secara mendalam terhadap setiap masalah yang dilakukan dengan mengetahui dan memverifikasi berbagai teori atau konsep terdahulu agar dapat berguna bagi ilmu pengetahuan dan teknologi.

Setiap penelitian perlu menentukan skala prioritas dalam hal responden atau variabel yang ditentukan secara selektif, bukan didasarkan pada banyaknya jumlah yang akan diteliti. Maka dalam penelitian sosial diperlukan salah satu pendekatan dengan mendapatkan data primer, sekunder atau tertier. Mengingat penelitian ini memfokuskan pada kepentingan politik suatu Negara di Negara lain, maka berbagai data dan referensi yang berkaitan dengan objek penelitian harus ditelaah secara mendasar dan detail.

3.2 Ruang Lingkup Penelitian

3.2.1 Batasan Objek Masalah

Hal ini merupakan tahapan yang sangat menentukan dalam penelitian kualitatif, dimana dasar didalam pembatasan objek masalah adalah sebagai berikut:¹⁵

- Suatu penelitian tidak dimulai dari sesuatu yang vakum atau kosong. Implikasinya peneliti sebaiknya membatasi masalah studinya dengan focus.
- Fakus masalah pada dasarnya adalah masalah yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperoleh melalui

¹⁵ Lexi. J. Moloeng, 1994, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, Hal.62

kepastakaan ilmiah, dengan fokus peneliti dapat mengetahui data yang diperlukan atau tidak.

- Tujuan penelitian pada dasarnya adalah memecahkan masalah yang telah dirumuskan .
- Fokus terhadap masalah yang telah ditetapkan bersifat tentatif, karena dapat diubah sesuai dengan situasi latar penelitian.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka variabel yang menjadi acuan dalam analisa adalah kepentingan politik Perancis di Suriah, kebijakan dan politik luar negeri Nicolas Sarkozy sebagai Presiden Perancis pada periode 2007-2012, dan potensi nasional Suriah.

Kepentingan Perancis di Timur Tengah pada dasarnya ada dua hal, minyak dan pasar. Pada penulisan tesis ini , peneliti membatasi objek penelitian pada kepentingan politik Perancis di Suriah pada masa pemerintahan Nicolas Sarkozy (2007-2012) berdasarkan kepentingan nasional Perancis, Kebijakan luar negeri Nicolas Sarkozy di Suriah, serta geopolitik Timur Tengah khususnya Suriah.

3.2.2 Karakteristik Data

Menurut Lofland, sumber data utama atau primer dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.¹⁶ Adapun menurut Robert K. Yin, ada enam sumber bukti atau sumber data yang dapat diperoleh untuk penelitian studi kasus, yaitu: dokumen, rekaman, arsip, wawancara, observasi langsung, dan perangkat fisik.¹⁷

Karakteristik data yang ada dalam penelitian ini adalah data kasus, dimana peneliti berusaha mengungkap kasus kepentingan Perancis di Timur Tengah dibalik kerjasamanya dengan Suriah. Adapun data kasus yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu berupa dokumen dari berbagai sumber. Data tersebut merupakan dokumen eksternal yang berupa bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh majalah, bulletin, jurnal dan berita yang disiarkan oleh media massa. Dokumen eksternal ini dapat dimanfaatkan untuk menelaah konteks sosial, dan kepemimpinan.

¹⁶ Lofland, Jhon & Lyn H. Lofland, *Analyzing Social Setting*, dikutip dari Lexi. J. Moloeng, 1994, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rusdakarya, Hal. 157

¹⁷ Yin, Robert K., *Studi kasus & desain metode*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hal.103

3.3 Paradigma Penelitian.

Paradigma penelitian bukan metode penelitian ia adalah salah satu rangkaian metodologi, paradigma merupakan pola pikir yang dapat mempengaruhi metode penelitian. Sebuah metode penelitian bisa berubah format, isi (temuan) dan cara melaporkan hasil penelitannya jika menggunakan paradigma yang berbeda. Istilah paradigma dalam penelitian ini didefinisikan sebagai perangkat kepercayaan atau keyakinan dasar yang menuntun seseorang baik dalam tindakan keseharian maupun dalam penelitian ilmiah.¹⁸

Dalam dunia penelitian paradigma secara garis besar dapat dibedakan ke dalam tiga jenis, yaitu Paradigma Klasik, Paradigma Konstruktifisme, dan Paradigma Kritik. Perbedaan mendasar dari ketiga jenis paradigma tersebut terdapat pada cara pandang (*world view*) dan cara pembahasan sebuah pengamatan atas gejala atau objek penelitian. Dalam kaitannya dengan penulisan tesis yang mengambil tema “Kepentingan Politik Perancis di Suriah pada masa pemerintahan Nicolas Sarkozy”, penelitian ini menggunakan Paradigma Klasik atau Positivisme yaitu sebuah paradigma yang memandang realitas (objek penelitian) dalam kenyataan yang berjalan sesuai dengan teori dan kerangka pemikiran menurut interpretasi peneliti.

Obyek penelitian ini adalah kepentingan politik Perancis di Suriah pada masa pemerintahan Nicolas Sarkozy. Asumsi dasar penelitian ini adalah bahwa kepentingan nasional Perancis menuntut untuk menjalin kerjasama dengan Suriah, menjalin hubungan dengan negara Suriah Perancis diharapkan mendapat posisi yang kuat, mengingat Suriah merupakan salah satu tulang punggung kekuatan Timur Tengah, bahkan Suriah selalu menempati posisi yang strategis dalam menentukan arah politik kawasan, untuk itu Suriah memiliki *bergaining position* yang jelas. Bahkan pada setiap proses politik di Timur Tengah bisa saja Suriah menjadi penentu hasil, terutama apabila proses tersebut tidak sesuai dengan kepentingan Suriah, Suriah dapat menjadi *trouble maker*.

¹⁸ Weiner. Myron, *Political Partisipation: Crisis of the Political process*, New York: Princeton University Press, 1971, hal. 54

3.4 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah studi kasus (*Case Study*). Metode studi kasus adalah suatu pendekatan mempelajari, menerangkan, dan menginterpretasi suatu kasus dalam konteksnya secara natural tanpa ada intervensi dari pihak luar.¹⁹ metode penelitian studi kasus mempunyai manfaat menjelaskan hubungan sebab akibat dalam hubungan nyata, menjelaskan sebuah konteks kehidupan, evaluasi dan eksplorasi.

Inti studi kasus adalah berusaha menyoroiti suatu keputusan atau seperangkat keputusan, mengapa keputusan itu diambil, bagaimana diterapkan, dan apakah hasilnya. Metode studi kasus pada dasarnya terfokus pada dua alasan:

1. Studi kasus merupakan suatu metode penelitian kualitatif yang muncul pada masa keemasan penelitian kualitatif yang sifatnya spesifik, khusus, dan berskala local.
2. studi kasus banyak digunakan dalam penelitian pendidikan yang mendapat perhatian dari para praktisi dan peneliti pendidikan. Pembahasan metode studi kasus diarahkan pada konsep dasar, metodologi, dan kelebihan atau kekurangan proses studi. Selain itu studi kasus dapat digunakan apabila memenuhi unsure sebagai berikut:
 - a. Bila peneliti memiliki informasi yang tidak sedikit tentang hal yang akan diteliti.
 - b. Bila fokus penelitiannya fenomena yang sedang berlangsung
 - c. Bila ada banyak sumber data.²⁰

Kepentingan Politik Perancis di Timur Tengah Khususnya Suriah yang dilatar belakangi oleh Kepentingan Nasional Perancis, serta Nicolas Sarkozy sebagai orang yang berperan dalam menjalankan politik luar negeri Perancis, hal itu sebagai objek dalam penelitian ini telah memenuhi ketiga unsure diatas. Informasi mengenai kepentingan nasional Perancis, Politik Luar negeri Nicolas Sarkozy di Timur Tengah banyak tersedia, baik dalam jurnal maupun informasi yang tersebar di media massa.

¹⁹ Yin. Robert K., *Studi kasus & desain metode*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 92-93

²⁰ *Ibid*, hal.15

3.5 Unit Analisis Penelitian

Penetapan unit analisis penelitian sangat penting guna menegaskan apa yang akan dikaji dan memberi fokus pada apa yang akan dikaji, serta untuk menghindari bias dalam menarik kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif, unit analisa terkait dengan objek masalah penelitian. Tetapi tidak semua objek masalah dijadikan unit analisis, hanya suatu hal yang spesifik dan penting yang ada pada obyek itulah yang di jadikan sebagai unit analisis

Table 3.5.1
Unit Analisis Penelitian

Obyek Kasus	Kepentingan Politik Perancis Di Suriah
Unit Analisis	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang Lingkup Politik Perancis Di Timur Tengah2. Ruang Lingkup Politik Hubungan Perancis-Suriah
Sub Unit Analisis	<ol style="list-style-type: none">1. Kepentingan Nasional Perancis Pada Masa Nicolas Sarkozy2. Proses Kebijakan Luar Negeri Perancis Di Suriah3. Faktor-Faktor Yang Mendorong Politik Luar Negeri Perancis Di Suriah4. Potensi nasional dan lingkungan politik Suriah

3.6 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penilitan ini akan dilakukan dengan cara telaah data sekunder berupa: dokumen tentang kepentingan nasional Perancis, kebijakan luar negeri Perancis terkait masalah-masalah kawasan Timur Tengah khususnya Negara Suriah. Kegiatan pengumpulun data ini dilakukan dengan cara studi pustaka, menela'ah buku-buku referensi, jurnal, majalah, surat kabar, *home*

page terkait dengan obyek penelitian, dan sumber-sumber informasi tertulis lain yang relevan.

Terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pengumpulan data studi kasus, hal itu mencakup penggunaan:

1. Berbagai sumber bukti, yaitu bukti dari dua atau lebih sumber, tetapi menyatu dengan serangkaian fakta atau temuan bersama.
2. Data dasar yaitu kumpulan formal bukti yang berlainan dari laporan akhir studi kasus yang bersangkutan.
3. serangkaian bukti, yaitu keterkaitan yang eksplisit antara pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, data yang terkumpul dan konklusi-konklusi yang ditarik.

Pengacuan terhadap prinsip-prinsip ini akan meningkatkan kualitas substansial studi kasus yang bersangkutan.

Robert K. Yin berpendapat terdapat beberapa jenis dokumen yang dapat dijadikan pertimbangan dalam penelitian, yaitu:

1. surat, memorandum dan pengumuman resmi.
2. agenda, kesimpulan-kesimpulan pertemuan, dan laporan-laporan peristiwa tertulis lainnya.
3. dokumen-dokumen administrative-proposal, laporan kemajuan, dan dokumen-dokumen intern lainnya.
4. penelitian-penelitian atau evaluasi-evaluasi resmi.
5. kliping-kliping baru atau artikel-artikel yang muncul dimedia massa.

Dengan demikian pengumpulan dan pengolahan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini secara bertahap dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. pengumpulan data, membeli dan memfotocopy buku-buku dan media, mengkliping berita-berita serta memprint-out data-data yang didapat dari situs internet.
2. penyeleksian dan pengorganisasian data, dari hasil pengumpulan data penulis menyeleksi dan mengelompokkan data berdasarkan pokok masalah tiap bab, lalu mengolah secara sistematis, kemudian merumuskan

dengan menggunakan pola pemantapan isi setiap data dan informasi yang diolah.

- Analisa dan penyajian data, setelah dilakukan pengumpulan, penyelesaian dan pengorganisasian data dilakukan analisa dan penyajian dalam penulisan yang sistematis.

Nilai dokumen secara keseluruhan sangat penting. Penelusuran yang sistematis terhadap dokumen yang relevan penting sekali dilakukan dalam pengumpulan data. Untuk mempertahankan objektifitas bahasan dari data yang didapat didalam penulisan ini, penulis sangat berhati-hati dalam pengambilan dokumen, terutama dengan tidak terlepasnya pengaruh intervensi orang, organisasi atau aktor lainnya yang dengan sengaja merubah dokumen demi kepentingannya sehingga validitas dokumen tidak dapat lagi dipertahankan.

3.7 Metode Analisa Data

Metode analisa data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah data dokumen yang telah dikumpulkan lalu dianalisis agar data tersebut berguna dalam upaya memecahkan permasalahan yang tercantum dalam rumusan penelitian. Data-data yang terkumpul kemudian dilakukan penyederhanaan data dengan menyeleksi dan mengelompokkan data sesuai kategorisasi, lalu dilakukan analisis sebelum penyajian data dalam penulisan yang sistematis.

Proses analisis data kualitatif berlangsung selama dan pasca pengumpulan data, dengan demikian akan terlihat bahwa komponen-komponen analisis data secara interaktif saling berhubungan selama dan sesudah pengumpulan data. Sehingga gambaran hubungan masalah penelitian dan logika penelitian adalah sebagai berikut:

Hubungan Masalah Penelitian dan Logika Penelitian

Pertanyaan penelitian	Deskripsi masalah	Data yang diperlukan	Sumber data	Pengumpulan data	Analisis data
Mengapa Suriah menjadi fokus politik luar negeri Perancis	1. Penjelasan tentang sejarah hubungan Perancis dan	1. Sejarah hubungan Perancis dengan Suriah	Dokumen Sejarah Tentang Suriah Sejak Tahun	Studi dokumen	Analisis kasus

di Timur Tengah?	Suriyah 2. Penjelasan tentang hubungan Perancis dan Suriyah pada masa pemerintahan Nicolas Sarkozy	2. Hubungan Perancis-Suriyah pada masa pemerintahan Nicolas Sarkozy	1922-2006 Dokumen Tertulis Tentang Hubungan Perancis-Suriyah mulai tahun 2006-2009		
Faktor-faktor apa yang melatarbelakangi Perancis menjalin hubungan dengan Suriyah?	1. Mengetahui kepentingan nasional Perancis 2. mengetahui politik luar negeri Perancis di Suriyah pada masa pemerintahan Nicolas Sarkozy 3. mengetahui daya tarik Suriyah bagi Perancis	1. kepentingan nasional Perancis 2. Politik luar negeri Perancis di Suriyah pada masa Sarkozy 3. Potensi nasional Suriyah	Dokumen Tentang Kondisi Intern Perancis Secara Geografis, Politis, Ekonomis Dokumen Tentang Kebijakan Luar Negeri Nicolas Sarkozy. Dokumen Tentang Ruang Lingkup Politik Suriyah	Studi dokumen	Analisis kasus
Bagaimana prospek hubungan luar negeri Perancis-Suriyah khususnya dan kawasan Timur Tengah umumnya?	1. Mengetahui sikap Perancis dalam masalah instabilitas kawasan misalnya konflik Arab-Israel, Suriyah-Lebanon 2. mengatahui masa depan hubungan Perancis-Suriyah	1. sikap Perancis terhadap konflik Arab Israel, Suriyah-Lebanon 2. masa depan hubungan Perancis-Suriyah	Dokumen tentang analisa para pengamat dan pakar .	Studi dokumen	Analisis kasus

BAB IV

Ruang Lingkup Politik Perancis di Suriah

4.1 Hubungan Perancis-Suriah dari waktu ke waktu

Kekalahan Turki dalam perang dunia I, menyebabkan Turki harus menyerahkan sebagian wilayah kekuasaannya berada dibawah pengawasan Liga Bangsa-Bangsa.

Perancis mendapatkan hak atas *Levant* (istilah untuk wilayah Suriah dan Lebanon) dibawah pengawasan Liga Bangsa-Bangsa berdasarkan keputusan Konferensi San Remo yang Akta mandatnya ditandatangani di London pada 24 Juli 1922. Alasan Perancis mendapatkan hak atas Levant sendiri didasarkan kepada hubungan sejarah yang panjang antara Perancis dengan penguasa Suriah jauh sebelum terjadinya perang salib. Pada saat itu Perancis menerima Kapitulasi Sultan mengenai izin didirikannya kantor dagang dan konsulat Perancis di Suriah. Hubungan baik tersebut dilanjutkan oleh Henri IV, Richelieu dan Louis XIV. Pada 1740, Perancis memperbarui kapitulasi dengan tambahan reverensi khusus atas Levant mengenai tempat-tempat suci di Palestina dan hak istimewa Perancis tersebut dikukuhkan melalui perjanjian pribadi Napoleon dengan Sultan yang berkuasa atas wilayah Suriah pada 1802. Kondisi tersebut selanjutnya mengukuhkan hubungan yang sangat akrab antara Perancis dengan umat Katolik Maronit.²¹

Tetapi bersama dengan tumbuhnya nasionalisme Arab di Suriah pasca partisi Turki Utsmani, Perancis merasa terganggu dan kecewa karena tidak sesuai dengan misi budaya yang diusungnya di Levant, selain itu masyarakat Suriah pada saat itu lebih setuju berada dibawah mandat Inggris atau Amerika dari pada Perancis. Melihat kondisi tersebut, Perancis selanjutnya menyerang Damaskus dan mengusir Amir Faisal sebagai pemimpin tentara padang pasir yang nasionalis yang memiliki kekuasaan atas daerah pedalaman Suriah pada saat itu.²²

²¹ Lenczowski, George, *Timur Tengah di Tengah Kancah Dunia*, Bandung : Sinar Baru , 1993, hal. 198

²² Khoury, Philip S. *Suriah and the French Mandate: The Politics of Arab Nationalism, 1920-1945* (Princeton: Princeton University Press, 1987) hal. 429-431

Setelah berhasil menguasai Suriah secara utuh, Perancis mulai melaksanakan politik *divide et impera* dengan memecah belah wilayah Suriah menjadi empat bagian yaitu Lebanon Raya, negara Damaskus meliputi Jabal Druze, Aleppo termasuk sanjaq Alexandretta dan wilayah Lattakia atau wilayah Alawi. Pengawasan atas Levant sendiri dilakukan oleh Komisaris Tinggi Perancis.

Dari keempat wilayah yang dibentuknya, Perancis relatif berhasil di Lebanon dan Lattakia. Penduduk Lebanon yang mayoritas beragama Kristen lebih menikmati status terpisahnya dan lebih berharap mendapat perlindungan dari Perancis. Pada tahun 1925, Dewan Perwakilan Lebanon bentukan Perancis membuat rancangan undang-undang yang disahkan menjadi undang-undang dasar oleh komisaris tinggi pada Mei 1926 dan mensahkan system negara parlementer mengikuti pola barat. Dalam pasal 30 konstitusinya menyebutkan mengenai hubungan republic yang bergantung pada Perancis. Konstitusi tersebut diamandemen oleh pemerintah Lebanon pada 1927 dan 1929.

Tahun 1931, Lebanon mengalami krisis ekonomi yang mengakibatkan terjadinya peningkatan angka pengangguran. Hal tersebut memaksa komisaris tinggi Perancis menghapus konstitusi dan membentuk pemerintahan sementara untuk membenahi keadaan kas negara. Krisis tersebut juga membuat Perancis mengubah Lebanon menjadi negara korporatif semiotoriter, selanjutnya komisaris tinggi yang baru, Count de Martel memberlakukan konstitusi baru Lebanon pada 2 Januari 1934 yang isinya tidak menyatakan agama resmi negara, menjamin perwakilan profesi, membatasi wewenang parlemen, memperkuat kekuasaan eksekutif dan menjaga keuntungan negara dari pembelanjaan yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya secara bertahap tradisi baru dibentuk yaitu Presiden harus orang Katolik Maronit dan perdana menteri orang Muslim Sunni tujuannya agar ada keseimbangan diantara dua kelompok mayoritas Lebanon.²³ Pemberlakuan *Millet* atau zakat disesuaikan dengan kebijakan agama masing-masing. Kekuatan politik di Lebanon terbagi diantara pemimpin agama dan partai politik dan terdapat kelompok bersama dengan Perancis. Pada perkembangan selanjutnya muncul kelompok yang menentang dan menuntut dihapuskannya pemerintahan mandat.

²³ Lenczowski, George, *Timur Tengah di Tengah Kancah Dunia*, Bandung : Sinar Baru , 1993, hal.199

Pada 9 September 1936 enam tokoh nasionalis dan moderat dari Suriah berangkat ke Perancis untuk membuat perjanjian dengan pihak pemerintah Perancis yang pada saat itu diwakili oleh Menteri Luar Negeri Perancis, Vienot. Isi perjanjian yang berhasil disepakati dan ditandatangani pihak Perancis dan Suriah yang pada saat itu diwakili oleh Hasyim Bey Al Atassi adalah:

- 1) Upaya Suriah untuk merdeka dalam waktu tiga tahun dan meminta Perancis untuk mendukung masuknya Suriah dalam keanggotaan Liga Bangsa-Bangsa.
- 2) Perancis dan Suriah mengadakan aliansi militer.
- 3) Hak Perancis untuk menggunakan dua pangkalan udara Suriah.
- 4) Izin atas angkatan darat Perancis untuk berada di daerah Alawi dan Druze selama lima tahun termasuk pengakuan atas distrik-distrik tersebut kedalam wilayah Suriah.
- 5) Instruktur militer Perancis diakui sebagai penasihat militer Suriah.
- 6) Perancis harus memasok senjata dan perlengkapan militer bagi Suriah.
- 7) Apabila terjadi perang, Suriah dan Perancis harus bekerjasama melindungi dan memasok pangkalan udara Perancis serta menyediakan komunikasi dan transit.

Dalam surat-surat lampiran lainnya, Suriah juga setuju untuk merekrut para penasihat dan ahli teknik dari Perancis, membentuk system hukum khusus bagi perlindungan orang asing dan duta besar Perancis diistimewakan dari para perwakilan diplomatik lainnya. Ketetapan selanjutnya adalah: (1) Meskipun Suriah berhak atas Lattakia dan Jabal Druze, otonomi wilayah tersebut tetap di jamin; (2) Biro khusus didirikan bagi sekolah asing, lembaga amal dan misi arkeologi; (3) Perjanjian dibuat guna merundingkan perkembangan universitas yang ada; (4) Suriah berjanji akan menghormati hak-hak resmi dan kekayaan pribadi milik bangsa Perancis; (5) Persetujuan dibidang moneter; (6) Perjanjian keuangan.²⁴

Perjanjian yang sama juga dibuat dan disahkan Perancis dengan Lebanon, yang ditanda tangani oleh Komisarisi Tinggi Count de Martel dan Emile Adde di Beirut 13 November 1936, isinya sendiri merupakan duplikat perjanjian dengan

²⁴ Lenczowski, George, *Timur Tengah di Tengah Kancah Dunia*, Bandung : Sinar Baru , 1993, hal.201

Suriyah kecuali masalah ketentuan teritorial dan minoritas sehingga tidak ada batasan bagi tentara Perancis dalam hal penempatannya.

Optimisme para kaum nasionalis di Suriyah dan Lebanon kembali suram karena pertama Perancis menolak meratifikasi perjanjian. Perubahan peta politik Perancis dan masalah keamanan nasional yang terancam menjadi faktor pendukung hal tersebut. Saat itu Perancis khawatir mendapat serangan dari Jerman dan Italia sehingga Perancis tidak mau kehilangan pangkalan militernya di Mediterania Timur. Keduanya adalah karena Suriyah tetap memperjuangkan upaya persatuan dan kesatuan bangsanya.

Penolakan Perancis untuk meratifikasi perjanjian yang dibuat tahun 1936 mempengaruhi situasi politik di Suriyah dan Lebanon pada saat itu, tetapi karena kuatnya pengaruh Perancis di kedua wilayah tersebut kalangan politisi dari kedua belah pihak masih menunjukkan loyalitasnya terhadap Perancis sehingga menjelang pecahnya perang dunia II kekuatan pangkalan militer Perancis di Mediterania Timur masih kuat. Dipihak lain pihak para masyarakat Arab saat itu justru sangat membenci Perancis dan sekutunya, hal tersebut dilatar belakangi oleh pengkhianatan Perancis terhadap bangsa Arab menyusul berakhirnya perang dunia I, dukungan terhadap Turki dalam masalah sanjaq Alexandretta, tidak diratifikasinya perjanjian dengan Suriyah dan Lebanon, serta pengakuan terhadap keberadaan zionisme di Palestina.

Pada 8 Juni 1941, pasukan Inggris dibawah pimpinan Jenderal Sir Henry Haitland Wilson menyerang Suriyah melalui Palestina, transyordania dan Irak, tetapi unsur-unsur Perancis bebas menyertai penyerangan tersebut, keadaan tersebut dikarenakan pada saat itu Suriyah termasuk juga Lebanon berada dibawah kekuasaan Vichy dan pejabat Perancis yang anti-Inggris dan menolak Komite Perancis Bebas bentukan Jenderal de Gaulle . Sehari setelah invasi, panglima Perancis, Jenderal Catroux menyatakan bahwa pemerintah Perancis Bebas akan mengakhiri mandatnya atas Suriyah dan Lebanon. Dengan demikian keduanya akan merdeka dan akan merundingkan hubungan timbal balik dengan Perancis. Pada saat yang sama Inggris pun setuju dengan pernyataan Perancis tersebut. Selanjutnya Jenderal de Gaulle menunjuk jenderal Catroux sebagai "Delegasi Jenderal dan Berkuasa Penuh Perancis Bebas di Levant", menggantikan jabatan

komisaris tinggi pada 24 Juni 1941. Dalam upaya tersebut Perancis menyertakan Inggris didalamnya, namun konsep mengenai kemerdekaan Suriah dan Lebanon antara Inggris dan Perancis ternyata berbeda sehingga Jenderal de Gaulle melakukan penangguhan. Situasi tersebut dimanfaatkan oleh pihak Perancis untuk kembali memperkuat posisi istimewanya atas Suriah dan Lebanon. Perbedaan antara Perancis dan Inggris selanjutnya tidak dapat disembunyikan sehingga menimbulkan kecurigaan keduanya dalam masalah penyelesaian Levant.

Pada 28 September 1941, Jenderal Catroux memproklamasikan kemerdekaan Suriah, yang isi naskahnya adalah:

1. Suriah berhak menjadi negara merdeka dan berdaulat;
2. Suriah berkuasa menunjuk perwakilan diplomatiknya;
3. Suriah berhak menyusun angkatan perangnya.
4. Suriah bersedia membantu Perancis selama perang;
5. Segala syarat terdahulu dengan perjanjian Perancis-Suriah yang baru yang menjamin kemerdekaan Suriah.

Tindakan tersebut juga diikuti dengan proklamasi kemerdekaan bagi Lebanon pada 26 November 1941. Isi naskahnya hampir sama dengan isi naskah proklamasi Suriah. Untuk pelaksanaannya Jenderal Catroux mengangkat Sheikh Taj ad-din sebagai presiden Suriah dan Alfred Naccache sebagai presiden Lebanon.

Menanggapi hal tersebut, Inggris mengakui kemerdekaan kedua negara tersebut secara *de jure*, dan mengangkat Jenderal Spear sebagai duta besar pertama untuk kedua negara tersebut. Negara-negara Arab lainnya justru merasa ragu dengan kejadian tersebut, dilain pihak Amerika tidak langsung mengakui kemerdekaan kedua negara baru tersebut tetapi bersikap menunggu proses berakhirnya mandat secara resmi dan tercapainya kesepakatan resmi bilateral Perancis dengan Suriah dan Lebanon.²⁵

Di lain pihak, Perancis ternyata masih belum siap untuk mengalihkan fungsi pemerintahan secara langsung kepada kedua negara tersebut. Ditundanya penyusunan konstitusi dan penunjukkan presiden oleh pihak Perancis menimbulkan pertentangan baru dalam masyarakat, terutama dari para kelompok nasionalis dan kelompok sayap-kiri; sosialis dan komunis. Akibat kondisi

²⁵ Lenczowski, George, *Timur Tengah di Tengah Kancah Dunia*, Bandung : Sinar Baru , 1993, hal.203-205

tersebut, pemerintah Perancis akhirnya memutuskan memberlakukan kembali konstitusi lama yang pernah dibuat pada Maret 1943 dan mengupayakan diselenggarakannya pemilihan umum sesegera mungkin. Meski demikian kemerdekaan secara sempurna ternyata belum dirasakan oleh kedua negara tersebut karena pengawasan Perancis yang masih ketat terhadap kelangsungan pemerintahan keduanya. Delegasi Jenderal masih memiliki hak untuk mengeluarkan dekrit guna membubarkan parlemen dan menghapuskan konstitusi dengan alasan sesuai mandat Liga Bangsa-Bangsa. Perancis juga masih menguasai tata tertib pemerintahan dalam negeri, politik luar negeri, pertahanan dan sensor atas jurnalistik. Lebih jauh lagi agen intel Perancis *Services Speciaux* masih banyak berkeliaran di kedua negara tersebut.

Banyaknya para kaum nasionalis yang berada di kursi parlemen di kedua negara tersebut memancing untuk bercaksi atas kondisi tersebut. Parlemen Lebanon, pada 8 November 1943 mengajukan sebuah resolusi untuk menghapuskan segala kekuasaan Perancis dari konstitusinya yang mengakibatkan ditahannya presiden republik dan seluruh anggota kabinet dilanjutkan penunjukkan Emile Edde sebagai kepala negara pemerintahan Lebanon oleh delegasi Jenderal Perancis baru, Helleu. Keadaan tersebut memancing gelombang demonstrasi anti Perancis di Lebanon serta tekanan dari Inggris. Inggris melalui Jenderal de Gaulle memanggil Helleu dan mengirim kembali Catroux, tetapi pada akhirnya para pemimpin Lebanon ditangkap dan dipecat dari jabatannya.

Krisis yang sama juga terjadi di Suriah, pada 24 Januari 1944, presiden republik dan para anggota parlemen menyatakan untuk menghapus pasal 116 konstitusinya yang berkaitan dengan wewenang Perancis. Akan tetapi tindakan tersebut tidak sampai menimbulkan gelombang revolusi seperti di Lebanon. Hal tersebut dikarenakan disepakatinya perjanjian oleh Komite Pembebasan Nasional.

Tanggal 22 Desember 1943 terjadi peralihan kekuasaan delegasi Jenderal kepada pemerintahan setempat. Proses peralihannya sendiri berlangsung pada tahun 1944, tetapi *Troupes Speciales* tetap menjadi daerah khusus yang dikontrol oleh Perancis. Setelah itu Perancis menuntut kesepakatan dengan Suriah dan Lebanon mengenai: (1) Keselamatan lembaga kebudayaan Perancis, (2) Pengakuan atas hak-hak ekonominya, dan (3) Pengakuan atas kepentingan

strateginya. Perundingan mengenai hal tersebut rencananya akan dilaksanakan pada 19 Mei 1945, namun empat hari sebelum hal tersebut terwujud pasukan baru Perancis mendarat di Beirut yang memancing kembali demonstrasi di kedua negara, Suriah dan Lebanon. Suriah dan Lebanon mengambil tindakan dengan melakukan pemutusan hubungan dengan Delegasi Jenderal Perancis, Jenderal Beynet.

Keadaan tersebut membuat Inggris turun untuk membela Suriah dan Lebanon. Akhir Mei 1945 Perdana Menteri Churchill mengimbau Jenderal de Gaulle agar menarik pasukannya dari Levant dan Perancis menurut namun perundingan perjanjian tidak pernah diperbarui. Tumbuhnya kepercayaan diri akibat dukungan Inggris membuat Suriah dan Lebanon menyerukan deklarasi bersama guna mengusir semua warga negara Perancis dari Levant dan mengalihkan *Troupes Speciales* kedalam kendali nasional mereka pada 21 Juni 1945, selanjutnya Perancis menyetujui keputusan tersebut secara resmi pada 7 Juli 1945. Mulai saat itu status kemerdekaan kedua negara mendapatkan pengakuan internasional secara eksplisit melalui sejumlah tindakan diplomatik.²⁶

Suriah berada di bawah pendudukan Perancis antara 1920-1946. Sejak kemerdekaan pada 1946, tetap ada ikatan hubungan yang kuat, namun kadangkadangkang tegang karena perbedaan atas kebijakan Suriah di Lebanon. Dimana kebijakan Perancis atas Lebanon sudah final dan mendukung penuh segala usaha pengokohan kemerdekaan Lebanon sebagai negara yang terpisah dari Suriah, sementara Suriah masih terkesan “tidak rela berpisah dengan Lebanon”. Hal ini juga menjadi alasan dibalik ketegangan antara Suriah dan Lebanon, hubungan Perancis ataupun Lebanon dengan Suriah mencapai titik rendah pada tahun 2005 setelah pembunuhan Perdana Menteri Lebanon yang Rafik Hariri, dan Suriah tertuding sebagai tersangka pembunuhan tersebut. Meskipun demikian pada akhirnya kedua negara, Suriah-Lebanon sepakat untuk menjalin hubungan diplomatik. Hubungan bilateral antara Suriah dan Lebanon merupakan hasil dari kontak politik antara Paris dibawah pemerintahan Nicolas Sarkozy dan Presiden Suriah Basyar Asad selama semester kedua tahun 2008.²⁷

²⁶ Lenczowski, George, *Timur Tengah di Tengah Kancah Dunia*, Bandung : Sinar Baru , 1993, hal.206-207

²⁷ http://en.wikipedia.org/wiki/France%E2%80%93Suriah_relations

4.2 Hubungan Perancis-Suriah pada masa pemerintahan Nicolas Sarkozy

Sejak pembunuhan mantan PM Libanon, Presiden Perancis saat itu Jacques Chirac menuduh Suriah berada dibalik pembunuhan tersebut, berdasarkan anggapan itu ia mengisolir Suriah, tindakan ini didukung oleh Barat terutama AS dan sebagian negara Arab sehingga Damaskus terkucilkan di tingkat regional.

Kunjungan terakhir kepala negara Perancis dilakukan oleh Chirac berlangsung pada tahun 2002 dan sejak pembunuhan Hariri, Paris memutuskan pembekuan hubungan di tingkat tinggi dengan bekas negara jajahannya tersebut. Perang musim panas selama 33 hari antara Hizbullah dan Israel (Juli-Agustus 2006) menambah keterkucilan Suriah saat itu, karena ia satu-satunya negara Arab yang secara tegas mendukung Hizbullah dalam perang tersebut sementara sebagian negara Arab terkemuka menilainya sebagai petualangan yang merugikan. Meskipun akhirnya Israel sendiri mengakui keunggulan Hizbullah saat itu, namun Damaskus masih belum terlepas dari keterkucilan sebab masalah Libanon belum terselesaikan hingga akhirnya Presiden Libanon hasil kompromi semua kekuatan politik negeri itu, Michael Sulaiman dikukuhkan bulan Mei 2008.

Isyarat pemulihan hubungan Perancis-Suriah mulai nampak pada KTT negara-negara kawasan Laut Tengah di Paris pada 13 Juli 2008 lalu ketika Presiden Suriah, Basyar Asad mengadakan pembicaraan dengan Sarkozy. Usai pertemuan Asad mengumumkan rencana kunjungan Sarkozy ke Damaskus. Bagi Perancis sendiri, kunjungan tersebut sebagai pertanda kembalinya peran historis di kawasan, lewat pintu Suriah setelah lebih dari tiga dekade belakangan ini absen dan terpinggirkan oleh hegemoni AS di Timur Tengah.²⁸

Bersama dengan pulihnya hubungan Perancis-Suriah, Suriah perlahan-lahan keluar dari isolasi internasional, disini terlihat pemulihan hubungan tersebut berpengaruh positif bagi Suriah. Sebab Suriah sejak lama menutup diri dari berbagai bentuk penjajahan baru (neokolonialisme) negara-negara besar terutama pemenang perang dunia II dan pemenang perang dingin (blok Barat). Damaskus tetap menutup rapat pintunya bagi pengaruh Barat. Suriah selama ini hanya

²⁸ www.hidayatullah.com diakses pada tanggal 23 Mei 2009 pukul 12.37 WIB.

membuka diri bagi dukungan militer dan politis melawan musuh bebuyutannya (Israel).²⁹

Pasca keruntuhan Blok Timur, Uni Soviet, Damaskus sejauh ini tidak memiliki sekutu strategis. Soviet sendiri selama ini tidak melangkah lebih maju dalam persekutuan strategisnya dengan Suriah. Persekutuan hanya sebatas memelihara perimbangan kepentingannya di kawasan dari perluasan pengaruh AS sebagai dampak konflik Arab-Israel. Suriah negara yang terbuka bagi bentuk kerjasama apapun.

Sementara AS menganggap Suriah sebagai “singa yang terluka” yang masih membahayakan kepentingannya. Disinilah Sarkozy melihat peluang untuk mendekati Suriah yang memiliki potensi besar sebagai calon sekutu strategisnya untuk jangka panjang mendatang sebelum didahului negara besar lainnya terutama Rusia yang belakangan ini mulai menonjolkan “otot” melawan Barat.

Suriah di era Basyar Asad juga telah menunjukkan sikap kompromistis dengan Barat terutama yang terkait dengan Libanon dan juga kesediaan untuk melakukan perundingan dengan Israel. Sehingga logis bila Sarkozy tidak membuang peluang tersebut. Perancis juga mengakui kenyataan hasil perang musim panas antara Hizbullah dan Israel pada 2006. Perang ini mengukuhkan Suriah sebagai pemilik kartu “As” yang kuat dalam penyeimbangan kekuatan di kawasan. Artinya Israel tidak akan merasa aman apabila terus mendorong Barat memusuhi Damaskus. Sukses Hizbullah mempermalukan militer Israel merupakan kemenangan moral tak ternilai bagi Suriah karena seolah-olah negara ini memenangi perang melawan negeri Yahudi itu yang merupakan negeri terkuat keempat di dunia secara militer.

Momentum pendekatan Sarkozy ke Damaskus juga tepat. Sebab di satu sisi Tel Aviv secara geografis tidak lagi memimpikan negara Israel Raya yang terbentang dari Sungai Nil di Mesir ke Sungai Eufrat di Iraq. Di sisi lain Damaskus juga bosan menunggu bantuan Arab mengembalikan wilayah Golan yang masih diduduki Israel sejak perang 1967.

Normalisasi hubungan tersebut ditandai dengan penandatanganan sejumlah persetujuan kerjasama meliputi bidang transportasi udara, migas dan energi listrik,

²⁹ ibid

hal ini dilakukan di sela-sela kunjungan Sarkozy pada konferensi puncak Uni Mediterania 13 Juli 2008 yang lalu. Kemudian pada hari Minggu 8 Pebruari 2009 yang lalu para menteri kedua negara merealisasikan kesepakatan kerjasama tersebut dengan penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)* di bidang minyak, gas alam, listrik, railroads, air dan transportasi. Mou tersebut ditandatangani oleh Menteri Ekonomi dan Perdagangan Suriah Amer Lutfi, Menteri Perindustrian Fouad Issal al-Joni, keduanya dari pihak Suriah sedangkan dari pihak Perancis adalah Menteri Negara yang Bertanggung Jawab atas Industri dan Konsumsi Prancis Luc Chatel.³⁰

Selain itu Berdasarkan kesepakatan itu, kedua negara tersebut akan bekerja sama dalam bidang peningkatan standar dan kemampuan bersaing produk industri serta ekonomi mereka, serta pencegahan monopoli dan perlindungan konsumen. Mereka juga akan bekerja sama guna mendirikan taman teknologi di Suriah dan pertukaran informasi industri untuk memajukan kerja sama industri mereka, demikian antara lain isi persetujuan tersebut.³¹

Pada lain kesempatan dalam rangkaian upacara penandatanganan kerjasama tersebut Wakil Perdana Menteri Suriah Urusan Ekonomi Abdullah ad-Dardari memuji kemajuan besar itu, yang dicapai kedua negara tersebut dalam hubungan ekonomi bilateral mereka. Suriah setuju dengan French Mann Company guna mempersiapkan kajian teknis dan ekonomi untuk mendirikan pembangkit listrik yang dikelola dengan menggunakan sinar surya.³²

Adapun terkait dengan perdamaian Timur Tengah (konflik Arab-Israel), Perancis menekankan bahwa penyelesaian konflik Arab Israel membutuhkan diplomasi multilateral dengan melibatkan Eropa secara aktif, demikian disampaikan oleh Sarkozy pada pertemuan KTT empat negara Perancis, Suriah, Qatar dan Turki.³³ Kemudian terkait nuklir Iran Perancis berharap kepada Suriah sebagai teman dekat Iran bisa berperan dalam membujuk sekutunya, Iran, agar bekerjasama dalam mengakhiri permusuhannya dengan Barat soal program

³⁰<http://www.zawya.com/Story.cfm/sidKUN0069090208171543/Suriah,%20France%20sign%20economic%20cooperation%20agreements/> diakses pada 6 Maret 2009 pukul 18.46 WIB.

³¹ ibid

³² ibid

³³ www.hidayatullah.com diakses pada tanggal 23 Mei 2009 pukul 12.37 WIB.

nuklirnya. Sarkozy juga ingin menarik Suriah dari lingkaran pengaruh regional Iran.

4.3 Kepentingan Nasional Perancis: Faktor Internal dan Eksternal

Perancis salah satu negara yang memegang peranan penting di dunia internasional, terutama di percaturan politik Eropa. Republik ini merupakan negara pendiri Uni Eropa yang sekaligus merupakan negara anggota Uni Eropa yang memiliki luas daratan terbesar. Selain itu, Perancis juga merupakan negara pendiri NATO dan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memiliki keanggotaan tetap di Dewan Keamanan. Perancis juga dikenal sebagai salah satu dari tujuh negara dunia yang memiliki kekuatan nuklir.

Republik Perancis merupakan negara yang teritori metropolitannya terletak di bagian Eropa Barat dan juga memiliki sejumlah pulau-pulau kecil di benua lain. Perancis adalah negara demokrasi yang diatur berdasarkan sistem republik kesatuan semi-presidensial.

Sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia, Perancis tercatat sebagai kekuatan ekonomi terbesar ke-5, Perancis menempati peringkat ekonomi terbesar kelima atau keenam menurut PDB nominal.³⁴ Kemajuan ini tidak diperoleh dengan cara mudah mengingat negara ini pernah mengalami periode ekonomi terburuk setelah dua perang dunia. Selain dua perang dunia, negara ini harus menghadapi berbagai pertempuran yang berakhir dengan pemberian kemerdekaan negara-negara koloninya, seperti Al Jazair dan Suriah serta Lebanon.

4.3.1 Faktor Internal

Faktor ini dibentuk oleh apa yang disebut sebagai variabel nasional, yaitu berbagai atribut nasional yang mempengaruhi hasil politik luar negeri perancis. Variabel nasional mencakup hal-hal berikut ini, variabel lingkungan, variabel kependudukan, variabel politik, variabel ekonomi, variabel sosial, dan variabel karakter nasional.

³⁴ <http://id.wikipedia.org/wiki/Perancis#Ekonomi>, diakses pada tanggal 18 Juli 2009, pukul 09.00.

Perancis sebuah negara yang berbentuk Republik berpenduduk 63,8 juta per tanggal 1 Januari 2008. Perancis merupakan negara Uni Eropa dengan jumlah penduduk terbesar kedua setelah Jerman (82,3 juta penduduk), dan disusul oleh Inggris dan Italia. Kepadatan penduduk : 98,1 jiwa/km², Paris dengan populasi 10 juta jiwa merupakan kota berpenduduk paling banyak di Uni Eropa, diikuti London, kemudian Lyon dan Marseille-Aix-en-Provence (masing-masing dengan populasi 1,350 juta jiwa), dan Lille (1,1 juta jiwa). Perancis memiliki 57 kota yang populasinya melebihi 100 000 jiwa. Adapun kehidupan beragama di Perancis tidak pernah ada pendataan secara resmi oleh pemerintah tentang berapa persen masyarakat memeluk agama tertentu, akan tetapi menurut data yang disajikan oleh CIA World Factbook menyebutkan, pemeluk Katolik Roma sebesar (83-88 %), Protestan (2 %), Yahudi (1 %), Islam (5-10 %).³⁵

Secara Geografis luas wilayah Perancis 551.602 kilometer persegi. Terletak di bagian barat Eropa, dengan keadaan medannya tinggi di tenggara dan rendah di barat laut. Dataran mencapai 2/3 luas total wilayah. Bagian barat beriklim sedang lautan, bagian selatan beriklim Laut Tengah subtropis, bagian tengah dan timur beriklim kontinental. Curah hujan tahunan rata-rata bertambah dari 600 milimeter di barat laut menjadi 1.000 milimeter di bagian tenggara.

Secara politik, Presiden adalah kepala negara dan panglima angkatan bersenjata dengan masa bakti lima tahun dipilih langsung oleh para pemilih. Presiden berhak mengangkat dan mencabut perdana menteri. Presiden mempunyai kekuasaan penuh " untuk mengambil segala tindakan berdasarkan kebutuhan situasi ". Pada saat presiden tidak bisa melakukan misinya atau jabatan presiden lowong, ketua Senat akan menjalankan misi sebagai penjabat presiden. Parlemen terdiri dari Majelis Nasional dan Senat. Parlemen dibentuk oleh Majelis Nasional dan Senat dengan memiliki hak-hak untuk menyusun undang-undang, mengawasi pemerintah, meloloskan anggaran belanja, dan meratifikasi pengumuman perang. Majelis Nasional terdiri dari 577 kursi dan anggotanya bermasa bakti selama lima tahun. Sedangkan masa bakti untuk senator adalah 6 tahun (9 tahun sebelum

³⁵ http://www.discoverfrance.net?France/DF_peple.shtml (dikutip dari, Jurnal Kajian Wilayah Eropa, vol.1 no.1-2006, diterbitkan oleh kerjasama antara Program studi kajian wilayah eropa-Program Pascasarjana Universitas Indonesia dengan delegasi komisi Eropa.

2004). Jumlah kursi di Senat akan bertambah dari 321 menjadi 340 pada tahun 2010. Senat dipilih secara tak langsung oleh Juri Pemilihan yang terdiri dari anggota Majelis Nasional dan anggota parlemen daerah.³⁶

Pada tanggal 31 Juli tahun 1995, Parlemen Perancis mensahkan sebuah rancangan undang-undang untuk memberikan hak lebih besar kepada presiden dalam mengadakan referendum, guna menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial. Atas permintaan pemerintah atau Senat serta Majelis Nasional, presiden boleh menyerahkan semua masalah yang menyangkut organisasi kekuasaan publik, ekonomi nasional atau konsep reformasi tentang kebijakan sosial kepada rakyat untuk diselesaikan melalui referendum.³⁷

Untuk memperjelas pembahasan tentang faktor internal yang mempengaruhi politik luar negeri Perancis, maka bahasan tentang karakteristik negara Perancis merupakan hal wajib, karakteristik negara Perancis tertuang dalam konstitusi Republik V tahun 1958, bahwa Perancis adalah sebuah republik yang tidak dapat terbagi, sekuler, demokratis, dan sosial.

Pengertian republik adalah pengertian umum yang berarti Perancis bukan Negara yang dipimpin oleh Raja. Pemimpin negara dipilih berdasarkan mekanisme pemilihan langsung dan tidak langsung. Hal ini berkaitan erat dengan prinsip-prinsip demokrasi yang didalamnya dikenal sistem perwakilan rakyat dalam pemerintahan (lembaga legislatif). Perancis juga tidak dapat terbagi. Artinya, Perancis adalah negara kesatuan yang sentralistik . negara mengatur setiap aspek kehidupan masyarakat demi terciptanya kesatuan nasional. Perancis sebagai negara sekuler artinya, Perancis mengenal pemisahan antara negara dan agama. Dengan kata lain, pemerintah menyerahkan sepenuhnya masalah agama kepada tiap-tiap individu warga negara. Sedangkan sebagai negara sosial berarti institusi negara memegang tanggung jawab atas kesejahteraan rakyat. Masalah ini diwujudkan dalam mekanisme pemberian jaminan sosial kepada warga negara

³⁶ Jurnal Kajian Wilayah Eropa, vol.1 no.1-2006,hal. 85, diterbitkan oleh kerjasama antara Program studi kajian wilayah eropa- Program Pascasarjana Universitas Indonesia dengan delegasi komisi Eropa.

³⁷ Ibid.

yang membutuhkan dan berhak atas jaminan tersebut, seperti kalangan pensiunan dan pengangguran.³⁸

Sebagai negara yang sentralistis Perancis menempatkan Paris sebagai pusat komando. Kesentralistikan Perancis merupakan hasil kekuatan monarki dengan militernya yang kuat. Wewenang pemerintah pusat semakin kuat dengan ketetapan konstitusi V 1958 yang memberi bobot kepada pemerintah pusat terutama kepada lembaga eksekutif untuk menentukan kebijakan negara.³⁹

Secara politis demokratis, institusi negara adalah *the quarantor of the republic* dan penjamin dari kehendak umum rakyat Perancis. Untuk menjalankan peranannya inilah pemerintah pusat Perancis memiliki peran yang aktif yang disebut dengan ungkapan *dirigisme* yang berarti *to direct*. Dalam pelaksanaannya, pemerintah pusat menjalankan peran aktif dalam urusan dalam negeri dan meminimalkan peran-peran dari organisasi non-pemerintah ataupun kelompok kepentingan. Maka rakyat memiliki kepercayaan yang tinggi kepada institusi Negara; dan hal ini secara otomatis merupakan dukungan bagi peran aktif Negara (pemeintah pusat sebagai penentu kebijakan).⁴⁰

Meskipun Perancis berkarakter sentralistik, desentralisasi juga terjadi dalam arti memberikan otonomi kepada pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan, hal ini terjadi sebagaimana tuntutan demokrasi. Pemerintah daerah memiliki otoritas dibawah pemerintah pusat, artinya pemerintah pusat tetap menjadi pemegang kendali dari pelaksanaan otonomi. Otonomi bagi daerah di Negara Perancis berbeda dengan sistem federasi yang diterapkan di AS, wilayah-wilayah di Perancis tidak memiliki konstitusi dan lembaga peradilan sendiri. Dan keputusan parlemen lokal tidak menggantikan atau berkedudukan lebih tinggi dari pada legislasi nasional. Otoritas otonomi yang dijalankan oleh masing-masing wilayah adalah implementasi dari kebijakan, terutama yang berkaitan dengan pelayanan sosial, pendidikan, transportasi, dan kesehatan. Sebagian besar dana untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan ini tetap berasal dari pemerintah pusat.⁴¹

³⁸ Jurnal Kajian Wilayah Eropa, vol.1 no.1-2006,hal. 85, diterbitkan oleh kerjasama antara Program studi kajian wilayah eropa- Program Pascasarjana Universitas Indonesia dengan delegasi komisi Eropa

³⁹ Ibid, hal. 86

⁴⁰ ibid

⁴¹ Ibid, hal.87

Karakteristik kedua adalah fakta bahwa Perancis adalah Negara sosialis. Karena institusi Negara Perancis memberikan sistem jaminan sosial layaknya *welfare state*. Salah satu tujuan revolusi Perancis yang tertuang dalam motto Negara (*fraternity*) dan tertuang secara formal dalam *the declaration of the rights of man and the citizen* adalah menciptakan institusi yang akan menjamin kepentingan dan kesejahteraan warga Negara.

Karakteristik ketiga adalah Perancis adalah negara yang menganut sekulerisme. Pemisahan antara agama dan negara telah tumbuh bibitnya sejak revolusi Perancis 1789, walaupun pemisahan antara keduanya secara formal baru dilakukan dengan dikeluarkannya legislasi pada tahun 1905. pemisahan ini berawal atas kekuasaan berlebih dalam bidang ekonomi dan politik yang dimiliki kalangan gereja Katolik di masa monarki absolut. Pada masa Republik III anti-kepasturan (*anti-clericalism*) menjadi salah satu unsure utama budaya politik masyarakat saat itu yang dengan terang-terangan menyatakan *clericalism* adalah musuh mereka. Pada tahun 1879 dikeluarkan suatu legislasi yang menekan pentingnya peran negara dalam pendidikan (pendidikan tidak dikelola oleh gereja) dan pada tahun 1884 diperkenalkan kembali perceraian kepada masyarakat yang sebagian besar adalah pemeluk Katolik Roma.

Legislasi 1905 secara otomatis memutuskan perjanjian Concordat (hubungan baik) yang telah dijalin Napoleon dan Paus sejak tahun 1801 dan melarang pemerintah memberi subsidi keuangan kepada agama manapun. Sejak tahun 1970-an, Perancis telah menjadi negara yang sekuler. Kebebasan agama merupakan hak konstitusional seperti tercantum dalam *The Declaration of The Rights of Man And The Citize*. Konsep yang mengatur hubungan antara ruang lingkup publik dan agama adalah *laicite*. *Laicité* adalah sekularisme ala Perancis untuk menciptakan kerukunan beragama. *Laicité* lahir dari suatu konflik berkepanjangan antara kalangan gerejawi yang ingin mempertahankan kuasa dan pengaruhnya dan kalangan nasionalis yang menolak keberadaan agama dalam ranah politik. *Laicité* secara filosofis berarti negara sama sekali tidak mengakui apa pun bentuk agama dan kepercayaan. Tetapi, negara menjaga kebebasan beragama dan berpikir, karenanya negara menjaga para pemeluknya, kitab suci, dan simbol. Negara melindungi setiap pemeluk agama bukan karena nilai

metafisik agama tersebut, tapi karena negara harus melindungi kebebasan beragama masing-masing orang agar hak-hak mereka tidak terabaikan.⁴²

Lalçité di masa kini bertransformasi menjadi Undang-undang yang bersifat praktis: bidang administratif, pendidikan dan ketenagakerjaan.⁴³ *Lalçité* di masa kini berbentuk konsep yang siap diterapkan dalam pelbagai bidang serta dimensi sosial kemasyarakatan. Pada tahun 2000 sempat UU tersebut dirumuskan ulang untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada, utamanya dengan kehadiran Islam yang dibawa oleh kaum pendatang. Apakah kaum pendatang yang telah menjadi warga negara Perancis mesti berasimilasi atau berintegrasi dengan budaya Perancis dengan meninggalkan budaya dan tradisi yang melekat padanya?

Berbicara budaya Perancis, ada dua unsur budaya utama Perancis yaitu bahasa dan pencaharian. Bahasa Perancis adalah budaya utama oleh karena rakyat Perancis sangat bangga dengan bahasa yang mereka pakai dan selalu berusaha untuk melindunginya dari pengaruh bahasa asing, terutama dari bahasa Inggris yang mereka anggap sebagai bahasa kaum Barbar. Bahasa Perancis memang berakar dari bahasa Latin kuno- karena bahasa ini dibawa dan diperkenalkan kepada penduduk Keltik pada masa pendudukan Kekaisaran Roma. Bangsa Perancis beranggapan bahasa mereka memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan bahasa lain Eropa, khususnya bahasa Inggris. Mereka beranggapan bahwa bahasa Perancis adalah satu-satunya pewaris bahasa Latin, sedangkan bahasa Inggris adalah warisan dari kaum Barbar Anglo-Saxon. Bahkan yang berkembang belakangan ini di Parlemen Uni Eropa adalah perdebatan seru mengenai bahasa apa yang akan dijadikan sebagai bahasa Uni Eropa: Perancis atau Inggris.⁴⁴

Unsur budaya selanjutnya adalah pencaharian. Walaupun Perancis dewasa ini kita kenal sebagai negara industri maju dan hanya sebagian kecil warga

⁴²http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/03/19/01072579/mencari_model_kerukunan_antarumat_beragama, diakses pada tanggal 24 Juni 2009, pukul 12.03 WIB

⁴³ Undang-undang Administrasi menyatakan: prinsip *lalçité* menyanar prinsip netralitas dalam pelayanan publik dan tidak mengindahkan kepercayaan yang dianut seseorang maupun penampilan fisiknya.

UU Tenaga Kerja, Pasal L120-2 menyatakan: ada porsi pendapatan yang berbeda antara mereka yang mengenakan simbol agama tertentu dan mereka yang tidak mengenakannya.

⁴⁴ Jurnal Kajian Wilayah Eropa, vol.1 no.1-2006,hal. 89, diterbitkan oleh kerjasama antara Program studi kajian wilayah eropa- Program Pascasarjana Universitas Indonesia dengan delegasi komisi Eropa.

negaranya berprofesi sebagai petani, pemerintah dan sebagian besar rakyat Perancis masih menganggap penting untuk melindungi budaya petani mereka. Bahkan disepanjang sejarah Perancis kalangan petani memiliki pengaruh cukup signifikan dalam penentuan kebijakan pemerintah. Itu semua karena kalangan petani merupakan petani berskala kecil dan sebagian lainnya adalah petani dengan teknologi maju. Setengah dari tanah Perancis didedikasikan untuk sektor pertanian, dimana hal tersebut telah membentuk 25% dari tanah yang digunakan untuk pertanian oleh 12 negara anggota Uni Eropa di tahun 1992. Perancis dalam Uni Eropa selalu berupaya agar Uni Eropa tetap mempertahankan subsidi yang diberikan kepada sektor pertanian dalam mekanisme *Common Agricultural Policy*.⁴⁵

Secara ekonomi, Perancis adalah negara yang ekonominya maju, produk domestik bruto (PDB) berada di urutan terdepan di dunia. Sektor industri utamanya adalah pertambangan, metalurgi, besi dan baja, manufaktur otomotif, pembuatan kapal, permesinan, tekstil, kimia, alat elektronik, motor, barang-barang konsumsi sehari-hari, pengolahan bahan makanan dan industri bangunan. Industri tenaga nuklir, petrokimia, eksplorasi maritim, penerbangan udara dan antariksa mengalami pertumbuhan pesat pada tahun-tahun terakhir ini, dan proporsinya dalam nilai produksi industri terus meningkat. Kemampuan pembuatan perlengkapan pembangkit listrik tenaga nuklir, minyak bumi dan teknologi pengolahan minyak menempati urutan kedua di dunia menyusul Amerika Serikat (AS), industri penerbangan dan antariksa menempati peringkat ketiga setelah AS dan Persemakmuran Negara-negara Merdeka. Industri besi dan baja serta tekstil menempati peringkat ke-enam di dunia. Akan tetapi sektor industri tradisional tetap berperan dalam industri Perancis, dengan industri besi dan baja, otomotif dan bangunan sebagai tiga sokoguru dalam perekonomian. Selain itu Perancis sangat maju di bidang bisnis, di antaranya penjualan bahan makanan memperoleh paling banyak pendapatan. Super market dan toko waralaba sangat dinamis, dan hampir mencukupi separo kegiatan komersial.

Dalam percaturan politik dunia Perancis adalah anggota tetap Dewan Keamanan PBB, salah satu pendiri Uni Eropa (UE) dan anggota NATO (tidak

⁴⁵ Ibid, hal. 90.

berpartisipasi dalam lembaga pengintegrasian militer NATO). Sejak berdirinya Republik Ke-lima Perancis pada tahun 1958,⁴⁶ pemerintah selalu menjalankan politik luar negeri yang bebas merdeka yang disusun oleh Jenderal Charles de Gaulle. UE adalah landasan diplomasi Perancis, Perancis berusaha mendorong pembangunan Eropa, bertujuan membangun UE sebagai salah satu kutub yang benar-benar independen dengan memainkan peran inti. Sementara itu, Perancis berusaha mendorong multipolarisasi, meningkatkan kerja sama regional Eropa-Asia; berusaha menyelaraskan hubungannya dengan negara besar, memelihara dan mengembangkan hubungan tradisional dengan negara-negara Afrika, mendorong negara-negara industri untuk menambah bantuan kepada negara-negara Afrika, dengan aktif ikut serta dalam proses perdamaian Timur Tengah dan, meningkatkan hubungan politik dan ekonomi dengan Asia dan Amerika Latin.

Pada masa pemerintahan Sarkozy, ia tidak ingin melanjutkan kebijakan tradisional yang menganut garis berseberangan dengan AS. Ia mencoba melibatkan diri di Timur Tengah dengan posisi tidak berhadapan dengan AS, tetapi tetap untuk bersikap independen seperti dikatakan oleh Sarkozy, *"I believe that the friendship between the United States and France is as important today as it has been over the last two centuries. Allied does not mean aligned and I feel entirely free to express our agreements and our disagreements..."*,⁴⁷ juga tetap

⁴⁶ Republik ke-lima Perancis merupakan sebuah fase perubahan sistem perpolitikan Perancis. Fase ini lahir dilatarbelakangi oleh sebuah keadaan pada fase Republik Ke-empat, dimana Perancis secara konstan mengalami ketidakstabilan politik dan ketidakmampuan untuk mengambil keputusan yang tegas. Masalah ketidakstabilan dan ketidakefektifan dari Republik Ke-empat mencapai puncaknya pada tahun 1958, ketika pemerintahan masa itu bermaksud untuk bernegosiasi dengan para nasionalis Algeria. Unsur-unsur sayap kanan di Tentara Perancis, dipimpin oleh Jendral Jacques Massu menahan penguasa di Algiers dan mengancam akan melakukan serangan parasut ke Paris jika Charels de Gaulle, sang pahlawan Perang Dunia II, tidak ditempatkan untuk memimpin Republik. De Gaulle pun naik memimpin dibawah prakondisi bahwa sebuah konstitusi yang baru harus dibuat dengan kekuasaan presidensial yang sangat besar, di mana eksekutif tunggal akan memerintah selama periode tujuh tahun. Dengan diperkenalkannya perubahan dan konstitusi yang baru ini, lahirlah periode Republik Ke-lima yang bertahan hingga saat ini. Republik Kelima adalah konstitusi republik Perancis kelima dan terbaru, yang diperkenalkan pada 5 Oktober 1958. Republik Kelima bangkit dari keruntuhan Republik Keempat Perancis, menggantikan pemerintah parlementer dengan sistem semi-presidensial. (http://id.wikipedia.org/wiki/Republik_Keempat_Perancis, diakses pada tanggal 17 Juli 2009, pukul 21.00 WIB)

⁴⁷http://elysee.fr/elysee/elysee.fr/francais/interventions/2007/aout/allocution_a_1_occasion_de_la_conference_des_ambassadeurs.79272.html

memelihara wilayah-wilayah pengaruh Perancis di kawasan terutama Lebanon agar tidak beralih ke pengaruh AS.

4.3.2 Faktor Eksternal

Dalam pembentukan kepentingan nasional Perancis, selain faktor internal terdapat faktor eksternal yang berpengaruh. Hal ini tentu tidak terlepas dari tujuan utama kepentingan nasional dengan memberikan keamanan dan kesejahteraan bagi rakyat. Faktor-faktor eksternal itu adalah: posisi Perancis dalam perpolitikan internasional dan peran Perancis dalam Uni Eropa, serta faktor yang sangat terkait dengan masalah penelitian ini, yaitu posisi Perancis di Timur Tengah.

a. Posisi Perancis dalam perpolitikan internasional

Dalam percaturan politik dunia dewasa ini selalu terpusat pada tema perimbangan kekuatan global. Keseimbangan kekuatan global atau situasi internasional adalah struktur hubungan antar negara di dunia. Ini adalah status adidaya dan negara-negara yang bersaing dalam memperebutkan pengaruh didunia. Untuk memahami keseimbangan kekuatan global ini, tidak hanya memerlukan pengetahuan tentang negara mana saja yang berstatus adidaya, kebijakannya dan visi misinya, tetapi juga memerlukan pengetahuan hubungan internasional, yang selalu diwarnai persaingan antar sesama negara untuk mencapai status keadidaya. Ini sebabnya situasi internasional tidak stabil dan selalu berubah. Amerika yang adidaya sekarang ini belum merupakan status yang final, sebagaimana sejarah membuktikan pernah bahwa German, Inggris pernah menyanggah gelar sebagai negara adidaya. Maka analisa apapun terhadap keseimbangan kekuatan global adalah penjelasan terhadap situasi pada waktu tertentu, sehingga analisa tersebut menjadi bagian dari sejarah ketika situasi internasional kembali berubah.

Situasi internasional akan selalu dalam posisi dinamis karena ditentukan oleh kondisi ekonomi-politik beberapa negara dan tergantung dari situasi tertentu yang menyelimutinya. Perubahan situasi dan kondisi terjadi karena suatu negara bisa melemah atau menguat, atau karena hubungan dengan negara lain melemah atau menguat. Dalam hal ini, terjadinya perubahan keseimbangan kekuatan global

disebabkan oleh pergeseran keseimbangan kekuatan yang terjadi sebelumnya. Ini sebabnya, memahami status setiap negara yang mempengaruhi situasi internasional adalah dasar untuk memahami keseimbangan kekuatan adidaya global.

Persaingan antar kekuatan dunia telah berlangsung sejak dahulu. Pada masa Mesir kuno yang diperintah oleh para Fir'aun, Mesir adalah negeri adidaya dan bersaing dengan Mesopotamia. Imperium Romawi menjadi negara adidaya dan Imperium Persia bersaing dengannya. Lalu, imperium Islam menundukkan keduanya, Romawi dan Persia sekaligus, dan menjelma menjadi kekuatan adidaya hingga akhir abad ke-18, dan dalam perjalanan sejarahnya sempat berseteru melawan Mongol dan terlibat dalam Perang Salib.⁴⁸

Perancis dan Inggris bersaing dengan Khilafah Utsmaniyah selama hampir 3 abad hingga pertengahan abad-18. Menjelang Perang Dunia I, Jerman menggeser keseimbangan kekuatan global, dan menghadapi persaingan dari Inggris dan Perancis. Setelah Perang Dunia I, Inggris menjadi kekuatan global dan menghadapi persaingan Perancis. Tidak lama kemudian, Jerman menantang Inggris dan hanya berakhirnya Perang Dunia II yang telah menghentikan hegemoni Jerman. Usai Perang Dunia II, AS menjadi pemenang dan menjadi kekuatan adidaya, yang menghadapi persaingan dari Uni Soviet selama 50 tahun, hingga jatuhnya Soviet pada tahun 1990an. Dalam percaturan Politik Antar-Bangsa saat ini AS adalah negeri adidaya dunia, meski mulai melemah ia masih berpengaruh terhadap politik internasional. AS adalah ekonomi terbesar dunia, termaju dalam penguasaan teknologi mutakhir, dan memiliki pangkalan militer yang tersebar diseluruh dunia untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya.⁴⁹

Namun, Amerika mulai menunjukkan kelemahannya dalam perang di Iraq dan Afganistan dan belum memberikan tanda-tanda perbaikan nasibnya. Dua perang tersebut berlangsung dalam waktu yang lebih lama ketimbang Perang Dunia Kedua. Militer AS yang ditopang kemajuan teknologi mutakhir dalam sejarah dunia, tidak mampu menundukkan musuh yang menggunakan senjata teknologi tahun 1960an. Akibatnya, AS sangat tergantung pada pemerintahan lokal untuk menghindari rasa malu. AS menghadapi banyak sekali tantangan di belahan dunia

⁴⁸ www.detikislam.com, diakses pada 6 April 2009 pukul. 08.36 WIB

⁴⁹ www.detikislam.com, diakses pada 6 April 2009 pukul. 08.36 WIB

yang sempat ia dominasi sejak tahun 2001 pasca serangan ke Afganistan. Di AS sempat menikmati dominasinya Timur Tengah. Namun pasca serangan AS ke Irak dan runtuhnya rezim Saddam Husen, AS menghadapi tantangan dari Cina dan negara-negara Eropa dalam penguasaan minyak di Timur Tengah.

AS juga berkompetisi melawan India, Jepang, dan Uni Eropa untuk mendapatkan emas hitam ini. Bahkan Inggris sempat mengelabui proyek AS dengan alasan kerjasama. Graham Fuller, mantan ketua Konsili Intelijen Nasional menggambarkan nasib Amerika ketika ia menulis di majalah *National Interest*, "banyak negara telah menerapkan multi-strategi dan taktik untuk melemahkan, mengelabui, merubah, meningkatkan kompleksitas, dan membatasi serta menjegal agenda pemerintahan Bush dengan tikaman yang bertubi-tubi."⁵⁰

Cengkeraman Amerika di Afrika juga mulai melemah dari manuver Inggris dan Cina, setelah berakhirnya periode dominasi AS disana selama beberapa dasawarsa. Inggris dibawah pimpinan Tony Blair menggagalkan usaha AS untuk melengserkan Presiden Kabbah, penguasa Sierra Lion. Inggris juga bekerja secara sistematis untuk menyelamatkan kekuasaan Rezim Ghaddafi dari pengaruh kaum neokonservatif Amerika yang menghendaki perubahan rezim paska kejadian September 911. Di Sudan, AS juga gagal untuk memisahkan Sudan Selatan karena Inggris dan Perancis berhasil menggunakan krisis Darfur untuk mempengaruhi Sudan. Di Afrika Selatan, Blair juga bersaing melawan AS untuk menyelamatkan kepentingan Inggris disana. AS juga menghadapi kemungkinan kegagalan bersaing dengan Cina dalam mengembangkan industri minyak di Afrika, yang telah memenangkan tidak kurang dari 100 kontrak yang bernilai 20 bilyun dolar yang bertujuan untuk memastikan stabilitas penyediaan minyak.⁵¹

Rusia dan Cina berkembang secara pesat tanpa mengikuti resep demokrasi liberal Barat. Sebaliknya, Rusia justru menantang AS secara terbuka. Misalnya, Rusia menancapkan benderanya di dataran es Antartika, men-tes bom secara masif, dan mempersengketakan sistem pertahanan misil AS di Eropa Timur. Rusia juga merebut kembali status adidaya dengan menguasai kembali Kazakhstan dan Uzbekistan dari pengaruh AS dan menghentikan tiga revolusi di

⁵⁰ *ibid*

⁵¹ *Ibid*

negara-negara Asia Tengah. AS, setelah 20 tahun tidak memiliki saingan berarti, mulai menghadapi tantangan serius dari suatu negara (Rusia) yang menguasai ladang gas dan minyak bumi terbesar di dunia.

Perusahaan yang mampu bersaing dengan AS adalah Rusia, Inggris, Perancis, dan Jerman, dimana keempat negara tersebut memiliki ambisi internasional. Rusia dalam dekade terakhir berhasil menguasai sumber mineral dan menundukkan beberapa konglomerat yang sempat menguasai perekonomian Rusia sejak jatuhnya Uni Soviet. Dengan dibekali sumber energi yang luarbiasa, Rusia kini berada dalam fase untuk bersaing dalam meningkatkan teknologi militernya dalam menghadapi AS.

Inggris yang dalam sejarah sempat menjadi negara adidaya masih memiliki pengaruh pada bekas jajahannya. Inggris adalah salah satu pemain penting dalam politik Eropa dan sering menimbulkan kegelisahan pada AS atas kegagalan rencananya di Eropa. Perang Dunia II telah menghabiskan energi Inggris yang sempat melemahkan kedudukan internasionalnya. Pembuat kebijakan Inggris menyadari hal ini dan membangun manuver politik kerjasama ketimbang persaingan secara langsung dengan AS. Inggris melakukannya dengan cara bekerjasama dengan AS di wilayah internasional di satu sisi. Di sisi lain, Inggris membuat AS frustrasi dalam usahanya mendominasi Eropa.

Perancis, selayaknya Inggris, adalah pemain penting lainnya dalam sejarah dan politik Eropa dan kebijakan Perancis diterapkan diseluruh bekas jajahannya dalam bentuk kekuatan budaya dan ekonomi sehingga mampu mempengaruhi Dunia. Perancis yang mendominasi Uni Eropa, berhasil menggunakannya untuk memajukan kepentingan Perancis. Dibawah pimpinan Nicolas Sarkozy, Perancis membangun pangkalan militer di Teluk dan bekerjasama dengan AS di Lebanon dan konflik Russia-Georgia. Selain itu Sarkozy ingin meningkatkan pengaruh Perancis dalam NATO dengan kembali ke dalam struktur komando militer, dan ia bertekad untuk tetap menjaga kebebasan Prancis dari pengaruh Amerika Serikat, seperti itikad mantan Presiden Prancis Charles de Gaulle.⁵²

⁵² <http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4092940,00.html>

b. Perancis dan Uni Eropa

Sejak runtuhnya tembok Berlin, ketika payung keamanan Amerika Serikat dipandang sebagian tak diperlukan lagi, Eropa mulai memikirkan untuk mengimbangi kekuatan Amerika Serikat. Sejak itu Perancis muncul sebagai "*principal exponents*" dari apa yang disebut sebagai "*Euro-Gaullism*".⁵³

Retorika Euro-Gaullist muncul kembali setelah peristiwa di Bosnia, ketika pasukan Perancis yang tergabung dalam pasukan PBB gagal menghentikan serangan Serbia terhadap kelompok muslim dan Kroasia dalam perang sipil yang menyebabkan tewasnya lebih dari 270.000 orang. Perjanjian damai akhirnya tercapai di pangkalan angkatan udara AS di Dayton, Ohio, akhir tahun 1995, dan perjanjian tersebut dalam pengawasan misi NATO yang dipimpin AS.

Setahun setelah kesepakatan Dayton, presiden Perancis kala itu, Jacques Chirac menyatakan di sebuah wawancara bahwa Eropa memerlukan "*means to struggle against American Hegemony*".⁵⁴ Pada tahun 1999, setelah Amerika Serikat berhasil memimpin perang melawan Serbia di Kosovo, Menteri Luar Negeri Perancis ketika itu juga menyatakan, bahwa Perancis tidak menerima tatanan *single hyperpower*.⁵⁵

Pernyataan Perancis untuk mengimbangi AS kemudian berkembang menjadi metafora multipolaritas. Pada tahun 2004 presiden Chirac menyatakan, "*The evolution of the world towards multipolar situation is inevitable*". Ia juga menegaskan, "*There will be a great American pole, a great European pole, a Chinese pole, an Indian one, eventually a South American pole*".⁵⁶

Mengingat kegagalan Eropa untuk menjaga perdamaian di kawasan Balkan tanpa kepemimpinan Amerika Serikat, PM Inggris Tony Blair bertemu dengan presiden Perancis Jacques Chirac di St. Malo, Perancis pada Desember 1998, ia bergabung dengan presiden Perancis menyeru Uni Eropa untuk mengembangkan kapasitas yang didukung kekuatan militer yang kredibel dan kesiapan dalam rangka merespon krisis internasional.

⁵³ Timothy Garton Ash, *Free World: America, Europe, dan the Surprising Future of the West*, Random House, New York, 2004.

⁵⁴ Jurnal Kajian Wilayah Eropa, vol.II no.2-2006,hal. 33, diterbitkan oleh kerjasama antara Program studi kajian wilayah eropa- Program Pascasarjana Universitas Indonesia dengan delegasi komisi Eropa.

⁵⁵ Ibid

⁵⁶ Ibid

Dalam pertemuan Troika antara Jerman, Perancis dan Inggris bulan September 2003 di Berlin, Kanselir Gerhard Schroeder, Presiden Jacques Chirac, dan PM Tony Blair sepakat bahwa Uni Eropa harus didukung dengan penyatuan kapasitas berencana dan memimpin operasi tanpa menggunakan sumber daya dan kapabilitas NATO.⁵⁷ Meskipun disisi lain Inggris bersikeras untuk menjadi medium komunikasi antara Amerika dan Eropa.

Dengan menghilangkan kebutuhan akan payung keamanan AS, akan terjadi kesenjangan nilai antara Eropa dan Amerika sehubungan dengan penggunaan kekuatan militer, kesenjangan semakin besar setelah tragedi WTC 9 September 2002. meskipun Eropa bersimpati terhadap serangan yang terjadi di WTC dan Pentagon, namun demikian Eropa tidak bersimpati terhadap respon militer Amerika; serangan ke Afganistan kemudian Irak.⁵⁸

Retorika Euro-Gaullism juga dapat digunakan untuk menjustifikasi keputusan yang didasarkan pada kepentingan-kepentingan komersial. Mantan presiden Perancis Jacques Chirac pada tahun 2001 menyatakan jika Eropa tidak mengembangkan sistem satelit navigasinya sendiri, Eropa akan sangat tergantung kepada Amerika dalam hal ilmu pengetahuan, teknologi, industri dan ekonomi. Sistem navigasi yang mandiri akan memudahkan industri persenjataan Eropa terutama Perancis untuk menjual pesawat dan amunisinya ke negara-negara lain.⁵⁹

c. Perancis dan perdamaian Timur Tengah

Perkembangan mengenai posisi Perancis dalam usaha perdamaian Timur Tengah bahwa Perancis mulai tidak nyaman dengan posisi AS. Diplomasi unilateral yang dilakukan AS selama ini terbukti tidak mampu melakukan kemajuan berarti bahkan cenderung makin menciptakan eskalasi dan ketegangan. AS yang menyebut dirinya sebagai negara adidaya tunggal tidak mampu lagi melakukan inisiatif strategis untuk mengatasi isu-isu besar di kawasan setelah posisinya makin lemah akibat perang berkepanjangan yang menguras tenaga dan materi di Irak dan Afganistan.

⁵⁷ Ibid

⁵⁸ Ibid, hal. 34

⁵⁹ Ibid, hal. 35-36

Perancis sebagai salah satu negara Eropa tidak kuat lagi menghadapi kebijakan AS di kawasan yang hanya menciptakan kekacauan menyeluruh (*chaos*) terutama setelah perang musim panas antara Hizbullah dan Israel tahun 2006, hal ini mendorong Perancis untuk berperan lebih dalam dan menciptakan terobosan strategis, seperti yang dilakukan bersama dengan tiga negara di Timur Tengah, Turki, Qatar dan Suriah dalam usaha penyelesaian konflik antara Suriah dan Israel, dimana sebelumnya Perancis dan Qatar dalam bingkai diplomasi multilateral telah berhasil menciptakan situasi kondusif di Lebanon.⁶⁰ Setelah itu pada 15 Oktober 2008 atas prakarsa Perancis, Suriah dan Lebanon berhasil menandatangani peresmian hubungan diplomatik antara keduanya.

4.4 Politik luar negeri Perancis di Suriah pada masa pemerintahan Nicolas Sarkozy

Setelah presiden Jacques Chirac turun dari tampuk kekuasaan posisi kepresidenan diganti oleh Nicolas Sarkozy. Pada tanggal 6 Mei 2007 ia memenangkan pemilihan presiden mengalahkan pesaingnya Ségolène Royal dari kubu Sosialis. Sarkozy diusung oleh partainya UMP (*Union pour un Mouvement Populaire*), sebuah partai konservatif kanan. Partai UMP didirikan pada tahun 2002 sebagai gabungan dari *Gaullist-konservatif Rally* dan konservatif-liberal Demokrasi Liberal (DL), sebuah bagian besar dari Uni Demokrasi Perancis (UDF).⁶¹ Partai ini awalnya mendukung mantan presiden Chirac, tetapi bersama dengan perkembangannya ia lebih bersikap mandiri. Yaitu Semenjak presiden partai UMP pertama Alain Juppé, sekutu dekat dari Jacques Chirac, mengundurkan diri pada tanggal 15 Juli 2004 setelah divonis korupsi politik pada bulan Januari 2004. setelah itu Nicolas Sarkozy mengumumkan bahwa dia akan mengambil alih secara resmi posisi presiden UMP dan ia mengundurkan diri sebagai menteri keuangan pada pemerintahan Chirac, itu terjadi pada 29 November 2004.⁶²

⁶⁰ www.hidayatullah.com diakses pada tanggal 23 Mei 2009 pukul 12.37 WIB.

⁶¹ http://en.wikipedia.org/wiki/Union_for_a_Popular_Movement, diakses pada tanggal 3 Juli 2009, pukul 17.15 WIB.

⁶² Ibid.

Nicolas Sarkozy lahir pada tanggal 28 Januari 1955 dari seorang ayah Imigran Hungaria dan dari seorang ibu Perancis berdarah Yahudi Yunani beragama Katolik. Dalam karirnya ia pernah menjadi walikota disebuah kota elite di pinggiran kota Paris, Neuilly mulai tahun 1983-2002, kemudian menjadi menteri dalam negeri dan menteri keuangan⁶³ dalam jajaran menteri negara pada era Jacques Chirac, berbagai kepercayaan tersebut menempatkan Sarkozy sebagai orang ketiga setelah Presiden Jacques Chirac dan Perdana Menteri.⁶⁴

Banyak pengamat melihat Sarkozy sebagai seorang yang ambisius, pekerja keras dan seorang *workaholic*, dalam kebijakan luar negeri ia dianggap seorang yang *Atlanticists* pro Amerika dan Israel.⁶⁵ Perancis pada pemerintahan Jacques Chirac dianggap gagal dalam proses rekonsiliasi nasional dan tidak berhasil dalam reformasi serta gagal membawa Perancis mejuju modernisasi, bencana pengangguran menimpa Perancis sementara pertumbuhan ekonomi rendah sehingga kesenjangan sosial semakin menjadi menjadi masalah dalam negeri Perancis, selain itu dikawasan Eropa posisi dan pengaruh Perancis melemah, dipangung internasional kebijakan Perancis berhadapan langsung dengan Amerika khususnya kebijakan tentang Timur Tengah yang membawa Perancis kepada hubungan yang tidak baik. Semua masalah diatas merupakan tantangan bagi Sarkozy ketika ia terpilih menjadi presiden.

Pada masa pemerintahan Sarkozy Perancis berusaha untuk meningkatkan statusnya di arena internasional dan meningkatkan pengaruh dan kehadirannya di Timur Tengah. Apalagi pasca agresi Amerika di Irak, posisi Amerika jatuh di mata internasional, ini merupakan peluang bagi Perancis untuk melangkah memperbaiki posisi tawar di kancan internasional. Dalam persepsi Perancis Suriah adalah kunci utama untuk menyelesaikan masalah-masalah dikawasan, krisis Lebanon, konflik Arab-Israel dan polemik Nuklir Iran. inilah tiga hal yang menjadi alasan mengapa Perancis mempererat hubungannya dengan Suriah.⁶⁶ Suriah adalah negara yang mempunyai hubungan yang erat dengan berbagai permasalahan di ketiga negara tersebut. Dalam konflik Palestina-Israel Suriah

⁶³ Jurnal Kajian Eropa, Volume III no 2, tahun 2007, Hal. 51.

⁶⁴ <http://en.wikipedia.org>, diakses pada 23 Mei 2009 pukul 12.37 WIB.

⁶⁵ Jurnal Kajian Eropa, Volume III no 2, tahun 2007, Hal. 51. Juga. <http://en.wikipedia.org>, diakses pada 23 Mei 2009 pukul 12.37 WIB.

⁶⁶ BESA Center Perspectives Papers No. 48, September 10, 2008.

berkepentingan akan dataran tinggi Golan. Di Lebanon, Suriah mempunyai pengaruh atas jalannya perpolitikan di Lebanon, misalnya Suriah diminta oleh pihak Perancis untuk mendukung proses pemilihan presiden di Lebanon pasca terbunuhnya Rafik Al Hariri. Ini menunjukkan bahwa Suriah mempunyai hubungan yang erat dengan masyarakat Lebanon. Adapun Iran merupakan sekutu dekat Suriah, dimana kedua negara disatukan oleh hubungan yang erat antara gerakan Amal Al Islam di kedua negara.⁶⁷

Menurut Dr José Ignacio Torreblanca Peneliti Senior di Dewan Hubungan Luar Negeri Eropa (ECFR), kebijakan luar negeri Sarkozy dapat dilihat dari tiga langkah strategis pemerintahannya. Pertama, bahwa Perancis harus berperan aktif dalam berbagai permasalahan dunia, terutama kembali berperan besar dalam Uni Eropa dan Nato. Kedua, menghindari konfrontasi antara Islam dan Barat, dan kekuatan-kekuatan besar di dunia. Ketiga, mempertegas korelasi yang signifikan antara kebijakan domestik dan kebijakan luar negeri.⁶⁸

Kebijakan luar negeri Perancis di Suriah bertolak dari tiga pertimbangan strategis diatas, dimana tujuan umum dari politik luar negeri Perancis adalah untuk meletakkan dasar-dasar kepemimpinan global yang baru, termasuk langkah-langkah strategis Perancis di Suriah tidak terlepas dari tujuan ini.

Kebijakan Perancis untuk Suriah terkait dengan Lebanon adalah Suriah mendukung negara Lebanon yang berdaulat, dengan merealisasikan dukungan tersebut dengan membuka kantor perwakilan di masing-masing kedua negara. Selain itu Perancis menginginkan Suriah untuk berperan dalam mencegah transfer senjata dari Iran ke Hizbullah di Lebanon.⁶⁹ Secara implisit Perancis sangat mengkhawatirkan kekuatan politik Hizbullah, karena dengan menguatnya Hizbullah rezim berkuasa di Lebanon pengaruh Perancis di Lebanon akan melemah, dimana hubungan antara Hizbullah dan pemerintah berkuasa yang notabene didominasi oleh sekte Maronit akan rawan terjadi konflik sebagaimana konflik masa lalu yang mewarnai proses pembentukan negara Lebanon.⁷⁰

⁶⁷ Sihbudi, M. Riza, *Bara Timur Tengah*, 1991, Bandung: MIZAN, hal. 56-57.

⁶⁸ <http://www.ecfr.eu/page/-/documents/Torreblanca-Sarkozy-Foreign-Policy.pdf>, diakses pada tanggal 3 Juli 2009, pukul 17.00 WIB.

⁶⁹ BESA Center Perspectives Papers No. 48, September 10, 2008.

⁷⁰ *ibid*

Dengan mengadakan diplomasi tingkat tinggi di Suriah perancis berharap dapat mematikan bibit-bibit perang saudara di Lebanon. Sehingga sejauh Suriah tidak menolak untuk berbuat untuk Perancis, Perancis akan terus berusaha untuk membujuk Suriah untuk menjadi mediator dialog faksi-faksi yang bertentangan di Lebanon. Selain itu Suriah yang mempunyai kedekatan dengan Hizbullah diharapkan dapat membujuk Hizbullah menghentikan konfrontasi dengan Israel.⁷¹

Sedangkan terkait dengan nuklir Iran, kebijakan Sarkozy tetap menentang nuklir Iran dan setuju dengan sanksi yang dijatuhkan oleh DK PBB terhadap Iran, tetapi secara eksplisit Sarkozy tidak setuju dengan menancarkan aksi militer terhadap Iran, baginya bom yang diluncurkan Iran atau membombardir Iran sama-sama bencana, bencana bagi keamanan kawasan maupun dunia. Untuk itu, dengan pendekatannya melalui Suriah diharapkan Suriah dapat membujuk Iran untuk meninggalkan program nuklirnya untuk perdamaian dunia, meskipun Iran sebagai negara yang diakui didunia berhak untuk memiliki senjata nuklir.⁷²

Adapun yang terkait negosiasi antara Suriah dan Isreal, Perancis menawarkan untuk menjadi mediator yang terpercaya bagi keduanya. Perancis berusaha untuk menjembati konflik Suriah-Israel, target dari diplomasi Perancis ini adalah pengakuan Suriah atas negara Israel secara formal. Tetapi tanda-tanda keberhasilan Perancis untuk berhasil masih cukup lama terlihat, dikarenakan saat ini Suriah menolak untuk mengadakan negosiasi secara langsung dengan Israel.⁷³

4.5 Potensi nasional dan lingkungan politik Suriah

Dalam sub bab ini penulis ingin membahas kondisi intern negara Suriah, terkait kondisi geografis, masyarakat, ekonomi dan politik serta kepemimpinan nasional dalam negara Republik Arab Suriah. Hal ini menjadi relevan karena Suriah merupakan tujuan politik luar negeri Perancis.

4.5.1 Letak strategis Suriah

⁷¹ Ibid

⁷² Ibid.

⁷³ ibid

Wilayah yang menjadi teritorial Suriah modern merupakan jejak peninggalan kolonialisme Eropa di Timur Tengah. Sebelum tahun 1918 jika menyebut negara Suriah maka yang terbayang dalam benak kita adalah wilayah yang luas meliputi Suriah modern, Yordania, Palestina, Israel, dan Lebanon modern. Bagi orang Romawi maupun Turki Utsmani wilayah negara yang juga disebut *Syam* ini membentang dari Laut Tengah sampai ke Sungai Furat, mulai dari Sinai hingga ke daerah perbukitan di propinsi Hatay Turki (alexandretta). Wilayah yang luas ini sering pula disebut Suriah Raya (*Greater Suriah*).⁷⁴

Dalam perjalanan sejarahnya, Suriah modern yang merdeka pada tahun 1946 ini akhirnya mendiami wilayah yang jauh lebih kecil dibandingkan sebelumnya. Ini karena imperialis Inggris dan Perancis sebagai pemenang Perang Dunia I telah membagi-bagi dan menetapkan wilayah Suriah sebagaimana kita jumpai sekarang. Negara Suriah modern terletak di jantung wilayah Arab. Ia tidak memiliki batas-batas alami yang melindunginya dari serangan pihak asing. Dengan kata lain negara ini berbatasan darat dengan negara-negara tetangganya, kecuali beberapa bagian disebelah barat, ia dibatasi oleh Laut Mediterania. Di sebelah utara Suriah berbatasan langsung dengan Turki, di bagian timur berbatasan langsung dengan Irak, dan di bagian barat berbatasan dengan Israel, Lebanon dan Laut Mediterania, sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan Jordania. Tetapi secara umum letak geografis Suriah sangat strategis karena menghubungkan benua Asia, Afrika dan eropa.

Posisi yang berhimpitan dengan negara tetangganya membuat negara-negara yang bertetangga rawan terjadi konflik perbatasan, meskipun disisi lain juga menguntungkan dimana dimungkinkan untuk membuat pakta keamanan bersama. Hanya saja selama ini negara-negara yang bertetangga tersebut sering terlibat konflik, misalnya antara Turki, Suriah dan Irak dalam masalah air, ketiga negara tersebut memandang penting aliran sungai Farat dan Tigris. Air merupakan kebutuhan vital bagi irigasi pertanian, untuk pembangkit tenaga listrik, atau untuk konsumsi rumah tangga dan perusahaan. Kekurangan air merupakan bencana bagi negara manapun.

⁷⁴ Riza Sihbudi dkk, *Profil Negara-Negara Timur Tengah*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1995, hal. 183.

Luas wilayah 185.180 km² termasuk 1.295 Km² dataran tinggi Golan yang diduduki Israel), sepertiga dari wilayah tersebut merupakan tanah yang dapat diolah.⁷⁵ Dengan sepertiga tanah yang dapat diolah untuk lahan pertanian dan sebagian besar lahan bergantung pada curah hujan, maka suplai air irigasi bagi Suriah merupakan kepentingan yang sangat besar bagi Suriah. Terlebih apabila pemerintah Suriah menjadikan pertanian sebagai tulang punggung pertanian.

Alasan air juga melatarbelakangi mengapa Suriah mempertahankan pasukannya di Lebanon. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa hulu Sungai Orontes, yang mengalir dari lembah Bekaa, tidak direbut dan dikuasi oleh asing, sungai tersebut mengalir dari Lebanon menuju Suriah, kemudian menuju propinsi Hatay di Turki.⁷⁶ Air juga yang melatarbelakangi konflik antara Suriah-Israel terkait dengan status dataran tinggi Golan. Golan yang kaya dengan berbagai mata air menyuplai 30 % kebutuhan air minum warga Israel.⁷⁷

Empat kota utama di Suriah, Damaskus, Homs, Hamah dan Aleppo merupakan pusat-pusat perniagaan dan pertanian. Secara historis setiap kota tersebut sebenarnya memiliki hubungan yang khusus dengan kota-kota di pesisir Laut Tengah. Dimana sejak dahulu kala daerah-daerah tersebut merupakan jalur perdagangan yang strategis.

4.5.2 Masyarakat

Republik Arab Suriah adalah sebuah negara berkembang dimana populasi setiap tahunnya meningkat 2,2 % dimana jumlah penduduk pada tahun 2007 adalah 19.314.747 jiwa,⁷⁸ pada tahun 2008 berjumlah 23,563,991.34 jiwa, dan pada tahun 2009 ini diperkirakan berjumlah 28,748,069.02 jiwa.

Struktur masyarakat Suriah terdiri dari etnis Arab dan non arab. Etnis arab merupakan mayoritas dan selebihnya, etnis Kurdi, Armenia, Turkoman, Circassian, Asuriah, dan Yahudi adalah kelompok minoritas. Jadi struktur sosial

⁷⁵ Ibid, hal. 187.

⁷⁶ Geoffrey Kemp dan Robert E Harkayy, *Strategic Geography and the Changing Middle East*, Washington: Carnegie Endowment for International Peace, 1997, hal. 105.

⁷⁷ Ibid.

⁷⁸ <http://www.infoplease.com/ipa/A0108016.html> diakses pada tanggal 23 Mei 2009 pukul 11.00 WIB.

negara Suriah di dominasi oleh etnis Arab dimana etnis Arab merupakan etnis yang sangat berpengaruh dalam perpolitikan.

Berdasarkan aspek keagamaan terdiri dari Islam (Sunni) 74%; Alawite, Druze, dan mazhab Islam lainnya 16%; Kristen (berbagai mazhab) 10%; dan sejumlah kecil Yahudi di Damaskus, Al Qamishli, dan Aleppo.⁷⁹ Berbagai agama dan sekte yang terdapat di Suriah tersebut menjadi faktor yang berpengaruh dalam perpolitikan dalam negeri, dan tidak menutup kemungkinan dapat dimanfaatkan oleh setiap kekuatan luar untuk mendapatkan kepentingannya didalam negeri Suriah.

Dinamika perpolitikan intern Suriah sangat beragam, meskipun kaum Sunni mayoritas tetapi secara politik kaum Alawite lebih berpengaruh, Alawite termasuk dalam kelompok Syi'ah, mereka tinggal di propinsi Batakia dimana senantiasa memelihara dan melestarikan budaya dan agama yang diyakininya.

Kaum minoritas Alawite menjadi istimewa ketika Hafizh Asad naik keatas tahta kepemimpinan Suriah, dimana ada tiga hal yang dilakukan oleh pemerintahan Suriah kala itu. Pertama, mengingat sejarah perjalanan Suriah pasca mandat Perancis yang selalu diwarnai oleh kudeta, maka pemerintahan Asad mengambil penuh kendali angkatan bersenjata dan intelijen. Kedua, mengelilingi pemerintahan dengan orang-orang terpercaya yang pro kepada rezim berkuasa, yaitu orang-orang yang loyal kepada partai Ba'ats, yang kala itu didominasi oleh orang-orang Alawite dari kalangan Syi'ah. Hal ini mengundang protes dan ketidaksetujuan dari kalangan mayoritas yang Sunni. Ketiga menjadikan partai Ba'ats sebagai *single majority* yang dapat dijadikan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan, sekaligus menjadikannya identitas politik negeri Suriah meskipun dalam perjalannya partai ini ter-sekulerkan.⁸⁰

Kelompok yang lain yang mempunyai posisi khas dalam negeri Suriah adalah kelompok Druze, sejak masa pemerintahan Turki Utsmani kelompok tersebut mendapatkan hak otonomi untuk mengatur komunitas mereka sendiri. Pada masa kolonial kelompok ini pernah mengadakan perlawanan sengit terhadap Perancis dan pada tahun 1925 mereka berhasil mengusir tentara Perancis dari

⁷⁹ Ibid.

⁸⁰ Al 'Aqqad. Shalah DR, *Al Masyriqul 'Arabil Mua'ashir: Dirasah Tarikhiyah Siyasiyah*. Maktabah Anjlew, Mesir 1992.

wilayah komunitas mereka di gunung Druze. Perlawanan terhadap Perancis dilakukan karena Perancis mengganggu keistimewahan dan kebebasan yang mereka dapatkan dari Turki Utsmani sebagai penguasa sebelum masa kolonila tersebut. Berdasarkan hal ini maka pemerintah yang berkuasa sekarang juga menerapkan kebijakan yang sama seperti kebijakan Turki Utsmani kala itu, yaitu memberikan hak otonomi bagi komunitas Druze.

Adapun kelompok Kristen didominasi oleh kelompok Ortodoks Yunani, selebihnya terdiri dari Ortodoks Suriah, Katolik Yunani, Maronit dan Katolik Suriah. Kelompok Ortodok Yunani sangat mendukung bagi pengembangan ideologi nasionalisme Arab dan banyak terlibat dalam partai Ba'ats. Kaum Kristen kebanyakan tinggal di daerah pusat-pusat urban, seperti Damaskus, Homs, Hamah, Aleppo dan daerah-daerah pantai dekat Tartus.

Kelompok suku Kurdi juga mendapat perhatian khusus dari pemerintah yang berkuasa, karena kelompok ini tersebar di daerah-daerah perbatasan antara Suriah, Irak dan Turki. Suku ini menyisakan kekhawatiran sebab kesukuan mereka yang kuat, ada kemungkinan suku ini akan bergeliat jika negara Kurdi yang merdeka terbentuk. Untuk itu pemerintah Suriah selalu mengadakan koordinasi dengan Turki dan Irak terkait perkembangan suku Kurdi di masing-masing negara.

Masyarakat Suriah demikian plural, tetapi sebagai sebuah negara Suriah memerlukan identitas tertentu yang dapat memayungi semua agama dan budaya yang terdapat di negara itu. Disinilah, meskipun belum final, ideologi *Ba'ats* berperan sebagai ideologi negara selama partai ini mengantarkan para kadernya ke tahta kepemimpinan negeri Suriah.⁸¹

4.5.3 Politik dan kepemimpinan nasional Suriah.

Secara politik negara ini selalu diwarnai oleh kudeta pada setiap suksesi kepemimpinan kecuali pasca Hafizh Asad, yaitu ia 'mewariskan' tahtanya kepada anaknya Bashar Asad suatu hal yang tidak lazim dalam negara berbentuk Republik. Hal ini karena dalam negeri Suriah suksesi kepemimpinan merupakan

⁸¹ Ideologi *ba'ats* menyerukan persatuan Arab, partai ini memiliki slogan, "persatuan, kebebasan, dan sosialisme". Lihat: *Gerakan Keagamaan dan Pemikiran*, Lembaga Pengkajian dan Penelitian WAMY Jakarta: Penerbit Al I'tisham, 1993, hal. 50

masalah serius. Pada masa pemerintahan Hafizh Asad, ketika ia menyadari bahwa kondisi kesehatannya semakin menurun, ia mulai mempersiapkan penggantinya. Mula-mula Asad mengorbankan adik kandungnya Rif'at Asad untuk menjadi orang kuat kedua di Suriah, namun hal tersebut gagal karena Rif'at pada tahun 1985 ia memimpin penyerangan di Aleppo dan Hama yang menyebabkannya dipecat dari jabatannya sebagai wakil presiden dan komandan *sarayaaddifa*.⁸²

Lalu ada dua orang yang setia kepada Asad yang berpotensi secara konstitusional menggantikan kedudukannya, wakil presiden serta mantan menteri luar negeri Abdul Halim Khadam dan menteri pertahanan Mustafa Talas, tetapi ada ganjalan yang menyulitkan Hafizh Asad, keduanya adalah seorang Sunni yang akan mendapatkan pertentangan dari kaum *alawite*. Lalu karena alasan stabilitas, Hafizh Asad mulai menyiapkan putranya, Bashar Asad. Sebenarnya Hafizh Asad lebih memilih putra sulungnya, Basel Asad, namun Basel tewas dalam kecelakaan mobil di Damascus pada 1994. Diantara langkah yang ditempuh Asad dalam rangka menyiapkan Bashar Asad yaitu mengalihkan wewenang urusan Lebanon dari Khaddam kepada Bashar Asad. Hal ini membuat Khaddam sangat terpukul. Karena Sebagai Wakil Presiden tentu merasa paling berhak menggantikan Hafizh Asad.

Suksesi kepemimpinan Suriah dari Hafizh Asad ke Bashar Asad terjadi pada 10-11 Juni 2000 berlangsung tanpa gejolak sama sekali. Hal ini dilakukan Asad karena tiga hal. *Pertama*, usianya yang sudah uzur dan kondisinya yang diserang banyak penyakit, *Kedua*, geopolitik Suriah yang sensitif, dimana secara intern berbagai kekuatan menginginkan kekuasaan dan secara regional Suriah terjepit oleh Israel yang belum menjalin hubungan damai, Irak yang selalu terlibat dalam persaingan partai Ba'ats dan Turki yang selalu mempermasalahkan aliran sungai. *Ketiga* trauma perebutan kekuasaan masa lalu yang selalu memakan korban jiwa.

Selain masalah suksesi, rezim partai Ba'ats selalu merasa terancam dengan gerakan Islam *Ikhwanul Muslimin*, karena gerakan ini selalu melancarkan pemberontakan karena ketidaksetujuan *Ikhwan* terhadap doktrin dan ideologi Ba'atsisme. Gerakan ini menginginkan Suriah menjadi negara Islam, dan

⁸² Sihbudi, Reza, *Bara Timur Tengah*, Bandung: Penerbit MIZAN, 1991, hal.125

menjadikan Islam sebagai agama negara, yang mana hal ini ditolak oleh Hafizh Asad dengan konstitusi 1972 yang menempatkan partai Ba'ats dan institusi-institusinya diatas pemerintahan negara.⁸³

Partai Ba'ats adalah sebuah partai nasionalis sekuler yang menyerukan persatuan Arab, partai ini memiliki slogan, "persatuan, kebebasan, dan sosialisme".⁸⁴ Partai ini sangat mengakar dalam tubuh pemerintahan Suriah. Sejak Suriah menerima kemerdekaanya dari Perancis tahun 1946 para pemimpin partai ini silih berganti memimpin Suriah, dan semenjak revolusi 1963 partai ini benar-benar menguasai Suriah.⁸⁵

4.5.4 Ekonomi

Suriah menganut sistem ekonomi pasar sosial, yang merupakan paduan antara konsep ekonomi sosialis dan ekonomi pasar, yang mana sumber kekayaan alam dan alat-alat produksi yang me-nyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Meskipun pemerintah masih mendominasi kegiatan ekonomi, sejak tahun 2000 secara bertahap melakukan transisi dari sistem ekonomi sentralistik ke arah ekonomi pasar, melalui berbagai paket kebijakan dan deregulasi di bidang investasi, keuangan dan perbankan, dengan mendorong keterlibatan kalangan swasta. Sejak awal 2004, secara bertahap telah mengizinkan bank-bank swasta beroperasi. Hasil konggres partai Baath Sosialis Arab pada bulan Juni 2005, menetapkan kebijakan penerapan sistem ekonomi pasar sosial (gabungan antara konsep ekonomi sosialis dan sistem ekonomi pasar/liberal kapitalis). Sejak reformasi ekonomi digulirkan dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi selama tahun 2006 mencapai 5 persen.⁸⁶

Suriah merupakan negara berkembang (middle-income) dengan pendapatan per kapita US\$.1.190. Struktur ekonomi Suriah berbasis pada sumber alam (perminyakan) dan sektor pertanian. Sektor perminyakan dengan produksi 404.000 barrel per hari telah menyumbangkan 50% dari GDP. Sumber alam

⁸³ Ibid, hal. 124

⁸⁴ Lembaga Pengkajian dan Penelitian WAMY, *Gerakan Keagamaan dan Pemikiran*, Jakarta: Penerbit Al I'tisham, 1993, hal. 50

⁸⁵ Ibid, hal.51

⁸⁶ http://kbridamaskus.org/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid, diakses pada tanggal 5 Mei 2009 pukul 17.45

lainnya adalah gas alam, fosfat, marmer, dan gypsum yang belum sepenuhnya dieksplorasi untuk tujuan ekspor.

Sektor pertanian, dengan produk andalan kapas, gandum, buah-buahan dan produk pertanian lainnya, di samping mampu menjamin swasembada pangan secara nasional, telah memberikan kontribusi 25% dari GDP dan menyerap 30% dari total angkatan kerja. Sedangkan sektor pariwisata, telah menjadi sektor pendukung penting dengan nilai investasi sebanyak US\$ 1,8 milyar dan tingkat kunjungan wisatawan mencapai 3,4 juta wisatawan pada tahun 2006.⁸⁷

Di sektor perdagangan luar negeri, Suriah tetap mengandalkan negara-negara di Kawasan Timur Tengah dan Turki sebagai mitra dagang tradisional utama, selain sejumlah negara Uni Eropa, terutama Jerman, Italia, Perancis, dan Inggris. Hubungan dagang dengan Rusia dan sejumlah negara Eropa Timur dalam beberapa tahun terakhir mengalami perkembangan pesat, terutama setelah Rusia menerapkan preferential element dan pengurangan bea masuk untuk produk-produk Suriah ke Rusia. Kebijakan ekonomi Suriah yang mulai mendekatkan diri ke Asia juga telah memacu transaksi dagang terutama dengan China, Jepang, Indonesia dan Malaysia.

Produk-produk impor Suriah mencakup mesin-mesin industri, peralatan transportasi dan komponen kendaraan, tekstil dan garmen, palm oil, dan barang-barang elektronik. Sedangkan produk andalan ekspor Suriah selain minyak mentah adalah kapas, tekstil, fosfat, dan produk pertanian.⁸⁸

Kebijakan ekonomi Suriah telah memacu arus masuk investasi asing, terutama dari negara-negara Arab senilai US\$ 7 milyar (2005) untuk 550 proyek dalam berbagai kegiatan bisnis dan pembangunan infrastruktur serta pariwisata. Nilai investasi ini melonjak dibandingkan dengan tahun 2004 yang hanya US\$ 4 milyar. Hingga saat ini, 70% dari nilai investasi Suriah berasal dari investor lokal, 24% dari negara-negara Arab dan hanya 6% berasal dari negara-negara non Arab.

⁸⁹

Suriah telah berhasil menurunkan beban utang luar negeri melalui rescheduling pembayaran. Pada tahun 2004, Polandia menyetujui Suriah

⁸⁷ Ibid

⁸⁸ Ibid.

⁸⁹ Ibid.

membayar sebesar US\$ 2.7 juta dari total US\$ 261,7 juta. Sementara pada awal tahun 2005, Rusia telah membebaskan utang Suriah berjumlah US\$ 13 milyar. Begitu pula Ceko dan Slovakia telah menghapus utang Suriah yang semula US\$ 1.6 milyar hanya menjadi US\$ 150 juta melalui sekali pembayaran. pada pertengahan Pebruari 2006 dalam rangka antisipasi terhadap tekanan politik AS, serta untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, Pemerintah Suriah mengambil kebijakan mengubah seluruh transaksi dalam dan luar negeri dari mata uang Dollar Amerika menjadi Euro. Hal ini dilakukan akibat sanksi embargo terhadap Suriah sejak akhir 2003 oleh Amerika Serikat melalui "Suriah Accountability Act", yang sangat mungkin akan menghambat dan memper-sulit integrasi ekonomi nasional dalam perkembangan ekonomi global.⁹⁰

4.5.5 Hubungan Suriah dengan negara-negara Timur Tengah

Posisi Suriah ditengah-tengah negara Arab yang lain ternyata sangat strategis, baik Eropa maupun Amerika ternyata sangat membutuhkan peran Suriah dalam mewujudkan perdamaian di kawasan. Dalam konteks perdamaian Palestina-Isarel, seperti George Mitchell, utusan AS untuk Timur Tengah ungkapkan, bahwa Amerika berharap kepada Suriah untuk meakukan pendekatan kepada kelompok fondamentalis Arab, seperti Hamas dan Hizbullah, dimana kedua front perjuangan muslim ini sangat menaruh kebencian kepada Israel. Dan Hizbullah selain kontra dengan Isreal, ia juga merupakan kekuatan oposisi kepada pemerintahan Lebanon. Searah dengan harapan tersebut Amerika yang merupakan sekutu dekat Israel akan membujuk Israel agar melakukan negosiasi dengan Suriah terkait dengan dataran tinggi Golan.

Langkah Amerika tersebut sebenarnya sama dengah apa yang dilakukan oleh Perancis kepada Suriah. Dalam berbagai pertemuan dengan Suriah, baik pada pertemuan Uni Meditarania, dialog tidak langsung dengan Israel, Perancis berusaha untuk memasukkan Suriah dalam lingkaran pengaruhnya, dan menggiring Suriah untuk menjadi perpanjangan tangan dari politik luar negeri Perancis di kawasan Timur Tengah.

⁹⁰ http://kbridamaskus.org/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid, diakses pada tanggal 5 Mei 2009 pukul 17.45

Harapan yang besar dunia barat kepada Suriah sangat beralasan. Karena Suriah merupakan negara yang memiliki kedekatan dengan kekuatan-kekuatan yang berseberangan dengan kebijakan barat. Suriah dekat dengan Hizbullah, dimana Hizbullah merupakan sekutu Suriah di Lebanon, dahulu dikenal sebagai milisi bersenjata, kini telah berubah menjadi kekuatan politik yang mendapat dukungan sebagian masyarakat sehingga Hizbullah memiliki keterwakilan di parlemen Lebanon.

Hizbullah adalah kelompok yang dibentuk oleh Sayyid Muhammad Hussein Fadhlalah. Gerakan ini sekarang dipimpin oleh Sayyid Hasan Nashrallah. Hizbullah adalah milisi Syiah Lebanon yang didirikan tahun 1982. Secara internal, Hizbullah berniat mendirikan negara Islam model Iran di Lebanon. Secara eksternal, Hizbullah juga memerangi pendudukan Israel atas wilayah selatan Lebanon juga untuk menghancurkan rezim zionis.⁹¹

Tahun 2000 Israel terpaksa meninggalkan Lebanon selatan untuk menghindari lebih banyak jatuh korban di pihaknya. Kehebatan Lebanon tak lepas dari bantuan Iran dan Suriah yang melatih anggota Hizbullah serta memasok senjata kepadanya. Tapi Hizbullah tidak hanya melakukan aktivitas militer. Mereka juga bergiat di bidang sosial dengan mendirikan klinik, sekolah, serta media massa untuk memberdayakan kaum Syiah yang selama ini merupakan golongan terbelakang. Kegiatan sosial mereka dan keberhasilan mengusir tentara Israel dari Lebanon, membuat Hizbullah diterima sebagian rakyat. Terbukti mereka mempunyai 12 wakil di parlemen hasil pemilu demokratis di antara total 128 anggota parlemen Lebanon.⁹²

Hal lain yang membuat Suriah menempati posisi kunci dalam usaha perdamaian Timur Tengah, adalah bertemunya kepentingan Suriah dengan Iran. Dimana keduanya sepakat bahwa orang-orang Yahudi Israel merupakan sumber dan pemicu seluruh permasalahan konflik di Timur Tengah. Bagi Iran, kaum Yahudi-lah pihak yang bertanggung jawab atas krisis nuklir Iran sekarang. Iran menganggap tekanan AS atas program nuklirnya yang sah menurut Pakta Non-

⁹¹ Sihbudi, M. Riza, 1993, *Menyandera Timur Tengah*, Bandung: Penerbit Mizan. Hal. 43-45

⁹² Alhadar, Smith. *Memotong Tangan Iran dan Suriah*, <http://forum.sumsel.com/showthread.php?t=944>, diakses pada tanggal 7 Juli 2009, pukul 20.00 WIB.

Proliferasi Nuklir (NPT) tak lepas dari lobi Yahudi atas permintaan pemerintah Israel. Padahal Israel diketahui telah memiliki sekitar 200-300 hulu ledak nuklir yang mengancam keamanan seluruh negara di Timur Tengah, termasuk Iran. Komitmen Iran serta dukungan bagi pendirian negara Palestina merdeka di seluruh tanah Palestina, termasuk teritori Israel sekarang, adalah motivasi lain Iran untuk mendukung Hizbullah, Hamas, serta kelompok Palestina lain yang menolak eksistensi Israel.⁹³

Bersama Iran, Suriah juga membantu Hizbullah serta kelompok-kelompok Palestina, termasuk Hamas, yang menolak mengakui eksistensi Israel. Sikap Suriah ini tak lepas dari permusuhannya dengan kaum Zionis. Dataran Tinggi Golan milik Suriah diduduki Israel sejak 1967. Wilayah strategis yang hanya berjarak sekitar 60 kilometer dari Damaskus, ibukota Suriah, dipandang sebagai titik vital yang selalu mengancam negara Suriah. Bagi Suriah, tak ada yang lebih menggembirakan selain mendapatkan kembali Dataran Tinggi Golan. Sehingga kesediaan Suriah untuk berdamai dengan Israel mensyaratkan negara Yahudi itu mengembalikan seluruh Golan, hal ini juga yang memotivasi Suriah untuk mendukung Hizbullah. Secara geopolitik, adanya pengaruh Suriah atas Lebanon akan memberi bobot militer lebih besar pada Suriah demi meningkatkan bargaining power-nya vis a vis Israel.⁹⁴

Dilihat dari dimensi politik, Iran dan Suriah merupakan dua negara penting dan berpengaruh di kawasan, memiliki pandangan kolektif mengenai berbagai masalah di kawasan. Para analis politik berkeyakinan bahwa lobi berkesinambungan dan sikap kolektif Tehran-Damaskus berperan menggagalkan konspirasi rezim Zionis Israel di kawasan. Menurut para pengamat, peningkatan kerjasama tersebut mengokohkan kinerja pengembangan hubungan regional, solidaritas dan persatuan negara-negara Islam dalam menghadapi ancaman global. Berdasarkan pandangan ini, hubungan Iran dan Suriah menyebabkan terjalinnya relasi strategis yang mempengaruhi sektor politik serta ekonomi dan meningkatkan hubungan antarnegara Islam.⁹⁵

⁹³ Ibid

⁹⁴ Ibid

⁹⁵ http://indonesian.irib.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=12771&Itemid=48, diakses pada tanggal 7 Juli 2009, pukul 20.00 WIB.

Di pertengahan tahun 2009 ini hubungan Suriah-Iran semakin bertambah baik. Pada pertemuan Komisi Eksekutif Kerjasama Ekonomi Iran –Suriah, kedua negara memprediksi hubungan keduanya akan mencapai tingkat yang tinggi. Karakteristik ini menyebabkan Iran dan Suriah akan mampu mencapai kemajuan di berbagai sektor ekonomi. Kini, Iran dan Suriah tengah menggarap proyek dan investasi kolektif senilai 11 milyar dolar yang tengah dikaji penerapannya. Selain itu, pejabat tinggi kedua negara juga menandatangani kerjasama operasional sekitar 40 proyek baru di berbagai bidang.⁹⁶

Adapun terkait dengan krisis Palestina, Menurut Presiden Bashar Al-Asad, ketegangan situasi di Timur tengah disebabkan oleh tiga faktor utama : (1) pendudukan Israel yang masih berlangsung atas wilayah-wilayah Suriah, Palesitina, dan Lebanon, (2) kemacetan proses perdamaian akibat tidak adanya kehendak baik dari pihak Israel, dan (3) tidak adanya keinginan keras dunia internasional untuk mewujudkan perdamaian di kawasan.⁹⁷

Dalam upaya mewujudkan stabilitas keamanan dan perdamaian yang langgeng di kawasan, Suriah menegaskan kesediaannya untuk kerjasama dengan seluruh masyarakat internasional dan menekankan pentingnya kerjasama yang kompak untuk menanggulangi situasi yang memburuk di Timur Tengah. Dalam kaitan ini, Suriah menginginkan untuk menjadi bagian dari penyelesaian konflik, bukan diposisikan sekedar sebagai unsur konflik, Suriah memandang perlunya penggunaan bahasa dialogis untuk membangun rasa saling percaya dalam menjalin hubungan internasional, bukan sikap yang memihak atau keras kepala. Suriah juga menyatakan tidak senang ikut campur dalam masalah internal negara lain.⁹⁸

Dalam pertemuan dengan PM Palestina ismail Haniyah 4 Desember 2006, PresidenAsad menegaskan dukungan penuh Suriah kepada perjuangan rakyat palestina untuk (1) membentuk negara merdeka denga Jerusalem sebagai ibu kota, (2) memperoleh hak kembali para pengungsi Palesitina, dan (3) mengakhiri boikot internasional terhadap Palesitina, Selain itu PresidenAsad menegaskan

⁹⁶ Ibid.

⁹⁷ Laporan kunjungan delegasi Komisi I DPR-RI ke negara suriah, pada tanggal 27 Oktober-3 November 2007.

⁹⁸ ibid

pentingnya keutuhan rakyat Palestina, khususnya dalam situasi genting yang sedang berlangsung. Sebagai wujud nyata dukungan tersebut, Suriah memberikan bantuan dana sebesar 17 juta dolar AS kepada pemerintah Palestina.⁹⁹

Masalah krisis Palestina sebenarnya menggiring semua semua Timur-Tengah untuk bersatu. Krisis Palestina juga memberikan efek kedekatan antara Suriah dengan Saudi dan negara-negara teluk lainnya, dimana dalam banyak hal sering tidak sejalan. Pada suatu wawancara antara Chanel *Alarabiya* dengan Menteri Luar Negeri Suriah Walid Al-Mu'allim pada hari Kamis 16 Agustus 2007 yang lalu disebutkan bahwa hubungan Suriah dan Saudi Arabia merupakan hubungan yang istimewa, bahwa Suriah siap bahu membahu dengan Saudi seandainya peperangan terjadi antara Arab-Israel.¹⁰⁰

4.5.6 Kebijakan luar Negeri Suriah pada masa pemerintahan Bashar Asad

Pada saat Bashar Asad menerima "warisan" kekuasaan dari ayahnya, Hafizh Asad, dalam percaturan politik kawasan, Suriah berada pada posisi yang sulit. Suriah mengalami dua transisi, transisi kepemimpinan dan sebuah transisi yang menghadapkan suriah kepada pilihan-pilihan sulit, misalnya apakah Suriah mau mengadakan hubungan diplomasi dengan Lebanon, membuka dialog langsung dengan Israel, dan bersikap tegas kepada kasus nuklir Iran, serta mengakhiri isolasi Amerika dan sekutunya di Timur Tengah. Menurut laporan kunjungan delegasi komisi I DPR-RI ke negara Suriah pada bulan Oktober-November 2007 yang lalu dilaporkan bahwa sejak Bashar Asad terpilih sebagai presiden Suriah yang baru, kebijaksanaan dasar politik luar negerinya masih tetap mempertahankan pada faham nasionalisme yang progresif, anti imperialisme dan zionisme serta diabdikan bagi kepentingan kebangkitan kembali bangsa Suriah khususnya dan bangsa-bangsa Arab umumnya yang bercita-cita menuju masyarakat modern yang menganut pola sosialis, bebas dari penguasaan Israel atas sebagian wilayah Arab.

Pilihan-pilihan sulit dalam peran politik Suriah di kawasan menuntut Suriah untuk berlaku fleksibel dalam segala urusan baik dalam negeri maupun luar negeri. Nampaknya semangat inilah yang membuat Suriah mau berdekat-

⁹⁹ ibid

¹⁰⁰ <http://www.erasmuslim.com/berita/dunia>, diakses pada tanggal 7 Juli 2009, pukul 20.00 WIB.

dekat dengan Perancis. Paling tidak fleksibilitas Bashar Asad telah membawanya melenggang diatas karpet merah Perancis menghadiri undangan presiden Perancis pada perayaan Bestil. Kunjungan tersebut membuahkan semakin dekatnya hubungan Perancis dan Suriah. Perbaikan hubungan dengan Perancis bagi Suriah dapat mengembalikan kepercayaan diri negara tersebut untuk kembali berperan aktif dalam percaturan politik kawasan. Ini merupakan prestasi diplomasi Bashar Asad, Suriah kembali masuk hitungan dan ia menyadari bahwa ini berkat fleksibilitas dalam politik luar negeri yang dijalankannya. Tetapi sejauh apa komitmen yang diberikan oleh Suriah dalam hubungan Suriah-Perancis masih merupakan misteri, tapi juga tidak berarti Suriah tidak memberikan komitmen apapun.

Diantara komitmen yang mulai diberikan Suriah adalah kesepakatannya dengan presiden Lebanon untuk penunjukan duta besar, dari Lebanon ke Suriah dan dari Suriah ke Lebanon pada 14 Agustus 2008, selain juga penandatanganan kerjasama Perancis dan Suriah dalam bidang ekonomi.¹⁰¹ Adapun hal-hal yang menyangkut perdamaian dengan Israel dan Nuklir Iran Suriah masih belum bergeming dari posisinya semula. Dalam masalah perdamaian dengan Israel, Suriah masih mempertahankan prasyarat dikembalikannya Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel sejak tahun 1967, bahkan Suriah menolak usulan Perancis untuk berdialog langsung dengan Israel.¹⁰²

Kemudian terkait dengan kasus nuklir Iran, pada kunjungan Bashar Asad ke Teheran bulan Agustus 2008 terungkap bahwa Suriah akan meningkatkan kerjasama ekonomii dengan Iran, juga mendukung hak Iran untuk mengayakan uranium. Tapi Bashar Asad menekankan bahwa Suriah menentang pengenalan senjata nuklir ke dalam kawasan Timur-Tengah.¹⁰³ Perjalanan politik luar negeri Suriah pada masa lampau juga menunjukkan, bahwa sulit untuk memprediksi kebijakan apa yang diambil oleh Suriah bagi kawasan, sehingga terkesan pragmatis, seperti kasus keterlibatan Suriah dalam perdamaian Lebanon, suatu saat ia sejalan dengan negara-negara Arab dan tiba-tiba berubah berpihak kepada

¹⁰¹<http://www.ambafrance-sy.org/spip.php?article1470>,
<http://www.zawya.com/Story.cfm/sidKUN0069090208171543/Suriah,%20France%20sign%20economic%20cooperation%20agreements/> diakses pada 6 Januari 2009 pukul 18.46 WIB

¹⁰² BESA Center Perspectives Papers No. 48, September 10, 2008.

¹⁰³ Ibid.

lawan (baca:Maronit), tetapi ia juga tidak menghendaki ada yang menang dalam konflik Lebanon.¹⁰⁴ hal ini semakin menunjukkan bahwa Suriah Masih menyimpan ambisi untuk mewujudkan Suriah raya. Secara garis besar politik luar negeri Suriah adalah anti imperialisme dan zionisme demi kepentingan kebangkitan kembali bangsa Suriah khususnya dan bangsa-bangsa Arab umumnya yang bercita-cita menuju masyarakat modern yang menganut pola sosialis, bebas dari penguasaan Israel. Demi mewujudkan stabilitas keamanan dan perdamaian yang langgeng di kawasan, Suriah menegaskan kesediaannya untuk kerjasama dengan seluruh masyarakat internasional dan menekankan pentingnya kerjasama yang kompak untuk menanggulangi situasi yang memburuk di Timur Tengah.

4.5.7 Prospek Hubungan Luar Negeri Perancis-Suriah

Tujuan politik luar negeri Perancis di Suriah selain untuk kepentingan ambisi internasional adalah juga untuk menjaga dan membentengi kepentingannya yang sedikit telah mapan di Lebanon, dengan diadikannya Suriah sebagai sekutu strategis oleh Perancis, Perancis akan merasa tenang dari “gangguan” Suriah di Lebanon. Selain itu berdasarkan pertimbangan geografi bahwa Suriah adalah negara yang strategis, ia menghubungkan tiga Benua, Asia, Afrika dan Eropa. Selain itu Suriah juga berhimpitan dengan negara-negara yang sedang mendapat perhatian dunia internasional karena masalah yang terjadi di negara-negara itu, sebut Palestina yang didalamnya menyimpan konflik akut antara orang-orang arab dan Israel, Irak yang sedang mengalami transisi dari kepemimpinan kaum Sunni ke Syi’ah, juga berdekatan dengan Iran yang polemik nuklirnya membelah dunia menjadi dua. Melalui Suriah yang memiliki hubungan baik dengan semua kekuatan yang ada disekelilingnya, Perancis dapat memainkan manuver politik yang dapat mempengaruhi negara-negara sekeliling Suriah demi kepentingan nasional Perancis yang ada di Timur Tengah.

Terkait kebijakan Perancis di Timur Tengah, Perancis sangat bersikap pragmatis, satu sisi ia ingin menguasai Timur Tengah sementara disisi lain ia tidak ingin berkonfrontasi dengan kekuatan-kekuatan lain, baik Islam ataupun Barat. Demi mencapai kepentingannya Perancis rela bersikap mendua, dalam

¹⁰⁴ Sihbudi, Reza, *Bara Timur Tengah*, Bandung: Penerbit MIZAN, 1991, hal.65-67.

kasus perdamaian antara Arab dan Israel, Perancis mengusulkan adanya perdamaian yang komprehensif dengan melibatkan semua pihak yang ada di Palestina, lalu disisi lain Perancis tidak berani membujuk Israel untuk memenuhi syarat Suriah, yaitu kembalinya Dataran Tinggi Golan ke Pangkuan Suriah sebagai syarat perdamaian antara Israel-Suriah. Dengan demikian sebenarnya ketika Perancis bekerjasama dengan Suriah masih dipengaruhi pola *win lose*, menang dipihak Perancis tapi kekalahan dipihak Suriah.

Adapun dari pihak Suriah, Kebijakan dasar politik luar negeri Suriah menganut paham nasionalisme progresif, anti imperialisme dan zionisme, yang diabdikan untuk kepentingan bangkitnya kembali bangsa Suriah pada khususnya dan bangsa-bangsa Arab pada umumnya. Politik luar negeri Suriah juga diarahkan untuk mencapai cita-cita menuju masyarakat modern yang menganut ajaran sosialis, bebas dari penguasaan penjajah/Israel yang oleh karena itu terutama Dataran Tinggi Golan (wilayah Suriah yang diduduki Israel sejak 1967) harus dikembalikan. Sikap Suriah terhadap permasalahan lain, seperti konflik antara antara Hamas dan Israel serta nuklir Iran jelas bertentangan dengan harapan Perancis, tetapi juga Suriah tidak bisa menolak keinginan Perancis agar Suriah mendukung penuh kedaulatan negara Lebanon. Disini Perancis berhasil membujuk Suriah untuk bekerjasama dengan Lebanon, suatu yang sebenarnya tidak diinginkan oleh Suriah.

Dalam rangkaian kerjasama Suriah-Lebanon, kedua negara setelah sepakat membuka kedutaan besar untuk masing-masing, kerjasama selanjutnya adalah bekerjasama dalam menghadapi Israel. Panglima Angkatan Bersenjata Suriah, Jenderal Ali Habib melakukan pembicaraan dengan Presiden Lebanon, Michel Suleiman, pada hari Selasa 12 Mei 2009 di Beirut. Pertemuan antara pejabat kedua negara itu menunjukkan makin membaiknya hubungan Suriah-Lebanon. Dalam pertemuan tersebut dibahas kerjasama militer antara Suriah dan Lebanon dan kerjasama dalam bidang intelejen. Suriah dan Lebanon sepakat bahwa Israel adalah musuh bersama mereka dan sedang merancang konspirasi di wilayah Suriah maupun Lebanon. dalam pernyataan bersama antara Presiden Lebanon dan panglima militer Suriah disebutkan bahwa militer kedua negara akan bekerjasama untuk melawan "skenario jahat Israel". Kerjasama saling tukar menukar informasi

intelejen juga akan dijalin untuk melawan aksi-aksi terorisme, mencegah penyelundupan di perbatasan kedua negara dan meningkatkan upaya pencarian puluhan tentara Lebanon yang tidak diketahui nasibnya pada masa perang antara pasukan Suriah dan Lebanon tahun 1990-an.¹⁰⁵

Dari sikap Suriah dalam kerjasama dengan Lebanon menunjukkan bahwa Suriah adalah negara yang bebas dalam mengambil kebijakan bagi negaranya, dimana pada titik tertentu Suriah berbeda posisi dengan Perancis. Dalam kasus hasil kesepakatan antara Suriah dan Lebanon, tentu kesepakatan tersebut tidak sejalan dengan harapan Perancis dibawah pimpinan Nikolas Sarkozy, orang yang notabene *atlantist*, pro Amerika dan Inggris. Dengan demikian masa depan hubungan antara Perancis dan Suriah akan mengalami hal-hal yang dilematis baik bagi Perancis maupun Suriah, sulit bagi keduanya untuk bersikap *win win*.



¹⁰⁵ <http://www.erasuslim.com/berita/dunia/suriah-lebanon-kerjasama-hadapi-skenario-jahat-israel.htm>, diakses pada tanggal 18 Juli 2009, pukul 09.30.

BAB V

Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Perancis sebagai salah satu kekuatan dunia pada masa pemerintahan Nikolas Sarkozy menginginkan sebuah kepemimpinan global yang baru. Dimana menurut Perancis hegemoni Amerika sudah tidak lagi mampu menciptakan kesejahteraan dan keamanan dimana penduduk dunia dapat hidup dengan harmonis. Untuk itu Perancis ingin tampil sebagai kekuatan baru yang dapat mengayomi seluruh penduduk dunia.

Ketika pengaruh Amerika menurun karena kegagalannya di berbagai misi di Timur Tengah, Perancis mendapatkan peluang untuk memulai langkahnya dengan berperan aktif menciptakan Timur Tengah yang aman dengan menyelesaikan berbagai permasalahan kawasan tersebut, mulai dari masalah pertentangan antara kelompok di Lebanon, konflik Israel-Palestina dan polemik nuklir Iran.

Langkah Perancis tersebut selain di latarbelakangi oleh ambisi internasionalnya, tentu kepentingan lain seperti ekonomi mewarnai langkah politik luar negeri Perancis. Langkah yang telah ditempuh oleh Perancis untuk memperkuat pengaruhnya di dunia internasional, Perancis memperkuat posisinya di kawasan Eropa dengan berusaha untuk menjadi dominan dalam memainkan perannya di Eropa, lalu ditopang dengan perannya dalam mendirikan Uni Mediterania yang mengumpulkan negara-negara Eropa dan Timur Tengah disekitar mediterania yang strategis. Lalu memerankan diri sebagai sebagai perekat dan mediator dalam penyelesaian masalah-masalah Timur-Tengah bersama dengan Turki dan Qatar.

Dalam usaha Perancis di Timur Tengah, Perancis mendapati bahwa negara Suriah merupakan kunci dan negara yang paling dapat "dimanfaatkan" oleh Perancis berdasarkan beberapa alasan strategis. *Pertama*, Suriah merupakan negara yang bebas dari pengaruh Amerika, dimana kemandirian sikap dalam berbagai masalah dapat diambil sebagai pilihan oleh negara ini. Ia juga bebas

dari pengaruh negara besar manapun di Eropa, hal itu tercermin dalam politik luar negeri Suriah.

Kedua, Suriah merupakan negara yang majemuk dari sisi keyakinan agama penduduknya, dimana satu kelompok dengan yang lainnya terus berusaha untuk mendominasi dan memperjuangkan ideologinya masing-masing, sehingga secara intern Suriah selalu terancam oleh api dalam sekam permusuhan antar warga, ditambah masih adanya kelompok-kelompok yang belum menerima sistem ba'ats yang sosialis sebagai sistem dalam bernegara. Disini pemimpin yang berkuasa di Suriah memerlukan dukungan dari luar. Perancis melihat ini sebagai peluang untuk masuk lebih jauh menanamkan pengaruhnya di Suriah, dimana pengaruh Perancis sebelumnya telah ada dalam negara tersebut, sehingga Suriah diharapkan menjadi kuda troya bagi Perancis.

Ketiga, kepemimpinan nasional Suriah. Suriah dibawah presiden Basyar Asad tidak sekuat kepemimpinan ayahnya, Hafizh Asad. Terbukti dibawah kepemimpinan Basyar Asad Perancis berhasil menggiring Suriah dan Lebanon untuk menandatangani kesepakatan pengiriman duta besar dari keduanya. Eksistensi Lebanon tanpa gangguan Suriah telah terwujud, dimana ini sangat berarti bagi peran Perancis di Lebanon.

Keempat, alasan ekonomi. Suriah sebagai negara berkembang akan banyak membangun infrastruktur dan sarana-sarana, mulai dari transportasi dan listrik. Selain itu Suriah seperti negara Timur Tengah lainnya pendapatannya sebagian besar dari minyak dan gas.

Sedangkan faktor-faktor yang mendorong Perancis untuk menjalin hubungan dengan Suriah disamping ambisi internasionalnya dengan memperkuat pengaruhnya di negara-negara Timur Tengah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan kepentingan nasional. Pada saat Perancis menuai kritik dalam penerapan *Laicitas* terutama dari kalangan Islam, Perancis berusaha membayarnya dengan menebar simpati kepada negara-negara yang berpenduduk mayoritas muslim, sekaligus meredam reaksi dari negara-negara lain yang bertujuan untuk menurunkan citra Perancis.

Dengan bekerjasama dengan Suriah Perancis ingin membuktikan model diplomasi yang sama sekali berbeda dengan model diplomasi unilateral yang Amerika terapkan di Timur Tengah. Karena menurut Perancis permasalahan di Timur Tengah hanya bisa diselesaikan dengan diplomasi multilateral.

Lalu bagaimana prospek hubungan Perancis dengan Suriah dimasa mendatang, melihat aksi dari Suriah yang belum semuanya sesuai dengan komitmen yang dikehendaki oleh Perancis, mengingat sulit bagi Suriah untuk memberikan loyalitas penuh bagi Perancis karena Suriah sendiri sangat sadar dengan posisinya, ditambah hubungan yang erat dengan negara-negara serta kelompok-kelompok yang selama ini berseberangan dengan kebijakan Perancis. Tapi disisi lain Suriah juga menerima berbagai kerjasama yang ditawarkan oleh Perancis. Disisi lain Perancis sendiri dalam kebijakannya tidak menunjukkan keberpihakan yang penuh kepada Suriah. Untuk itu sulit bagi keduanya untuk mempunyai kerjasama yang permanen, pesimisme ini diperkuat dengan adanya sikap pragmatisme dikedua belah pihak. Keduanya akan tergiring kepada dilema yang tak kesudahan, hingga salah satunya menanggalkan sikap pragmatisme.

5.2 Saran

Perancis yang sedang memperjuangkan ambisi internasionalnya seharusnya lebih akomodatif terhadap berbagai kepentingan, baik dalam negeri Perancis maupun kepentingan-kepentingan negara yang dapat dijadikan pendukung bagi tercapainya tujuan peran internasionalnya.

Seperti syarat yang diajukan oleh Suriah ketika ingin berdamai dengan Israel, tentang kembalinya dataran tinggi Golan seperti sebelum perang 1967, Perancis harus membuktikan diplomasi multilateralnya dengan turut melobi Israel agar menyetujui syarat yang diajukan oleh Suriah, juga terkait dengan nuklir Iran harusnya Perancis menyetujui nuklir untuk kepentingan damai oleh Iran, sehingga Suriah yang diharapkan membujuk Iran dapat tidak menyetujui pengayaan uranium untuk tujuan senjata dapat lebih tegas.

5.3 Saran untuk penelitian selanjutnya

Penelitian ini sangat terbatas dan tidak membahas seluruh sisi hubungan Perancis dan Suriah. Penelitian ini hanya membahas sekitar hubungan dalam bidang politik, meskipun hubungan ekonomi juga dibahas tetapi tidak mendetail dan spesifik, untuk penelitian selanjutnya kami menyarankan adanya penelitian yang spesifik dalam bidang ekonomi dalam hubungan Perancis-Suriah. Juga yang menyangkut perbedaan dan persamaan antara identitas politik Suriah dan Perancis.



Daftar Pustaka

BUKU

- 'Aqqad. Al, Sha'lah, 1992, *Al Masyriqul 'Arabil Mua'ashir: Dirasah Tarikhiyah Siyasiyah*. Maktabah Anjlew, Mesir.
- Alasdair Drysdale and Raymond E. Hinnebusch, , 1991, *Syria and the Middle East Peace Process* (New York: Council on Foreign Relations Press).
- Asmara. Puspita, A, *Republik Perancis* dalam jurnal *Kajian Wilayah Eropa*, vol.1 no.1-2006, hal. 73-109.
- Assiddiqie, Jimly, *Konstitusi Uni Eropa dan Masa Depan*, dalam jurnal *Kajian Wilayah Eropa*, vol.1 no.1-2007, hal. 5-14.
- Collins, Jhon M. 1973, *Grand Strategy: Principle and practices* (Maryland: Naval Institute Press).
- Coplin. William D., 1992, *Intreduction to International Politics, A Theoretical Overview* (Terjemahan M. Marbun), (Bandung,: CV. Sinar Baru,
- Donald E. Neurchelein, 1979, *The Concept of National Interest A Time for New Aproaches*, Orbit, Vol.23,
- Hershco. Tsilla, *Sarkozy in Syria: Discrepancies in French Mideast Policy*, dalam BESA Center Perspectives Papers No. 48, September 10, 2008.
- Holsti, K.J, 1992, *International Polititics A Framework for analysis*, sixth edition, (United State of America, Prentice-Hall, Ind.
- Hutabarat. Leonard, *Uni Eropa sebagai Superpower Geopilitik dan Masa Depan Aliansi Atlantik: Euro-gaullist versus Euroatlantist*, dalam *Jurnal Kajian Wilayah Eropa*, vol.II no.2-2006, hal. 26-38.
- Hutabarat. Leonard, *Pemili Presiden Perancis: Konservatif Vis-A'-Vis Sosialis*, dalam jurnal *Kajian Eropa*, Volume III no 2, tahun 2007, Hal. 51.
- Habib. Hasnan A, 1997, *kapita selekta: strategi dan Hubungan Internasional*, Centre for Strategic and Internasional studies (CSIS), Jakarta
- Jack ,C,Plano. and Roy Olton, 1973*The International Dictionary*, Holt Rinehart, Winston Inc, Western Michigan University, New York,
- Yin. Robert K, 1971*Studi kasus & desain metode*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004

- Khoury, Philip S. 1987, *Syria and the French Mandate: The Politics of Arab Nationalism, 1920-1945* (Princeton: Princeton University Press,)
- Kemp, Geoffrey dan Robert E Harkavy, 1997, *Strategic Geography and the Changing Middle East*, Washington: Carnegie Endowment for International Peace, Lembaga Pengkajian dan Penelitian WAMY, 1993, *Gerakan Keagamaan dan Pemikiran*, Jakarta: Penerbit Al I'tisham,
- Lexi. J. Moloeng, 1994, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya,
- Lenczowski, George, 1993, *Timur Tengah di Tengah Kancah Dunia*, Bandung : Sinar Baru
- Mohtar Mas' oed, 1990, *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*, (Jakarta, LP3ES,)
- Perthes, 1994, *The Political Economy of Syria* and Nabil Sukkar, "The Crisis of 1986 and Syria's Plan for Reform" in Eberhard Kienle, ed., *Contemporary Syria: Liberalization Between Cold War and Cold Peace* (New York: St. Martins Press,).
- Patrick Seale, 1989, *Asad: The Struggle for the Middle East* (Berkeley: University of California Press).
- Sihbudi, M. Riza, 1991, *Bara Timur Tengah*, , Bandung: MIZAN
- Sihbudi dkk, Riza 1995, *Profil Negara-Negara Timur Tengah*, Jakarta: Pustaka Jaya,
- Suprpto, R, 1997, *Hubungan Internasional: system, ineraksi dan perilaku*, PT. Raja Grafindo, Jakarta,
- Taylor, Alan R., *Pergeseran-Pergeseran Aliansi dalam Sistem Perimbangan Kekuatan Arab*, Amarpress, 1990
- Weiner. Myron, *Political Partisipation: Crisis of the Political process*, New York: Princeton University Press,
- Wolfers, Arnold., 1962, *Perpecahan dan Kolaborasi: Essay Politik Internasional*. Baltimore: The Johns Hopkins Press,

WEBSITE

<http://www.bp.com/statisticalreview>

<http://www.bambooweb.com/articles/G/a/Gaullist.html>,

<http://www.encyclopedia.com/doc/1O46-Gaullism.html>

<http://www.nytimes.com/2007/06/05/world/europe/05france.html? r=1>

http://en.wikipedia.org/wiki/France%E2%80%93Suriah_relations

www.hidayatullah.com

<http://www.zawya.com/Story.cfm/sidKUN0069090208171543/Suriah,%20France>

[%20sign%20economic%20cooperation%20agreements/](http://www.zawya.com/Story.cfm/sidKUN0069090208171543/Suriah,%20France%20sign%20economic%20cooperation%20agreements/)

http://www.discoverfrance.net/France/DF_peple.shtml

www.detikislam.com

<http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4092940,00.html>

<http://en.wikipedia.org>

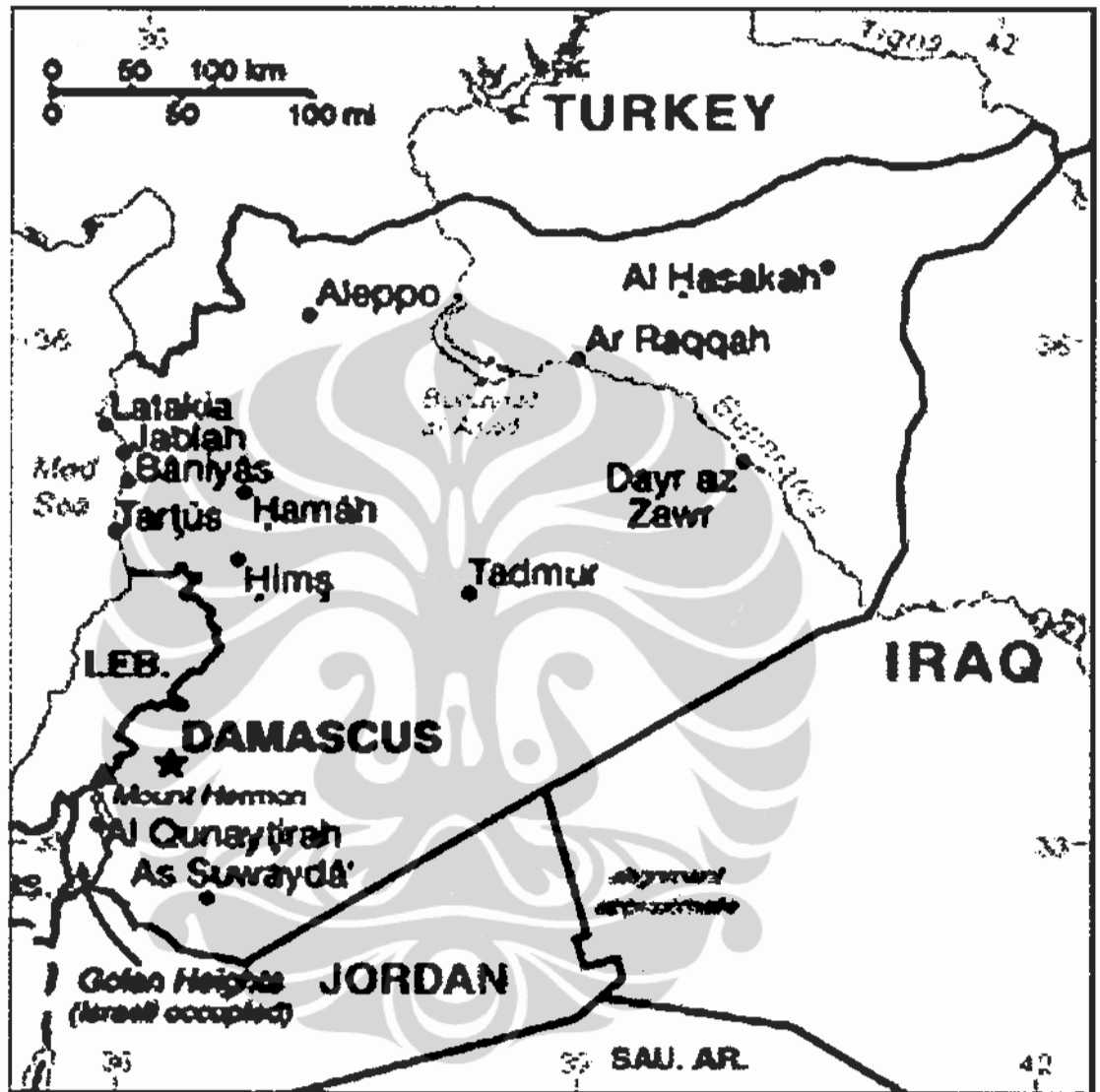
<http://www.ecfr.eu/page/-/documents/Torresblanca-Sarkozy-Foreign-Policy.pdf>,

<http://www.infoplease.com/ipa/A0108016.html>

http://kbridamaskus.org/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid.

Daftar lampiran

Lampiran I Peta Negara Suriah



Lampiran 2

Oil: Proved reserves

Oil: Proved reserves	at end 1988 Thousand million barrels	at end 1998 Thousand million barrels	at end 2007 Thousand million barrels	Thousand million tonnes	at end 2008 Thousand million barrels	Share of total	R/P ratio
US	35.1	28.6	30.5	3.7	30.5	2.4%	12.4
Canada	11.9	15.1	28.6	4.4	28.6	2.3%	24.1
Mexico	53.0	21.6	12.2	1.6	11.9	0.9%	10.3
Total North America	100.0	65.3	71.3	9.7	70.9	5.6%	14.8
Argentina	2.3	2.8	2.6	0.4	2.6	0.2%	10.5
Brazil	2.8	7.4	12.6	1.7	12.6	1.0%	18.2
Colombia	2.1	2.5	1.5	0.2	1.4	0.1%	6.0
Ecuador	1.5	4.1	4.0	0.5	3.8	0.3%	20.3
Peru	0.9	0.9	1.1	0.2	1.1	0.1%	25.5
Trinidad & Tobago	0.6	0.7	0.9	0.1	0.8	0.1%	15.2
Venezuela	58.5	76.1	99.4	14.3	99.4	7.8%	*
Other S. & Cent. America	0.6	1.1	1.4	0.2	1.4	0.1%	27.7
Total S. & Cent. America	69.2	95.6	123.5	17.6	123.2	9.8%	50.3
Azerbaijan	n/a	n/a	7.0	1.0	7.0	0.6%	20.9
Denmark	0.5	0.9	1.1	0.1	0.8	0.1%	7.7
Italy	0.8	0.8	0.9	0.1	0.8	0.1%	21.1
Kazakhstan	n/a	n/a	39.8	5.3	39.8	3.2%	70.0
Norway	7.3	11.7	8.2	0.9	7.5	0.6%	8.3
Romania	1.2	1.2	0.5	0.1	0.5	*	13.3
Russian Federation	n/a	n/a	80.4	10.8	79.0	6.3%	21.8
Turkmenistan	n/a	n/a	0.6	0.1	0.6	*	8.0
United Kingdom	4.3	5.1	3.4	0.5	3.4	0.3%	6.0
Uzbekistan	n/a	n/a	0.6	0.1	0.6	*	14.6
Other Europe & Eurasia	63.2	2.1	2.1	0.3	2.1	0.2%	13.4
Total Europe & Eurasia	77.3	104.9	144.6	19.2	142.2	11.3%	22.1
Iran	92.9	93.7	138.2	18.9	137.6	10.9%	86.9
Iraq	100.0	112.5	115.0	15.5	115.0	9.1%	*
Kuwait	94.5	96.5	101.5	14.0	101.5	8.1%	99.6
Oman	4.1	5.4	5.6	0.8	5.6	0.4%	20.9
Qatar	4.5	12.5	27.4	2.9	27.3	2.2%	54.1
Saudi Arabia	255.0	261.5	264.2	36.3	264.1	21.0%	66.5
Syria	1.8	2.3	2.5	0.3	2.5	0.2%	17.2
United Arab Emirates	98.1	97.8	97.8	13.0	97.8	7.8%	89.7
Yemen	2.0	1.9	2.7	0.3	2.7	0.2%	23.9
Other Middle East	0.1	0.2	0.1	^	0.1	*	10.6
Total Middle East	653.0	684.3	755.0	102.0	754.1	69.9%	78.6
Algeria	9.2	11.3	12.2	1.5	12.2	1.0%	16.7
Angola	2.0	4.0	13.5	1.8	13.5	1.1%	19.7

Chad	-	-	0.9	0.1	0.9	0.1%	19.4
Rep. of Congo	0.8	1.7	1.9	0.3	1.9	0.2%	21.3
Egypt	4.3	3.8	4.1	0.6	4.3	0.3%	16.4
Equatorial Guinea	-	0.6	1.7	0.2	1.7	0.1%	12.9
Gabon	0.9	2.6	3.2	0.4	3.2	0.3%	37.0
Libya	22.8	29.5	43.7	5.7	43.7	3.5%	64.6
Nigeria	16.0	22.5	36.2	4.9	36.2	2.9%	45.6
Sudan	0.3	0.3	6.7	0.9	6.7	0.5%	38.1
Tunisia	1.8	0.3	0.6	0.1	0.6	*	18.5
Other Africa	1.0	0.7	0.6	0.1	0.6	*	12.0
Total Africa	59.0	77.2	125.3	16.6	125.6	10.0%	33.4
Australia	3.4	4.1	4.2	0.5	4.2	0.3%	20.4
Brunei	1.2	1.0	1.1	0.1	1.1	0.1%	16.9
China	17.3	17.4	16.1	2.1	15.5	1.2%	11.1
India	4.5	5.4	5.5	0.8	5.8	0.5%	20.7
Indonesia	9.0	5.1	4.0	0.5	3.7	0.3%	10.2
Malaysia	3.4	4.7	5.5	0.7	5.5	0.4%	19.8
Thailand	0.1	0.4	0.5	0.1	0.5	*	3.9
Vietnam	0.1	1.9	3.4	0.6	4.7	0.4%	40.8
Other Asia Pacific	1.0	1.3	1.1	0.1	1.1	0.1%	12.8
Total Asia Pacific	39.9	41.3	41.3	5.6	42.0	3.3%	14.5
Total World	998.4	1068.5	1261.0	170.8	1258.0	100.0%	42.0

Sumber: <http://www.bp.com/statisticalreview>

Lampiran 3

Fifteenth Ambassadors' Conference Speech by M. Nicolas Sarkozy, President of the Republic V Paris, 27 August 2007

Prime Minister,
President of the Senate,
President of the National Assembly,
Minister of Foreign and European Affairs,
Ministers,
Members of Parliament,
Ambassadors,
Ladies and gentlemen,

The international debate is not abstract. The international debate is not remote. The threats we face today – terrorism, proliferation, crime – know no borders; changes in the environment and in the world economy affect our everyday lives; human rights are violated before our eyes. Guided by our values, our foreign policy must be based on a clear vision of the world and of the interests we defend. Our foreign policy is a reflection of our identity as a nation.

Yet the French are worried about the state of the world, the role of Europe and the place of France. They welcomed, with hope, the fall of the Berlin wall and the collapse of the unjust order of Yalta; progress in human rights and democracy; the promises of globalization that since 1990 has doubled world GDP and raised the average standard of living by 50%.

They see, today, that in contrast to the period following the Second World War, the leaders of the last 20 years have not succeeded in creating a new world order or even in effectively adjusting the old one. Leaving aside rare moments of unity such as the first Gulf War and 11 September 2001, a general and understandable feeling of division and loss of control predominates in a world that is both global and fragmented, a world of uncontrolled interdependence.

While States remain at the heart of the international system, their ability to act is now coming up against the power of economic players, the power of the media, and, worse, the power of terrorist and criminal networks. They are also confronted with the risks of the early twenty-first century: migratory flows that are less and less well controlled; a disruption of the world economic balance, which is accentuating misgivings over globalization as, bit by bit, offshore relocation begins to affect all sectors of activity; and financial crises such as the one we have just experienced and which could recur if the leaders of the major countries fail to take resolute concerted action to foster transparency and the regulation of international markets. One may support the market economy and competition, and still demand transparency so that creators of wealth aren't made to pay by

speculators. The system I believe in is one that fosters the creation of wealth, not speculation. We lack transparency. We are lacking in regulation and we are lacking in consultation. The question is not whether we can act. The one certainty is that we must act, because otherwise we will find ourselves facing other catastrophes, other crises through the fault of a minority that feels it can enrich itself without creating wealth. That's a real insult to creators worldwide.

In international crises such as the one in Iraq, it is now clear that the unilateral use of force leads to failure, but the multilateral institutions – both universal, such as the UN and regional, such as NATO – are finding it difficult to prove their effectiveness, from Darfur to Afghanistan.

In Europe itself, pressing questions are being asked, especially in the wake of the latest enlargement: where are the Union's borders? Should the Union have borders? Are further enlargements compatible with the continuation of integration, which must go forward? More broadly, is Europe not now transmitting the excesses of globalization instead of buffering its impact, as it should be, and enabling our peoples to seize the opportunities globalization offers?

Against this backdrop of apprehensiveness and disillusionment, the French are asking themselves what France can do to address the main challenges facing the world at the start of the twenty-first century. I see three such challenges, on which everything else depends:

The first challenge, and no doubt one of the most important: how to prevent a confrontation between Islam and the West. There's no point in waffling: this confrontation is being called for by extremist groups such as al-Qaida that dream of establishing a caliphate from Indonesia to Nigeria, rejecting all openness, all modernity, every hint of diversity. If these forces were to achieve their sinister objective, it is certain that the twenty-first century would be even worse than the last one, itself marked by merciless confrontation between ideologies.

The second challenge: how to integrate emerging giants such as China, India and Brazil into the new global order? They are driving world growth, but I would like to tell them, in a spirit of friendship, that they are also creating serious imbalances. They are the giants of tomorrow and, understandably, want their new status to be recognized, but they must hear reason from a friend: if you want the status of a great power, you must be willing to comply with the rules, which are in the interest of all countries.

The third challenge: how to cope with the major issues that our generation has been the first in human history to identify scientifically and be able to address globally – issues such as climate change, new pandemics and long-term energy supplies.

FRANCE-WORLD ROLE

Let me give you my answer to these questions on behalf of France, and let me start by giving you my approach to the international issues.

Ambassadors, ladies and gentlemen, I believe that the mark of a statesman is determination to change the course of events, not just to describe them, and not simply to explain them. To do this, it is necessary to have unshakeable determination; it is also necessary to persuade others to share dreams, ambitions and objectives. A politician must have ambitions, dreams and objectives.

I believe that France has much to offer the world because its population is among the most dynamic and best educated, its economy is among the strongest, and its diplomatic corps and armed forces are among the best. But our country is not the only one to have such advantages and it will retain them only if it succeeds in carrying out a large number of ambitious reforms. I proposed these reforms to the French people. As the Prime Minister put it so well, they will all be carried out resolutely, in a concerted and open approach.

I also believe that France is great and that its voice is heard when it is united in support of a vision backed by determination. The French elected me on the basis of a clear and detailed platform. They want a President who takes action and gets results. This is true in domestic policy. It is true in foreign policy. And indeed these two aspects of the action I propose to take are inseparable: France has no more vested right to its international status than any other nation; its message to the world will continue to be heard only if it is the message of an ambitious and confident people, a society reconciled with itself and an economy that is performing well. The domestic reforms that I intend to carry out in order to restore to the French their faith in the future, to modernize the economy and to adapt our institutions are part of my vision of France in the world. I want France to be stronger at home because only then will it have influence beyond our borders. And in that our project is fully consistent. How can France's message be credible in the world if what's happening in France domestically is the opposite of what it's recommending to other countries?

I believe that there can be no strong France without Europe, just as there can be no powerful Europe without France.

I believe that the emergence of a strong Europe as a major player on the international scene can make a decisive contribution to the construction of the just, more efficient world order that our peoples are calling for.

I believe that the friendship between the United States and France is as important today as it has been over the last two centuries. Allied does not mean aligned and I feel entirely free to express our agreements and our disagreements forthrightly and candidly – precisely because I fully embrace the fact that France is a friend and an ally of the United States. I believe that the ancient bonds of all kinds that unite us with the peoples of the Mediterranean and, beyond it, of Africa are an asset and an opportunity, provided we have the ambition and the determination to organize them, breaking once and for all with longstanding practices.

I believe that our language is at the heart of our identity, that French is part of our soul; that Francophony is of strong benefit to all those who share the French language.

And last but not least, I believe that France continues to bear a message and stand for values that resonate throughout the world – the values of the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen, of humanism and also, more recently, of humanitarian values and the duty to protect, epitomized by men like Bernard Kouchner, whom I was happy to welcome into the government and place in charge of our diplomacy.

EU SIMPLIFIED TREATY

Ambassadors, ladies and gentlemen

The construction of Europe remains an absolute priority for France. Pembangunan Eropa masih merupakan prioritas mutlak untuk Prancis. Without Europe, France would not be able to provide an effective response to the challenges of our time.

This is why I was determined, as a matter of highest priority, to restart Europe by proposing the simplified treaty. Success was hardly a foregone conclusion; it was achieved thanks to a perfect understanding between France and Germany. I would like to pay special tribute to Angela Merkel. Success also owes much to the Commission and to its most outstanding President, Mr Barroso. It would in fact be somewhat contradictory for France to have more weight in Europe while not wishing to find common ground with such strong European institutions as the Commission and the European Parliament. How can we act in Europe if our objective is to oppose the Commission or to oppose the European Parliament? We would be doomed to fail. In the adoption of the simplified treaty – and Bernard Kouchner and Jean-Pierre Jouyet will confirm this – the President of the Commission has been a crucial ally. In fact, the good will of everyone came together on this issue, since we had proposed a scenario for overcoming the crisis that was sufficiently clear and unifying. This is a lesson for the future

My wish is that the Portuguese Presidency, in which I have full confidence, will complete its work by the time of the European Council meeting in October, so as to enable the new treaty to enter into force before the European elections in the spring of 2009. The Prime Minister and I will make sure, in this case, that France is one of the first countries to be asked, via its Parliament, to ratify the treaty. Frankly I would rather see France be the first to ratify than for France to be isolated by its refusal.

Now that Europe has overcome the decade-long stalemate in work on the institutions, the time has come to address the future of the European project. I call on the 27 to create a Committee of Wise Men by the end of this year, made up of ten to twelve members at very high level, similar to the committees chaired by Werner, Davignon and Westendorp and the Delors Committee, to address this simple but no less crucial question: “What kind of Europe should we have in

2020-2030 and what should its missions be?" The wise men should submit their conclusions and proposals before the European elections of June 2009, so that the newly elected Parliament and the next Commission will have the results of its work in addition to the simplified treaty and the work on renewal of the Union's policies and financial framework.

If the 27 undertake this crucial discussion about the future of our Union, France will not object to new chapters in the negotiations between the Union and Turkey being opened in the coming months and years, provided these chapters are compatible with both possible visions of the future of their relations: either accession, or a very close association that stops short of accession. I'm not going to be hypocritical. Everyone knows that I'm only in favour of association. It's what I advocated throughout my election campaign. It's an idea I've championed for years. I think this idea of association will one day be recognized by everyone as the more reasonable one. Meanwhile, like Prime Minister Erdogan, I hope that Turkey and France will restore the special relations they established over a long shared history.

I didn't want to raise this issue before that of the simplified treaty, because it would have created a total deadlock. You can't resolve problems by creating a total deadlock. You resolve them by finding solutions. Of the 35 chapters that remain to be opened, 30 are compatible with association. Five are compatible only with accession. I told the Turkish Prime Minister: let's deal with the thirty that are compatible with association and then we'll see.

I think this is a solution that doesn't betray the wishes of the French and that, at the same time, gives Turkey hope. Obviously, if this compromise formula is rejected, I would simply remind you that we need unanimity in order to continue the discussions.

FRENCH EU PRESIDENCY

The French Presidency of the Union, which is only ten months away, must now fully mobilize our energies. To ensure its success, we must take a collective approach and be attentive to the views of all our partners. Either I or the Prime Minister will be visiting each of the EU capitals before 1 July. We will of course have priorities to suggest as ways of taking Europe forward. I see three of them. Europe must have an immigration policy. Europe must have an energy policy. And Europe must have an environmental policy. If we want the people of Europe to love Europe once again, Europe must have an impact on daily life – on immigration, energy and the environment.

DEFENCE EUROPE/SAINT MALO/NATO/"ARMAMENTS EUROPE"

I should like today to focus on the issue of European Defence. Nearly ten years after the Saint Malo Agreement, the time has now come to give it a new impetus.

What has been achieved over recent years is far from negligible, since the Union has conducted some fifteen operations on our continent, in Africa, in the Middle East and in Asia. These operations demonstrate, if proof were needed, that there is no competition between NATO and the Union and that the two indeed complement each other. As we have to cope with an increasing number of crises, there is not an excess but rather a shortage of capabilities in Europe

I hope that the Europeans will fully shoulder their responsibility and assume their role in the service of their own security and that of the world. To do this we need to reinforce our ability to plan and conduct operations; to develop an Armaments Europe with new weapons programmes and to streamline the existing ones; to ensure the interoperability of our forces; and we must ensure that all in Europe have a stake in its common security. We cannot continue with four countries paying for the security of all the others. But beyond instruments, we also need a common vision. What are the threats facing Europe and with what means should we respond to them? We must work together to set out a new European Security Strategy. We could approve this new text under the French presidency in 2008. Our White Paper on national defence and security, drawn up by Hervé Morin, can serve as France's contribution to this absolutely necessary work.

In this European endeavour, France and Germany have paved the way with the French-German Brigade, followed by the Eurocorps. In Saint Malo, France and the United Kingdom continued this construction, as is natural, since together our two defence budgets amount to two-thirds of the total defence budgets of the other 25 members of the Union and since our defence research budgets are twice the size of theirs. Incidentally, when we judge the deficits of the various parties, I'd like it to be remembered that the second-largest part of France's national budget goes to defence. But I'm not convinced that France would be able to play its role if it economized on this sector. Italy, Spain, Poland, the Netherlands and all our other partners are called upon to take part in this common effort, which will enable us to make the most of our assets. The Union has the full range of capabilities needed to address a crisis: military, humanitarian and financial. It must gradually assert itself as a leading peace and security player in the world, in cooperation with the United Nations, the Atlantic Alliance and the African Union. It should also be determined to initiate a genuine policy of cooperation and support with third countries – particularly in Africa – in the area of security.

EUROPEAN DEFENCE/NATO/KOSOVO

Let me mention a subject that has long been taboo. The decisive progress made by European Defence, which I wholeheartedly support, is in absolutely no way in competition with NATO. This Atlantic Alliance, I need not remind you, is ours: we founded it and we are one of its major contributors today. Of its 26 members, 21 also belong to the EU. It makes no sense to contrast the Union and NATO because we need both. More than that: I am convinced that it is in the vested interest of the United States for the European Union to assemble its forces, streamline its capabilities, and independently organize its own defence. We must go forward pragmatically and at the same time with ambition, without ideological

bias, with security being our sole obsession. The two movements complement each other. I hope that in the coming months we will move forward toward a strengthening of European Defence and the renovation of NATO, and thus its relationship with France. The two go hand in hand: an independent European Defence and an Atlantic organization in which we play a full role. This is in fact already happening on the ground: in Afghanistan, under UN mandate, the NATO force has been led by the Union's Eurocorps, commanded by a French general.

Kosovo is another illustration of the way in which the EU and NATO complement each other since the two cooperate closely under UN mandate. This cooperation will take on crucial importance in the coming months. At France's initiative, the Contact Group is continuing its efforts to restart the dialogue between Serbs and Kosovars. We support the principle of independence overseen by the international community and supported by the European Union, in which the rights of minorities will be guaranteed. I wish today to issue a three-part appeal: to the Serbs and the Kosovars to show realism and engage in good faith in this last effort to arrive at a mutually accepted solution; to the Russians and the Americans to understand that this very difficult issue is first and foremost a European one; and to the Europeans to show unity, since it is the EU countries that will have to take on most of the responsibility and thus the costs, and since it is in fact in the EU that the Balkans' long-term future lies.

EU INSTITUTIONAL REFORM

Ambassadors, ladies and gentlemen,

The EU will soon have efficient institutions, a stable president of the European Council, a high representative in charge of foreign policy, and a genuine European diplomatic corps. This will put it in a better position to assert on the world stage the vision and values that we share. For France, Europe must emerge as a global policy player. Allow me to return to the three challenges of the twenty-first century.

TERRORISM/AFGHANISTAN RECONSTRUCTION/CLASH OF CIVILIZATIONS

The threat of confrontation between Islam and the West is the first challenge. We would be wrong to underestimate such a possibility: the affair of the newspaper cartoons was a forewarning. Our countries – all our countries including those of the Muslim world – are now under threat of criminal attack similar to the attacks on New York, Bali, Madrid, Bombay, Istanbul, London and Casablanca. Think of what would happen tomorrow if terrorists were to use nuclear, biological or chemical materials. The first duty of our States is to organize comprehensive cooperation among the security services of all the countries concerned.

Our duty, the duty of the Atlantic Alliance, is also to step up our efforts in Afghanistan. With Bernard Kouchner and the Prime Minister, I have decided to strengthen the presence of our trainers in the Afghan Army, since it is that army

that must, first and foremost, wage and win the fight against the Taliban. I have decided to step up our support for reconstruction, since there will be no lasting success if the Afghan people do not reap the tangible benefits of a return to security and peace. Nor will there be success in the fight against drugs. The time has probably come to appoint, under the authority of President Karzai, a leading public figure able to ensure better coordination between military action and civilian initiatives.

But our action in Afghanistan would be in vain if, on the other side of the border, Pakistan were to remain the refuge of the Taliban and al-Qaida, and then perhaps become their victim. I am convinced that a more determined policy on the part of all the Pakistani authorities is possible and is in their long-term interest. We are of course prepared to help them.

Preventing a confrontation between Islam and the West also requires that we encourage and help the forces of moderation and modernity in each Muslim country to enable an open and tolerant Islam – an Islam that accepts diversity as an enrichment – to prevail. In this area there is no miracle solution, no panacea. But developments in such countries as Morocco, Algeria, Tunisia, Jordan and Indonesia show that despite major differences, there is a movement in societies, encouraged by governments. I call on our cooperation to strengthen programmes focused on openness and dialogue among societies, in conjunction – why not – with representatives of Islam in France.

Preventing a confrontation between Islam and the West also involves helping – as France is proposing – the Muslim countries to gain access to the energy of the future, nuclear power, in compliance with the treaties and in full cooperation with the countries that have already mastered this technology. Go explain to a billion Muslims worldwide that they aren't entitled to civilian nuclear energy once they no longer have oil and gas; that they aren't entitled to the energy of the future; then we will be creating conditions for poverty, underdevelopment, and consequently, the explosion of terrorism.

Preventing a confrontation between Islam and the West entails, last but not least, dealing with the crises in the Middle East. Just five years ago, there was only one crisis in the region. Within five years, that number has grown to four, all very different, of course, but increasingly interconnected.

ISRAELI-PALESTINIAN CONFLICT/CREATION OF PALESTINIAN STATE

Everything has been said about the Israeli-Palestinian conflict and much has been attempted. The paradox of the situation is that we know what its solution will be: two States – and as far as I'm concerned I'd like to add: two Nation-States – living side by side in peace and security within secure and recognized borders. We know the detailed content of this solution through the Clinton Parameters and the legacy of Taba. We have an idea of how far we have to go: the Roadmap, which must certainly be revisited. Last but not least, we know the sponsors of peace: the members of the Quartet, now represented by a man of the first rank, Tony Blair,

and the moderate Arab countries. Last but not least, Yet even though we know all this, everyone has the hopeless feeling that peace is no closer. We know what has to be done, we know who must do it, and yet it is stagnating.

Worse: we sometimes get the feeling that it is losing ground in hearts and minds. I have the reputation of being a friend of Israel and so I am. I will never compromise when it comes to Israel's security. But all the leaders of the Arab countries, starting with President Mahmoud Abbas – many of whom have come to Paris since my election – are aware of my feelings of friendship and respect for their peoples. This friendship enables me to say to the Israeli and Palestinian leaders that France is determined to take or support any useful initiative. But France has one conviction: peace will be negotiated first and foremost between the Israelis and the Palestinians. In the immediate future, our efforts – those of the Quartet and the moderate Arab countries – must be focused on rebuilding the Palestinian Authority under the authority of its President. But it is equally indispensable to revive, without delay, a genuine momentum for peace leading to the creation of a Palestinian State. If the parties and the international community again sidestep this goal, the creation of a "Hamastan" in the Gaza Strip may later prove in hindsight to have been the first step in a radical Islamist takeover of all the Palestinian territories. France is not resigning itself to that.

LEBANON

Lebanon has for centuries had a place in the hearts of the French. Lebanon telah selama berabad-abad memiliki tempat di hati dari Perancis. This friendship is not directed at one group or one clan: France is the friend of all the Lebanese without exception, because France is passionately committed to the full freedom, full independence and full sovereignty of Lebanon as demanded in Security Council Resolutions 1559 and 1701. It is this friendship that encouraged Bernard Kouchner to convene all the political players to La Celle Saint Cloud and then to meet with them in Beirut. The dialogue resumed there must continue with the goal of arriving at a positive solution to the crisis: a president elected on schedule, in accordance with the Constitution, with whom all Lebanese can identify and who is able to work with everyone – domestically with all the communities and abroad with Lebanon's major partners. All the regional players, including Syria, must take action to foster such a solution. If Damascus makes a move in this direction, the conditions for a French-Syrian dialogue would be established. Otherwise, they would not be.

IRAQ

We cannot remain indifferent to the tragedy of Iraq. Thanks to Jacques Chirac, France was and remains hostile to this war. That history has proved us right does not absolve us of the need to assess the consequences. What are these consequences? A nation that is falling apart in a merciless civil war; a confrontation between Shia and Sunni Muslims that has the potential to touch off a conflagration in the entire Middle East; terrorist groups setting up permanent

bases, gaining experience before attacking new targets across the entire world; a world economy vulnerable to the slightest spark in the oilfields.

The only possible solution is a political solution. This political solution involves marginalizing extremist groups and undertaking a sincere national reconciliation process, at the end of which each segment of Iraqi society, every Iraqi, must be assured of fair access to the institutions and resources of his or her country; it also involves the definition of a clear prospect for the withdrawal of foreign troops. It is the expected decision on this issue that will force all the players to take the measure of their responsibilities and act in consequence. Then and only then can the international community, starting with the countries of the region, be able to act to best effect. France for its part is prepared to do so. This is the message, a message of solidarity and availability, that Bernard Kouchner has just conveyed to Baghdad. He was right to visit Baghdad, and he conducted this trip in a remarkable fashion.

IRAN/NUCLEAR ISSUE

The fourth crisis, which touches on the other three, is Iran. France maintains a forthright dialogue with the leaders of that country, which has proven useful on several occasions. Together with Germany and the United Kingdom, France has taken the initiative of negotiations in which Europe, joined by the United States, Russia and China, plays a major role. The parameters are known; I will not go through them except to reiterate that an Iran with nuclear weapons is unacceptable to me and to stress France's full determination in the current process, which combines increasing sanctions but also openness if Iran chooses to honour its obligations. This approach is the only one that can keep us from facing a disastrous alternative: an Iranian bomb or the bombing of Iran. This fourth crisis is no doubt the most serious weighing on the international order today.

The solutions that are gradually emerging from the other "six-party" talks, which have resulted in North Korea's agreeing to forgo a military nuclear programme and to shut down the reactor under IAEA supervision, demonstrate – following Libya's renunciation of weapons of mass destruction – that where there is a will there is a way. The Iranian people, a great people deserving of respect, aspires to neither isolation nor confrontation. France will spare no effort to convince Iran that it has much to gain by engaging in serious negotiations with the Europeans, the Chinese, the Russians and of course the Americans.

MEDITERRANEAN UNION

Within a specific but highly emblematic area I have endeavoured to respond to the risk of confrontation between Islam and the West: I refer to the plan for a Mediterranean Union.

Just as the history of Europe is made up of centuries of hostility and war, the history of the peoples of the Mediterranean is made up of conquest and invasion. As in Europe, very strong bonds have been forged and our cultures have mutually

enriched each other, sometimes even crossbred. This is especially the case between France and the countries of North Africa. The time has come to take a further step forward, which can be decisive, and to demonstrate the strength of this friendship through action rather than words.

The idea is not to overlook what has already been achieved: the Barcelona process, the 5 + 5 and the Mediterranean Forum. On the contrary, the idea is to go farther, between countries along the rim of our common sea, by taking the approach that Jean Monnet took to Europe – an approach based on practical solidarity. I propose building on four pillars: the environment; cultural dialogue; economic growth; and security. Let us, in each of these areas, work together to devise a number of ambitious but realistic projects that can mobilize States, companies, and civic organizations – all those wishing to take part in this great project. Let us in this way show our peoples that together we are able to build a future of shared prosperity and security for our children! In the Mediterranean, the best or the worst is hanging in the balance.

Naturally the European Union should, through its institutions and in particular the Commission, be a full-fledged player in the Mediterranean Union. An informal dialogue has already been initiated with the countries bordering the Mediterranean, including Libya, which I would like to encourage, now that the matter of the medical team has been settled, to rejoin the family of nations.

We must now begin preparing a first meeting of Heads of State and Government, to be held in the first half of 2008.

MULTIPOLAR WORLD/GLOBALIZATION

Ambassadors, ladies and gentlemen,

The last two challenges facing our world today cannot be addressed separately: on our ability to work with the emerging giants to build an efficient and just world order will directly depend our ability to respond to the threats of the twenty-first century which are, in particular, global warming, new pandemics and threats to the future of our energy supplies.

So far, it must be recognized, the response of the international community to the upheavals that began 17 years ago has not been commensurate with the issues at hand.

Since 1990, the bipolar confrontation has disappeared; the very concepts of Third World and Non-Alignment have lost their meaning. Economic, trade and financial liberalization, the information technology revolution and progress in transport have created a planet where interdependence reigns and where opportunities are pooled, but so are risks and crises.

Meanwhile, and in response to what has quite often been perceived as a Westernization of the world, there have been backlash and rejection, identity

politics, religious and national attempts to return through violence to the mythical purity of golden ages. This reaction to globalization has the potential to unsettle and destabilize the world.

Alongside these developments there is a second reality that is no less a matter of concern: the world has become multipolar but this multipolarity, which could be the harbinger of a new entente among great powers, is drifting instead toward the clash of power politics.

The United States was unable to resist the temptation to resort to the unilateral use of force and is unfortunately not demonstrating, when it comes to protecting the environment, the "leadership" capacity that it claims in other areas. When one claims the mantle of leadership, one must assume it in every area.

Russia is imposing its return to the world scene by making somewhat brutal use of its assets, especially oil and gas, while the world, especially Europe, is hoping that it will make an important and positive contribution to settling the issues of our time that its regained status warrants. When one is a great power, one must eschew brutality.

China, engaged in the most impressive renaissance in human history, is transforming its insatiable quest for raw materials into a strategy of control, especially in Africa.

Currency itself, instead of being driven by the laws of the market, has become an instrument of power politics. The rules – labour, intellectual property and environmental standards – that States had gradually negotiated and adopted are all-too-often flouted.

Faced with the excesses of poorly managed globalization, faced with the risks of an antagonistic multipolar world, I am convinced that the European Union can make a major contribution to the emergence of an effective multilateralism based on compliance by all parties with common rules and on reciprocity.

Since 1990, a reunited Europe has, after five decades of division, recovered full responsibility for its destiny and the ability to once again have a decisive say in world affairs. It alone has acquired, through the long process of building its community, the practical experience of shared sovereignty that is suited to the demands of our time.

UNSC, IMF AND G8 REFORM

At the beginning of the twenty-first century, the world does not need a tabula rasa. The necessary institutions exist. The reforms undertaken in the United Nations system in 2005 are a step in the right direction. What has been lacking so far is the political will to complete them. France wants to see the necessary enlargement of the Security Council in both membership categories. France asks for new

permanent members: Germany, Japan, India, Brazil and a fair representation of Africa.

The International Monetary Fund must also carry out indispensable reforms in order to better reflect and influence today's realities. This is exactly what's being proposed by Dominique Strauss-Kahn, our candidate and the EU's candidate for the post of Director General.

Finally, the G8 must continue its slow transformation, which got off to a good start with the Heiligendamm process. The dialogue conducted during recent summits with the top leaders of China, India, Brazil, Mexico and South Africa should be institutionalized and scheduled for an entire day. The G8 can't meet for two days and the G13 for just two hours. That doesn't seem fitting, given the power of these five emerging countries. I hope that bit by bit, the G8 becomes the G13. Alongside economic consultations, the close cooperation between the most industrialized countries and the major emerging countries that is needed to combat climate change warrants this expansion. If the planet is to be protected it is indispensable that the main powers of this new world recognize common, but differentiated, responsibilities.

This new entente of great powers, from the enlarged Security Council to a G8 transformed into G13, must not leave out the defence and promotion of human and democratic rights. Globalization has contributed, in a development that I welcome, to the emergence of a world public opinion that is increasingly well informed and responsive. Through the media and through civic organizations, world public opinion has become a full-fledged player in international life. In the battle to promote the fundamental values of our Republic, a battle that is focused more on tangible results than on grand declarations, I intend to maintain a regular dialogue with our main NGOs. A first meeting was held at the Elysée in June; others will follow, especially on development issues in Africa.

FRANCE/AFRICA

I intend to be attentive to the African peoples. What do they expect of France today? I ask you, Ambassadors, ladies and gentlemen, to reach out to the grass roots of the continent and especially to its young people. In Dakar, I described my own views, with friendship and frankness. I was very touched by President Mbeki's epistolary and political support. I hope to hear, in the same spirit of friendship and frankness, what young people in Africa expect of our country before my forthcoming trip to that continent.

Africa will remain a crucial foreign policy priority for us and a central focus of the European Union's cooperation policy. Africa is not the "sick man" of today's world. It does not need our charity. For several years it has posted an average annual growth of 5% and it could do better still if the local producers of certain commodities such as cotton were paid a fair price.

Africa has what it takes to succeed in globalization and France wants to help it do so.

France wants to accelerate its development. For Africa remains on the sidelines of world prosperity. It cannot make the most of its immense natural resources, too often threatened with pillaging, and it suffers more than others the effects of climate change. At the halfway point in the timetable for achieving the Millennium Goals, we must therefore continue our assistance effort.

This involves more than financial assistance, though there is no doubt that our commitment must be maintained despite the difficulties that will affect the 2008 budget. We must also aim for better results. More assistance must entail more efficiency and thus substantial progress in management.

But there can be no development or prosperity without security. In this respect too, Africa is making progress. Of the many crises handicapping the continent, some are now being resolved, in the Great Lakes region and in West Africa alike.

DARFUR

The most tragic remains the crisis in Darfur. The suffering of the population places responsibility on us. This is why Bernard Kouchner and I called for France to be fully involved. We were very happy to receive the full and entire support of the United Kingdom. It is reassuring that the international community demonstrated its determination to act after the meeting of the enlarged contact group on 25 June in Paris. The adoption of the resolution setting up the hybrid United Nations-African Union operation is a first achievement. The force must now be deployed as quickly as possible. The meeting in Arusha between the rebel factions at the beginning of this month opens up the prospect of a political solution – the only solution that can bring about a lasting settlement to the crisis.

To further mobilize the international community to address the challenges of peace and security in Africa, I have taken the initiative of convening a meeting of the Security Council, which I will chair, and which will take place on 25 September in New York at the level of Heads of State and Government.

FRANCE/FOREIGN POLICY

Ambassadors, ladies and gentlemen,

As you have surely understood, I have a very high opinion of France and of its role in today's world; I have great ambitions for the European Union and its natural place at the heart of an efficient and just multilateral system.

To carry out this ambitious foreign policy, France is fortunate to have, at the helm of the Ministry of Foreign and European Affairs, four people of outstanding stature: Bernard Kouchner, who has my full trust; Jean-Pierre Jouyet, with whom I am very happy to work again after our earlier collaboration at the Ministry of

Finance; Jean-Marie Bockel, who is dealing with extremely difficult issues; and Rama Yade, who offers the image of a multifaceted France that embraces its diversity. France is fortunate to have a diplomatic corps of very high quality. In receiving you today for the first time, I want to tell you that the work you are doing, with competence and talent, sometimes at the risk of your lives as in Beirut and Baghdad, does honour to our Republic. I ask you to remain fully engaged in your mission.

For this, your Ministry must have the resources to carry out its mission and recognition of its interministerial role within our national strategy for France's success in globalization. The time has come therefore to move to a new phase in its modernization. This is the meaning of the letter that I, together with the Prime Minister, sent to the Ministry of Foreign and European Affairs this morning. The Ministry will in particular be able to base itself, in conducting its discussions and preparing its White Paper, on the report that Hubert Védrine will be submitting to me in a few days' time, and on broad consultations.

Ladies and gentlemen, this morning's meeting very important to me. It was a pleasure to receive you. I hope you have well understood that the government will show the same kind of voluntarism in the international arena that it is demonstrating domestically. Thank you

Sumber:

http://elysee.fr/elysee/elysee.fr/francais/interventions/2007/aout/allocution_a_l_occasion_de_la_conference_des_ambassadeurs.79272.html

L A P O R A N
KUNJUNGAN DELEGASI KOMISI I DPR-RI KE NEGARA
SURIAH,
TANGGAL 27 OKTOBER – 3 NOVEMBER 2007

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Kunjungan

Kunjungan Delegasi Komisi I DPR RI ke Negara Suriah dilaksanakan atas dasar Surat Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 44/PIMP/I/2007-2008, tanggal 22 Oktober 2007 tentang Penugasan Delegasi Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk Melakukan Kunjungan Kerja ke Suriah, Lebanon, Yordania dari Tanggal 27 Oktober 2007 sampai dengan Tanggal 3 November 2007, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

1. Sdr. Drs. Sidarto Danusubroto, S.H.	F-PDIP	Ketua Delegasi
2. Sdr. Drs. Arief Mudatsir Mandan, M.Si.	F- PPP	Anggota Delegasi
3. Sdr. Drs. Hajriyanto Y. Thohari, MA	F- PG	Anggota Delegasi
4. Sdr. DR. Yuddy Chrisnandi, ME	F- PG	Anggota Delegasi
5. Sdr. R.K. Sembiring Meliala	F-PDIP	Anggota Delegasi
6. Sdr. DR. Andreas H. Pareira	F- PDIP	Anggota Delegasi
7. Sdr. Usamah Muhammad Al Hadar	F- PPP	Anggota Delegasi
8. Sdr. Marcus Silanno, S.IP	F-PD	Anggota Delegasi
9. Sdr. Abdillah Toha, SE	F-PAN	Anggota Delegasi
10 Sdr. Ir. Untung Wahono, M.Si	F-PKS	Anggota Delegasi
11 Sdr. Drs. Ali Mochtar Ngabalin, M.Si	F- BPD	Anggota Delegasi
12 Sdri. Dra. Damayanti	-	Sekretariat Delegasi
13 Sdr. Mulyadi	-	Sekretariat Delegasi
14 Sdr. Hamdani Djafar	-	Deplu RI
15 Sdr. Dumas Amali Radityo	-	Deplu RI

B. Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Komisi I DPR RI yang membawahi bidang tugas Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri, Komunikasi dan Informasi melakukan kunjungan

Komisi I DPR RI yang membawahi bidang tugas Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri, Komunikasi dan Informasi melakukan kunjungan Kerja ke Suriah, Lebanon, Yordania pada tanggal 27 Oktober s/d 3 November 2007 untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap KBRI di Suriah, Lebanon, Yordania dan meningkatkan hubungan dan kerjasama RI – Suriah dengan mengadakan pertemuan dengan kalangan Parlemen dan pemerintah Suriah ke Menteri pertahanan Suriah, Menteri Luar Negeri.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan kunjungan delegasi adalah :

1. Melaksanakan fungsi pengawasan DPR RI terhadap mitra kerja yaitu Departemen Luar Negeri RI dalam hal ini khusus terhadap Kedutaan Besar RI di Suriah, Lebanon, Yordania, termasuk Atase Pertahanan.
2. Ikut memberikan kontribusi bagi peningkatan hubungan persahabatan bilateral Indonesia – Suriah

D. Persiapan Delegasi

Dalam rangka persiapan pelaksanaan kunjungan, delegasi melakukan persiapan-persiapan antara lain :

1. Mengadakan Rapat Tim Delegasi untuk membahas dan mempersiapkan berbagai hal, baik yang berhubungan dengan bidang tugas dari Komisi I DPR RI maupun teknis perjalanan delegasi.
2. Mengadakan diskusi dan meminta masukan-masukan dari beberapa instansi terkait, dalam hal ini Departemen Luar RI.
3. Mengadakan pertemuan dengan Duta Besar Suriah untuk Indonesia dengan maksud meningkatkan komunikasi dan mendapatkan informasi mengenai kondisi di Suriah dan hal terkait lainnya.
4. Berkoordinasi dengan pihak KBRI di Suriah, Lebanon, Yordania, dalam rangka mempersiapkan kunjungan delegasi Komisi I DPR RI ke Suriah.

E. Acara Kunjungan

1. **Minggu, 28 Oktober 2007**, Mengadakan briefing dengan KUI RI, Ramah tamah dengan jajaran KBRI Beirut serta masyarakat Indonesia

2. **Senin, 29 Oktober 2007**, Ramah tamah dengan Dubes RI beserta Staff KBRI
3. **Selasa, 30 Oktober 2007**, pertemuan dengan:
 - a. Pertemuan dengan Komisi Keamanan Nasional Parlemen Suriah
 - b. Pertemuan dengan Ketua Parlemen, Dr. Mahmoud Abrash
 - c. Pertemuan dengan Komisi Arab dan Luar Negeri Parlemen Suriah
4. **Rabu, 31 Oktober 2007**, delegasi mengadakan pertemuan dengan:
 - a. Pertemuan dengan Menteri Pertahanan Suriah, H.E. Letjen. Hassan Turkmani
 - b. Pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Susiah
 - c. Silaturahmi bersama masyarakat Indonesia di KBRI
5. **Kamis, 1 November 2007**, delegasi mengadakan pertemuan dengan :
 - a. Pertemuan dengan Ketua Pembangunan Provinsi Daraa
 - b. Ramah tamah dengan Staf KBRI Amman

F. Lain – lain

BAB II

PELAKSANAAN KUNJUNGAN

I. GAMBARAN UMUM NEGARA SURIAH

Suriah terdiri dari daratan tinggi kering, meskipun bagian barat lautnya yang berbatasan dengan Mediterania cukup hijau. Efrat, sungai paling penting Suriah, melintasi negara ini di Timur. Negara ini dianggap satu dari limabelas negara yang dianggap termasuk “ Keranjang Kemanusiaan”.

Kota besar termasuk ibu kota Damascus (33o30’ LU 36o18’ BT) di barat daya, Aleppo di utara, dan Homs. Kebanyakan kota penting lain terletak di sepanjang pesisir. Damascus (berpenduduk 2,584 Juta jiwa). Luas wilayah 185.180 km² 9 termasuk 1.295 Km² dataran tingi Golan yang diduduki Israel)

Batas Wilayah	: Utara	: Turki
	Selatan	: Yordania
	Timur	: Irak
	Barat	: Lebanon dan Laut Tengah.

Iklim di Suriah panas dan kering meskipun musim dingin termasuk ringan. Karena ketinggian negara ini salju juga kadang terjadi pada saat musim dingin.

Sebagian besar penduduk Suriah yang berjumlah 18.448.752 jiwa (perkiraan 2005)juta beragama Islam (Sunni dan Syiah-'Alawi).

Kedudukan dan kewenangan parlemen ditetapkan di dalam Undang-Undang Dasar, maret 1973. Tugas dan fungsi parlemen antara lain mengajukan calon presiden dan menyetujui RAPBN, meratifikasi perjanjian internasional, menyetujui pemberian amnesti, menerima atau menolak pengunduran diri anggota parlemen, mengeluarkan mosi tidak percaya kepada kabinet.

Parlemen Suriah mempunyai 250 orang anggota dan memiliki 11 (sebelas) komisi, yakni (1) komisi Legislatif dan UUD, (2) Komisi Anggaran, (3) Komisi Keuangan, (4) Komisi Arab dan Luar Negeri, (5) Komisi Pengarah dan Penyuluhan (6) komisi Perencanaan dan Produksi (7) Komisi Pelayanan, (8) Komisi Lingkungan dan Kependudukan, (9) Komisi Keamanan Nasional, (10) Komisi dalam Negari, (11) Komisi Pertanian dan Irigasi.

Keadaan perekonomian Suriah mempunyai sumber-sumber alam dan sumber daya manusia yang memadai, serta didukung oleh letaj geografis yang strateguis yang menghubungkan benua Asia, Afrika dan eropa. Meskipun pertumbuhan penduduk mencapai 3,3 % per tahun, namun pendapatan per kapita mempunyai rata-rata di atas 1000 US\$. Suriah diperkirakan mempunyai cadangan minyak sebanyak 4, 85 milyar barrel seeerta gas alam dan campuran di atas 505 juta meter kubik.

II. SISTIM POLITIK DAN PEMERINTAHAN

A. Partai Politik

Seluruh kekuatan partai politik yang terdapat di Suriah menggabungkan di ke dalam apa yang disebut "National Progressive Front" yang terdiri atas :

1. Baath Arab Socialisst Partay
2. Movement of Socialist Arabs
3. Communist Party
4. Party of Socialist Union Party
5. The Unionist Socialist democratic Party

Partai terkuat dan terbesar (ruling Party) adalah Partai Sosialis Baath, Partai tersebut didirikan tanggal 7 April 1947. Pimpinan regional Partai Baath berwenang untuk menyampaikan calon presiden kepada parlemen untuk diadakan referendum, kewenangan ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Suriah.

INTERESTS GROUPS

Pemerintah memberikan izin atas pembentukan/pendirian organisasi massa yang tidak bertentangan dengan konstitusi. Organisasi-organisasi massa yang sudah berdiri saat ini adalah :

1. Federasi Serikat Buruh (Niqabat al Ummal)
2. Federasi Serikat Tani (Itthad al Fallahin)
3. Fedesari Wanita (ittihad an-Nisa)
4. Federasi Pemuda (shabibah al Thsaurah)
5. Persatuan Nasional mahasiswa Suriah (Ittihad Watoni Litalabad)
6. Federasi Olahraga (ittihad aar-Riyadhi al – Aam)
7. Federasi kepanduan Suriah (Talai' al Baath)
8. Persatuan Penulis Arab(Ittihad al-Kuttab)
9. Persatuan Guru (Niqabat al-Muallimin))
10. Persatuan Seniman (Niqabat al- fannanin al-mutaahidin)
11. Federasi Dokter (Niqabat at- Atibba)
12. Federasi insinyur 9 Niqabat al- muhandisin)
13. Federasi Serikat Pengrajin (Jam'iyat al-harafiyin)

B. Sistem Pemerintahan

a. Sistem Hukum

Berdasarkan referendum 12 maret 1973 ditetapkan konstitusi baru yang terdiri dari :

- Pembukaan, memuat prinsip-prinsip pembentukan konstitusi.
- Batang Tubuh, memuat 4 (empat) bagian masing-masing fundamental Principles (part one), Powers of the State (part two) Amendment of the Constitution (part tthree) dan general and Transitional Provisions(part four)
- Bagian pertama (part one) meiliki 4 (empat chapter masing-masing prinsip-prinsip politik (1) prinsip ekonomi (2) prinsip pendidikan dan kebudayaan (3) hak-hak Asasi(4).
- Bagian kedua (part two) memiliki 3 (tiga) chapter masing-masing Kekuasaan Legislatif (1) Kekuasaan Pemerintah (2) Kekuasaan Kehakiman (3)
- Jumlah keseluruhan pasal Konstitusi sebanyak 156.

C. Lembaga Eksekutif

Berdasarkan Undang-Undang dasar negara, 12 Maret 1973 dalam pasal 1 ditetapkan bahwa prinsip-prinsip fundamental negara didasarkan pada sosialisme demokrasi rakyat yang dicirikan persatuan dan kesatuan bangsa di wilayah Arab.

Sistem pemerintahan adalah republik, dimana kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan sepenuhnya berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Undang-undang Dasar Maret 1973. UUD dapat diubah atas permintaan Presiden, atau sepertiga anggota parlemen. Perdebatan atas usul perubahan UUD dilakukan oleh parlemen. Jika tiga perempat anggota dewan/parlemen menyetujui, maka perubahan (amandemen) menjadi sah untuk dilaksanakan.

Pencalonan menjadi presiden diajukan oleh parlemen atas saran dan persetujuan partai Sosialis Baath, untuk kemudian diadakan referendum atas permintaan parlemen. Seorang presiden terpilih melalui referendum, minimal sudah berusia 40 tahun, tidak cacat hak-hak politik, akan memegang kekuasaan eksekutif, yang memiliki kewenangan menyatakan perang dan mobilisasi massa, serta membuat perjanjian dengan negara lain setelah mendapat persetujuan People's Council (parlemen). Presiden juga memegang kekuasaan untuk membubarkan parlemen sebelum pemilu berikutnya, dengan menyebutkan alasan pembubaran

D. Lembaga Legislatif

Kedudukan dan kewenangan parlemen ditetapkan di dalam Undang-Undang Dasar, maret 1973. Tugas dan fungsi parlemen antara lain mengajukan calon presiden dan menyetujui RAPBN, meratifikasi perjanjian internasional, menyetujui pemberian amnesti, menerima atau menolak pengunduran diri anggota parlemen, mengeluarkan mosi tidak percaya kepada kabinet.

Parlemen Suriah mempunyai 250 orang anggota dan memiliki 11 (sebelas) komisi, yakni (1) komisi Legislatif dan UUD, (2) Komisi Anggaran, (3) Komisi Keuangan, (4) Komisi Arab dan Luar Negeri, (5) Komisi Pengarah dan Penyuluhan (6) komisi Perencanaan dan Produksi (7) Komisi Pelayanan, (8) Komisi Lingkungan dan Kependudukan, (9) Komisi Keamanan Nasional, (10) Komisi dalam Negari, (11) Komisi Pertanian dan Irigasi.

E. Pers, Sosial, dan Budaya

Sejak Partai Baath berkuasa, kehidupan pers diatur sedemikian rupa agar selaras dengan model pers sosialis. Sebagian besar publikasi diterbitkan oleh organisasi-organisasi massa seperti organisasi politik, Agama, asosiasi profesi dan serikat pekerja sementara sebagian lagi diterbitkan oleh Lembaga pemerintah. Di Suriah tidak mungkin diterbitkan surat kabar atau majalah yang isinya tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah. Seluruh media massa diawasi oleh pemerintah dan Partai Baath. Pers berfungsi sebagai alat propaganda pemerintah untuk membina dan membentuk opini publik yang mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah. Meskipun demikian sejak pemerintahan Presiden Assad telah banyak juga diberikan peluang kebebasan

pers, ditandai dengan sering dikeluarkannya surat izin terbit untuk surat kabar dan majalah swasta, khususnya harian atau majalah yang menitikberatkan pada masalah-masalah ekonomi, sosial masyarakat, seni budaya, olahraga dan lain-lain.

Pers Suriah masih memprioritaskan pemberitaan pada upaya pemecahan konflik di kawasan timur tengah, sementara isu-isu dalam negeri lebih dititikberatkan pada peliputan kegiatan dan kebijakan Presiden Assad, demikian pula kegiatan-kegiatan pemerintah dan Partai baath, Pers Suriah juga banyak mayoritas keberhasilan pembangunan yang dicapai Suriah di berbagai bidang dan peranan penting Suriah di dunia Arab dalam rangka mewujudkan persatuan dan solidaritas negara-negara Arab.

Dari sisi media cetak, harian berbahasa Arab 'Al- Baath' merupakan harian paling terkemuka dan mendominasi pembentukan opini publik karena merupakan harian resmi Partai Sosialis Arab Baath Suriah. Di samping itu terdapat pula harian nasional berbahasa Arab 'Ats-Tsaurah' dan 'Tishreen' serta harian berbahasa Inggris 'the Suriah Times' Radio Suriah juga mengudara dengan gelombang pendek dan menengah dan dikelola oleh Direktorat federal Radio dan televisi. Selain menggunakan bahasa Arab, Siaran Radio Suriah juga menggunakan bahasa Perancis, Rusia, Jerman, Spanyol, Ibrani dan Turki. Sementara itu sejak tahun 1996 Suriah telah memiliki tiga saluran televisi nasional dengan bahasa pengantar Arab, Inggris dan Perancis dan menggunakan jasa satelit Arabsat. Kantor berita resmi Suriah yang bernama "Sana" juga dirikan sebagai kantor berita nasional disamping untuk mengimbangi pemberitaan asing. Di Suriah juga terdapat banyak kantor berita asing dan Arab antara lain BBC, CNN, Al-Arabyya, Al-Jazeera dan lain-lain. Sejak tahun 2000, internet juga diperbolehkan meski sensor dan pengawasan yang ketat tetap diterapkan oleh pemerintah. Pemerintah Suriah juga melakukan pemblokkan terhadap situs-situs yang bertentangan dengan arah kebijakan pemerintah, diantaranya adalah situs-situs Yahudi.

Di bidang pendidikan, pemerintah Suriah menetapkan "wajib belajar 9 tahun" yang dimulai pada usia 6 tahun sampai 15 tahun, yaitu untuk tingkat SD/SLP. Kemudian dilanjutkan pada tingkat SLTA sampai usia 18 tahun. Pelajar SD sampai SLTA tidak dipungut bayaran. Buku-buku diberikan secara cuma-cuma oleh negara. Sedangkan di perguruan tinggi para mahasiswa diharuskan membayar uang sekolah per tahun dan uang buku yang cukup ringan.

F. Hubungan Luar Negeri

a. Kebijakan Politik Luar Negeri

Sejak Bashar Assad terpilih sebagai presiden Suriah yang baru, kebijaksanaan dasar politik luar negerinya masih tetap mempertahankan pada paham nasionalisme yang progresif, anti

kebangkitan kembali bangsa Suriah khususnya dan bangsa-bangsa Arab umumnya yang bercita-cita menuju masyarakat modern yang menganut pola sosialis, bebas dari penguasaan Israel atas sebagian wilayah Arab.

b. Konflik Arab – Israel di Palestina

Menurut Presiden Bashar Al-Assad, ketegangan situasi di Timur Tengah disebabkan oleh tiga faktor utama : (1) pendudukan Israel yang masih berlangsung atas wilayah-wilayah Suriah, Palesitina, dan Lebanon, (2) kemacetan proses perdamaian akibat tidak adanya kehendak baik dari pihak Israel, dan (3) tidak adanya keinginan keras dunia internasional untuk mewujudkan perdamaian di kawasan. Bahkan , ada negara yang secara terang-terangan menunjukkan sikap keberpihakan kepada Israel.

Menurut Assd, situasi kawasan Timur Tengah berada dalam kondisi sensitif pasca peristiwa teror 11 September 2001. Suriah telah memperingatkan mengenai kecenderungan situasi yang akan memburuk di kawasan, namun pihak-pihak tertentu malah cenderung mendorong ke arah situasi perang dan pertumpahan darah. Stabilitas keamanan di kawasan hanya akan terwujud apabila dicapai perdamaian yang adil dan menyeluruh serta mengembalikan wilayah-wilayah Arab yang diduduki Israel sesuai dengan ketentuan resolusi DK-PBB terkait.

Dalam upaya mewujudkan stabilitas keamanan dan perdamaian yang langgeng di kawasan Suriah menegaskan kesediaannya untuk kerjasama dengan seluruh masyarakat internasional dan menekankan pentingnya kerjasama yang kompak untuk menanggulangi situasi yang memburuk di Timur Tengah. Dalam kaitan ini, Suriah menginginkan untuk menjadi bagian dari penyelesaian konflik, bukan diposisikan sekedar sebagai unsur konflik, Suriah memandang perlunya penggunaan bahasa dialogis untuk membangun rasa saling percaya dalam menjalin hubungan internasional, bukan sikap yang memihak atau keras kepala. Suriah juga menyatakan tidak senang ikut campur dalam masalah internal negara lain.

Dalam pertemuan dengan PM Palestina ismail Haniyah 4 Desember 2006, Presiden Assad menegaskan dukungan penuh Suriah kepada perjuangan rakyat palestina untuk (1) membentuk negara merdeka denga Jerusalem sebagai ibu kota, (2) memperoleh hak kembali para pengungsi Palesitina, dan (3) mengakhiri boikot internasional terhadap Palesitina, Selain itu Presiden Assad menegaskan pentingnya keutuhan rakyat Palestina, khususnya dalam situasi genting yang sedang berlangsung. Sebagai wujud

nyata dukungan tersebut, Suriah memberikan bantuan dana sebesar 17 juta dolar AS kepada pemerintah Palestina.

III. HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA- SURIAH

A. Bidang Politik

Hubungan politik Indonesia – Suriah telah dimulai sejak pengakuan "de jure" Suriah terhadap Republik Indonesia pada tanggal 2 Juli 1947. Hubungan diplomatik kedua negara dimulai tahun 1950. Indonesia menempatkan seorang Kuasa Usaha di Damascus tahun 1955. Pada saat Suriah bergabung dengan Mesir dalam " Republik Persatuan Arab tahun 1959, Perwakilan RI di Damascus dirubah menjadi Konsulat jenderal dan ketika RPA pecah tahun 1961, konsulat jenderal di Daascus kembali menjadi KBRI.

Antara kedua negara terdapat " memorandum Saling pengertian mengenai pembentukan Konsultasi Bilateral" yang ditandatangani di Jakarta tanggal 27 Juni 1997, guna mengkaji kembali seluruh aspek yang ada dalam hubungan bilateral di bidang politik, ekonomi, perdagangan, teknik, kebudayaan dan untuk melakukan pertukaran pandangan mengenai masalah-masalah internasional yang menjadi kepentingan bersama serta interaksi di area internasional.

Kerjasama di fora internasional antara kedua negara juga berkembang baik tercermin dari saling memnita/memberi dukungan dalam pencalonan untuk menduduki posisi/jabatan pada organisasi-organisasi internasional. Di samping itu, hal ini juga didorong oleh peranan menonjol Suriah di PBB dan berbagai organisasi internasional atau regional lainnya, seperti dalam GNB, OKI dan Liga Arab. Dalam menyikapi masalah internasional seperti Irak, Suriah dalam kerangka Liga Arab mempunyai pandangan yang sama dengan Indonesia.

Hubungan bilateral kedua negara semakin ditingkatkan dengan kunjungan Menlu RI ke Suriah tanggal 4 – 5 Februari 2007. dalam kunjungan ini ditandatangani dua kesepakatan bidang ekonomi kedua negara antara lain Agreement on Economic, Scientific, and technical cooperation dan memorandum of Understanding on the establishment of a Joint Commission for the economic, Scientific, technical, and Cultural Cooperation. Kedua pihak juga sepakat untuk meningkatkan pertukaran kunjungan pejabat di antara kedua negara. Dalam kaitan ini, Presiden Suriah bersedia untuk berkunjung ke Indonesia pada paruh kedua tahun 2007.

Terkait dengan peran aktif Indonesia di Timur Tengah, terungkap bahwa Pemerintah Suriah justru mengharapkan peran aktif Indonesia dalam penyelesaian konflik Timur Tengah. Pemerintah Suriah menilai bahwa

keanggotaan Indonesia di DK PBB merupakan kesempatan yang dapat dimanfaatkan Indonesia untuk berperan aktif di Timur tengah mengingat berbagai upaya yang dilakukan AS, Uni Eropa, dan beberapa negara Arab telah gagal dalam melakukan mediasi untuk meredakan ketegangan dan melanjutkan perundingan proses perdamaian di Timur Tengah.

B. Bidang Pertahanan Keamanan

Dalam bidang pertahanan dan keamanan, antara Indonesia dan Suriah belum mempunyai perjanjian di bidang tersebut

IV. PERTEMUAN

1. Pertemuan dengan Duta Besar RI di Lebanon beserta Staf, Minggu, 28 November 2007

2. Pertemuan dengan Ketua Parlemen Dr. Mahmoud Abrash Selasa, 30 Oktober 2007

Kunjungan kehormatan dan pertemuan dengan Ketua Parlemen Suriah Dr. Mahmoud Abrash berlangsung di Kantor Parlemen Suriah dan dihadiri pula oleh para ketua Komisi di parlemen Suriah, Mengawali sambutan, dr. Abrash menegaskan bahwa kunjungan delegasi Komisi I DPR-RI ke Suriah memiliki nilai khusus, yakni tidak sekedar kunjungan dari negara sahabat tetapi lebih merupakan kunjungan dari negara saudara yang sangat dekat hati rakyat, bangsa dan pemerintah Suriah. Abrash mengikuti dengan seksama perkembangan terkini di Indonesia yang dinilai sebagai salahsatu negara yang memiliki sistem pemerintahan efektif di Asia. Indonesia juga dikenal luas oleh bangsa Suriah sebagai salah satu pencetus Gerakan Non Blok yang senantiasa gigih memperjuangkan kemajuan negara dunia ketiga yang selalu terkendala karena dominasi dan ketidakadilan perlakuan dari negara-negara besar dan maju, khususnya Amerika Serikat. Ditegaskan pula bahwa Suriah pada dasarnya tidak melancarkan sikap permusuhan dan anti AS namun anti terhadap negara-negara yang senantiasa berupaya untuk menekan dan menghambat perkembangan dan kemajuan Suriah. Dalam kaitan ini, kunjungan delegasi Parlemen Indonesia ke Suriah tidak hanya merefleksikan kedekatan hubungan dan kerjasama antar parlemen dalam konteks official, tetapi juga kedekatan hubungan personal di kalangan anggota parlemen kedua negara. Dr. Abrash juga menggarisbawahi bahwa hubungan yang erat dan kokoh antar parlemen dapat menjadi kekuatan yang keterbelakangan akibat desain politik yang dirancang dan diterapkan negara-negara maju.

Menyinggung situasi dalam negeri dan perkembangan wilayah, Dr. Abrash menegaskan bahwa rakyat Suriah pada dasarnya

bersikap tetap sabar dalam menghadapi tekanan yang sedang dialami namun tegas dalam mengambil sikap. Rakyat Suriah adalah cinta damai dan senantiasa mendambakan perdamaian. Suriah telah melancarkan serangkaian prakarsa perdamaian di kawasan Timur tengah namun tak satupun diterima oleh Israel. Suriah juga tidak ingin bermusuhan dengan negara lain tetapi justru negara lain yang terus menerus melancarkan sikap permusuhan terhadap Suriah. Bahkan hingga kini masih ada upaya-upaya untuk menggambarkan wajah dan kondisi rakyat Suriah yang tidak bersahabat. Rakyat Suriah tidak menginginkan terjadinya instabilitas di kawasan dan mendukung sepenuhnya keutuhan terjadinya instabilitas di kawasan dan mendukung sepenuhnya keutuhan wilayah Lebanon dan Irak. Instabilitas dan perpecahan politik di kedua negara tetangga tersebut hanya akan memberikan dampak kurang menguntungkan bagi Suriah. Oleh karena itu, Suriah aktifmenggalang upaya rekonsiliasi, baik di Irak, palestina maupun Lebanon.

Menanggapi sambutan dan pernyataan Ketua Parlemen Suriah. Ketua Delegasi Komisi I DPR-RI menyampaikan apresiasinya atas penerimaan dan sambutan yang sangat baik dan hangat di pihak Suriah, mulai saat ketibaan delegasi di perbatasan Suriah –Lebanon yang disambut langsung oleh Ketua Komisi Pertahanan nasional Parlemen Suriah. Kenyataan tersebut merefleksikan dan semakin mengukuhkan bahwa hubungan kedua negara betul-betul memiliki landasan dan dimensi persaudaraan yang erat dan kokoh. Ketua delegasi juga sepenuhnya sependapat dengan apa yang telah disampaikan Ketua Parleemn Suriah.

3. **Pertemuan dengan Ketua Komisi Pertahanan Nasional Parlemen Suriah Selasa, 30 Oktober 2007**

Ketua komisi Pertahanan nasional Parlemen Suriah, jenderal (Purn.) Fajar Isa beserta seluruh anggota Komisi menyambut gemmbira kunjungan delegasi Komisi I DPR-RI yang digambarkannya sebagai kunjungan persaudaraan anatar parlemen kedua bangsa. Disampaikan pula bahwa banyak persamaan yang dilandasi dan mendasari hubungan RI-Suriah pada tataran bilateral, regional dan internasional. Semangat KAA Bandung yang menjadi cikal bakal dan inspirasi pergerakan perjuangan kemerdekaan negara-negara terjajajh, akan selalu diingat rakyat Suriah. Menurutnya semangat bandung menjadi semakin relevan dan perlu dihidupkan kembali pada situasi sekarang dimana dunia menyaksikan tumbuh dan berkembangannya unilateralisme.

Menyinggung situasi di kawasan, Ketua Komisi Pertahanan juga menjelaskan bahwa tekanan yang dilancarkan AS terhadap Suriah memang belum mereda dan hbahkan cenderung menguat.

Kenyataan tersebut terkait erat dengan haluan politik ne—conservatism di AS yang diarahkan untuk dua tujuan pokok, yaitu memperkuat posisi Israel di kawasan dan upaya untuk menguasai sumber minyak. Meski upaya-upaya pengucilan terus dilancarkan, namun menurutnya, Suriah merasa tidak terisolasi dan tak gentar menghadapi realita tersebut karena seluruh rakyat Suriah yakin akan kemampuan yang dimilikinya, yaitu kepemimpinan nasional yang kuat, partai politik yang solid dan kemampuan angkatan bersenjata.

Menanggapi hal tersebut, Ketua delegasi Komisi I DPR-RI sekali lagi menyampaikan terima kasih atas sambutan dan penerimaan yang sangat hangat dan bahkan disambut langsung oleh Ketua komisi Pertahanan sejak tiba di perbatasan. Suriah tidak hanya dicatat sebagai salah satu negara Arab yang pertama memberikan pengakuan atas kemerdekaan Indonesia, tetapi juga hingga kini senantiasa memberikan dukungan pada posisi Indonesia di berbagai forum internasional. Dinyatakan pula bahwa Indonesia dan Suriah memiliki sikap dan pandangan yang sama dan satu bahasa dalam menyikapi isu-isu di kawasan, khususnya perjuangan rakyat Palestina dan Irak. Rakyat Indonesia berkeyakinan bahwa Suriah dibawah kepemimpinan Presiden Bashar Al Assad akan terus mencapai perkembangan menuju bangsa yang lebih kuat di berbagai bidang.

4. **Pertemuan dengan Ketua Komisi Arab dan Luar Negeri Selasa, 30 Oktober 2007**

Ketua Komisi Arab dan Luar negeri parlemen Suriah Dr. Sulaiman Al-hadad menyampaikan bahwa hubungan parlemen RI-Suriah telah terjalin dengan erat yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi bagi peningkatan kerjasama parlemen di negara-negara Asia dan mendorong kerjasama parlemen dunia yang lebih kuat. Sedangkan mengenai situasi di kawasan, Dr. Sulaiman Al-Hadad menyatakan bahwa Israel tidak memiliki kredibilitas untuk melaksanakan perdamaian karena dari hampir 60 resolusi yang dikeluarkan PBB tidak pernah dilaksanakan oleh Israel bahkan tetap melakukan penghancuran terhadap tempat-tempat suci di palestina. Dalam kaitan ini, Sriaah juga mengharapkan agar Indonesia terus mendukung perjuangan rakyat palestina. Ditegaskan pula bahwa setiap upaya perdamaian di lebanon yang pada akhirnya dapat memberikan iklim kondusif bagi peningkatan kegiatan ekonomi Suriah.

Sementara itu, Ketua delegasi Komisi I DPR-RI menyampaikan perlunya bagi pemerintah kedua negara merealisasikan berbagai kesepakatan dan MOU kerjasama bilateral yang ditandatangani pada Januari 2007 dalam bentuk kerjasama nyata ddi berbagai bidang.

Dengan demikian maka akan semakin mendorong peningkatan kerjasama kedua negara. Khusus mengenai masalah tenaga kerja wanita Indonesia yang bekerja di Suriah, Ketua delegasi mengharapkan kiranya dapat dilakukan pelayanan dan perlindungan yang memadai oleh insstansi berwenang di Suriah. Pihak Suriah menyatakan bahwa belum lama ini telah dikeluarkan Keputusan Presiden mengenai peningkatan pelayanan dan perlindungan tenaga kerja asing selktor informal di Suriah. Menanggapi hal tersebut, Dubes RI Damaskus menambahkan bahwa pada akhir November 2007 delegasi dari Deplu yang dipimpin Dirjen HPI akan mengadakan pertemuan di Suriah untuk pembahasan dan/atau penandatanganan MOU ketenagakerjaan RI-Suriah.

5. Pertemuan dengan Menteri Pertahanan Suriah, H.E. Letjen. Hassan Turkmani Rabu, 31 Oktober 2007

Membuka pembicaraan, Menhan Suriah menyatakan bahwa kunjungan delegasi parlemen adalah mewakili rakyat Indonesia sehingga kunjungan ini menunjukkan kesinambungan sikap dan dukungan Indonesia kepada Suriah. Kunjungan ke Suriah juga merupakan kesempatan baik untuk melihat dan mengamati secara langsung dinamika dan perkembangan politik di Suriah lebih lanjut. Menhan mengatakan bahwa situasi di Timur tengah saat ini pada titik yang membahayakan karena langkah apapun bisa terjadi, , termasuk invansi militer, hegemoni ekonomi dan kebudayaan untuk menguasai kawasan Timur tengah. Menurut Menhan, AS adalah sumber terjadinya ketegangan di kawasan dan Suriah akan terus berjuang untuk mengatasi ketidakadilan. Menhan menjelaskan bahwa Suriah membangun angkatan bersenjata dengan landasan ideologi perjuangan, utamanya untuk membebaskan dan merebut kembali wilayah yang diduduki Israel. Suriah juga mendukung semua gerakan perlawanan untuk mewujudkan kemersdekaan. Suriah menilai bahwa seluruh bangsa yang tertindas berhak melakukan perlawanan meskipun AS melihat hal tersebut sebagai aksi akan menyebabkan kerugian dan kesengsaraan warga sipil. Jika perjuangan Suriah mendukung pembebasan Palestina dan Irak disebut sebagai terorisme maka Suriah menyatakan tak akan gentar disebut sebagai teroris. Suriah juga tidak punya ambisi dengan wilayah-wilayah disekitar dan ideologi politik.

Suriah tidak memberi peluang bagi kepemilikan senjata pemusnah massal, namun pihak barat selalu berupaya memutarbalikkan fakta dan kenyataan di Suriah dengan satu tujuan agar Suriah tidak berhasil mencapai sasaran dan tujuan nasionalnya.

Ketua delegasi menanggapi pernyataan Menhan dengan menegaskan bahwa situasi politik dan kondisi yang sedang dihadapi Suriah memang tidak mudah dan rakyat Indonesia dapat memahami

apa yang sedang dialami rakyat Suriah. Dukungan rakyat Indonesia terhadap perjuangan Suriah merebut kembali wilayah yang diduduki Israel tidak akan pernah berhenti karena itu merupakan masalah pokok dalam sengketa Arab-Israel. Indonesia bersama-sama dengan negara lain menentang unilateralisme sebagaimana dijalankan AS dan berupaya mendorong multilateralisme dalam penanganan berbagai isu internasional.

Delegasi Komisi I DPR-RI juga menanyakan peristiwa pelanggaran udara yang dilakukan oleh pesawat Israel di Suriah baru-baru ini. Menurutnya, aksi tersebut merupakan bagian dari manuver israel untuk memacu kembali semangat mental tentara dan rakyat Israel yang mulai meredup karena kekalahan pada perang Juli 2006. Suriah menyatakan tidak akan menanggapi langkah provokasi tersebut karena hanya memancing langkah militer selanjutnya.

Pada bagian lain, anggota delegasi Komisi I DPR-RI juga menyampaikan bahwa Indonesia kini tengah mengembangkan berbagai industri strategis yang amat penting bagi pertahanan nasional. Oleh karena itu, pihaknya akan mendorong pemerintah Indonesia untuk memnjajagi peluang kerjasama di bidang industri strategis dan kerjasama pertahanan melalui pertukaran informasi dan kerjasama teknik lainnya. Menanggapi hal tersebut, Dubes RI Damaskus juga menyampaikan bahwa Dubes RI telah menerima undangan dan akan menyampaikan paparan pada kursus reguler pertahanan yang diselenggarakan oleh kementerian Pertahanan Suriah yang dijadwalkan pada Januari 2008 mengenai potensi dan peluang kerjasama bilateral.

6. Pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Surih, Walid al-Moalem

Mengawali pembicaraan, seraya mengucapkan selamat datang kepada delegasi, Menlu Waled al-Moaelen menilai kunjungan delegasi Komisi I DPR-RI ke Suriah amat penting bagi peningkatan hubungan bilateral kedua negara. Menlu menyatakan bahwa Indonesia memainkan posisi dan peran penting di OKI dan PBB terlebih dalam kapasitas Indonesia saat ini sebagai anggota tidak tetap DK PBB. Menlu Suriah secara khusus menyampaikan penghargaan kepada Menlu RI yang senantiasa mendukung perjuangan bangsa Arab, termasuk Suriah di forum PBB. Menlu Suriah mengungkapkan bahwa ketegangan yang terjadi di wilayah Timur Tengah belum menunjukkan tanda-tanda akan segera mereda sebagai akibat tindakan permusuhan yang dilancarkan Israel sejak 1948 Timur tengah bahkan menjadi ajang konflik yang tak henti karena kekayaan cadangan cadangan minyak yang dimiliki. Konflik dan ketegangan di timur tengah semakin memanas karena kompetisi negara-negara Barat untuk menanamkan pengaruhnya di wilayah tersebut. Barat bahkan kini mulai menaburkan benih sengketa dan

perpecahan agama demi menguasai Timur tengah, namun Suriah menyakini dengan kekuatan akar budaya yang kuat dan kokoh, maka upaya-upaya tersebut tidak akan efektif.

Kepada Menlu Suriah, Ketua delegasi menyatakan sepenuhnya sependapat dengan apa yang telah disampaikan Menlu. Kunjungan delegasi parlemen RI ke Suriah juga salah satunya untuk menunjukkan simpati rakyat Indonesia atas perjuangan rakyat Suriah. Ketua delegasi juga meyakinkan Menlu bahwa kekuatan senjata dengan teknologi tinggi saja tidak akan mampu mengalahkan semangat perjuangan untuk membela tanah air.

Pada dialog selanjutnya anggota delegasi Komisi I DPR-RI juga menyampaikan pentingnya negara-negara Arab untuk bersatu sebagai salah satu kunci keberhasilan untuk menghadapi Israel dan dominasi Barat. Namun sangat disayangkan bahwa di luar Iran dan Suriah, negara-negara Arab belum menyuarakan kepentingan rakyat yang sesungguhnya. Pada hal negara-negara Arab memiliki potensi untuk menghadapi Israel di luar kemampuan persenjataan. Jika negara-negara tidak bersatu, maka dukungan yang diberikan oleh negara-negara lain, termasuk Indonesia akan kurang efektif. Anggota delegasi lainnya Yuddy Chrisnandi juga menambahkan bahwa perjuangan rakyat Suriah sangat dekat di hati rakyat Indonesia yang konsisten mendukung perjuangan Suriah dalam merebut kembali wilayah Golan yang masih diduduki Israel. Dia juga berharap, Suriah dapat memainkan peran pemersatu di dunia Arab.

Kunjungan Lapangan ke Dataran Tinggi Golan

Isu dataran tinggi Golan yang hingga kini masih diduduki Israel merupakan masalah pokok yang kini sedang dihadapi Suriah. Untuk melihat dari dekat dan kenyataan langsung dilapangan mengenai penderitaan yang dialami warga Suriah di wilayah Golan serta kebrutalan Israel di wilayah pendudukan delegasi Komisi I DPR-RI juga melakukan kunjungan lapangan ke kota Qunaitra (sekitar 40 km selatan Damaskus) di wilayah Golan. Dengan dipandu oleh Penanggung Jawab Pembangunan Wilayah Golan Madam Hamda Arkawi, para delegasi memperoleh penjelasan rinci mengenai kesulitan dan tekanan kehidupan sosial ekonomi warga Suriah di wilayah pendudukan. Juga dijelaskan mengenai potensi ekonomi, ketersediaan sumber air, kekayaan alam dan letak geografis wilayah Golan yang amat strategis karena menghubungkan Suriah dengan Yordania sehingga Israel dengan berbagai cara dan strategi terus berupaya untuk menguasai wilayah tersebut.

7. Pertemuan dengan Jajaran Staf KBRI dan Masyarakat Indonesia di Suriah

Kesempatan baik kunjungan delegasi Komisi I DPR-RI ke Suriah juga dipergunakan untuk mengadakan tatap muka dan pertemuan ramah tamah dengan komponen masyarakat Indonesia di Suriah yang sebagian besar terdiri dari pelajar dan mahasiswa. Pada kesempatan tersebut, Ketua delegasi bersama-sama dengan Wakil Ketua Komisi I DPR-RI Arief Mudatsir mandan serta ketua BKSAP Abdillah Toha memakili delegasi menyampaikan sambutan dan penjelasan mengenai maksud tujuan kunjungan yang pada intinya merupakan pelaksanaan dari tugas-tugas DPR-RI khususnya pada Komisi I yang antar lain membidangi masalah pertahanan dan hubungan Luar negeri serta upaya untuk mempererat hubungan antar perlemen dan mendorong peningkatan kerjasama bilateral di berbagai bidang. Dijelaskan pula mengenai situasi dan perkembangan di tanah air, termasuk upaya-upaya yang kini telah dan sedang dilakukan pemerintah dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja serta berbagai kendala yang perlu diatasi untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Pada acara dialog dan tanya jawab, para penanya umumnya mengajukan pertanyaan seputar sikap Malaysia terhadap Indonesia yang dinilai arogan dantidak menghargai Indonesia , isu calon presiden RI, perkembangan masalah resolusi DK PBB 1747 mengenai nuklir Iran serta langkah pemerintah dalam meningkatkan kemampuan pertahanan nasional. Selain menjelaskan berbagai permasalahan tersebut, delegasi Komisi I DPR-RI juga menekankan kembali perlunya bagi mahasiswa Indonesia di luar negeri untuk menurut ilmu dan menggali pengalaman di luar negeri secara sungguh-sungguh sehingga pada saatnya nanti dapat memberikan kontribusi nyata dan bermanfaat bagi negara dan bangsa. Pada masa mendatang diharapkan agar para mahasiswa Indonesia di Timur Tengah tidak hanya mendalami ilmu-ilmu keagamaan tetapi juga bidang studi lainnya yang sangat dibutuhkan bagi perkembangan di tanah air.

Selepas acara pertemuan dengan masyarakat Indonesia, delegasi Komisi I DPR-RRRI mengadakan pertemuan dengan Wakil Ketua Biro Politik Hamas, Mousa Abu Mazzrouk di damaskus. Pertemuan selain dalam rangka saling bertukar pandangan mengenai situasi di kawasan dan perkembangan terkini masalah Palesitia, juga untuk menegaskan kembali dukungan Indonesia pada perjuangan rakyat Palestina. Pada kesempatan tersebut, anggota delegasi yang juga Ketua BKSAP Abdillah Toha menyampaikan bahwa kunjungan Presiden palestina mahmoud Abbas ke Indonesia baru-baru ini adalah daslam rangka meminta dukungan Indonesia untuk berpartisipasi pada Konferensi akan menghasilkan keputusan konkrit mengenai perdamaian. Disamping itu ditegaskan pula bahwa hendaknya Presiden mahmoud Abbas mengupayakan terlebih dahulu

perdamaian dengan kelompok Hamas, dimana Indonesia bersedia menjadi mediator.

Menanggapi pernyataan delegasi parlemen Indonesia, Mousa Abu Mazrouk menyampaikan penghargaan atas sikap Indonesia dan umat Islam Indonesia atas dukungannya terhadap perjuangan Palestina, khususnya di forum PBB untuk menghentikan embargo di jalur Gaza. Dijelaskan pula bahwa gagasan Konferensi perdamaian yang disponsori AS bukan ditujukan untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran tetapi lebih ditujukan untuk konsumsi politik dalam negeri AS menghadapi Pemilu mendatang dengan target utama Iran.

Catatan :

Kunjungan kerja delegasi Komisi I DPR-RI ke Suriah memiliki arti penting, baik dalam kerangka peningkatan kerjasama antar pemerintah kedua negara di berbagai bidang. Makna kunjungan kali ini juga menjadi semakin penting dan berarti di tengah situasi dan dinamika politik di kawasan yang tidak menentu dan memanas. Di tengah upaya sejumlah negara Barat yang terus melakukan isolasi dan mengeliminasi peran Suriah, kunjungan delegasi Indonesia mampu merefleksikan kedekatan hubungan kedua negara yang telah terjalin erat tanpa kendala sejak awal masa kemerdekaan. Kunjungan ini juga memperlihatkan arti penting Indonesia bagi Suriah seerta kemungkinan peranan Indonesia yang lebih aktif di kawasan.

Disadari bahwa intensitas dan bobot saling kunjungan antar parlemen kedua negara masih belum seimbang karena sejak tahun 2003, masih belum terlaksana kunjungan balasan parlemen Suriah ke Indonesia. Dengan kunjungan ini serta undangan yang disampaikan Ketua delegasi Komisi I DPR-RI kepada parlemen Suriah, diharapkan akan segera dapat terwujud kunjungan balasan dari pihak Suriah ke Indonesia.

V. KUNJUNGAN KE REPUBLIK LEBANON

A. Pendahuluan

Republik Lebanon atau resminya disebut Lebanese republic (Inggris). Al jumhuriyah Al Lubnaniyah (Arab) Re'publique Liabanaise (Perancis) adalah negeri dengan topografi daerahnya berbukit-bukit dengan pantai memanjang menyusur laut Mediteranea sejauh lk 210 km dari arah utara yang berbatasan dengan Suriah hingga ke selatan yang berbatasan dengan Israel. Luas wilayah seluruhnya lk

10.452 km persegi (mungkin belum mencakup Shebaa farms yang subur dan masih disengketakan itu).

Total penduduk Lebanon lk. 4 juta jiwa. Meskipun demikian masih terdapat penduduk keturunan Lebanon yang didomisi di luar (diapora) dalam jumlah yang cukup besar, misalnya di Brazil saja lk. 12 juta, di Afrika dan beberapa negara lain. Lebanon yang masuk kategori negara Arab ini memiliki iklim empat musim : summer, fall, witer, dan spring. Di beberapa wilayah pegunungan terdapat salju dan di musim witer suhu bisa mencapai dibawah 0 derajat celsius.

Negara Lebanon terbagi atas 6 provinsi ; Beirut, mount Lebanon, North Lebanon, South Lebanon, Nabatieh, dan Bekaa. Dari segi agama, warga Lebanon menganut beberapa agama seperti Islam (Sunni, Syah, dan Druze) agama Kristen (maronit. Katolik roma, katolik Ortodox dan Pretestan)

Situasi politik ekonomi dan sosial-budaya Lebanon sangat dipengaruhi oleh perkembangan situasi regional Timur tengah pada umumnya. Sistem politik Lebanon masih menganut sistem sektarian yang disebut Confessionalism mudah sekali dipengaruhi oleh situasi regional. Sistem confessionalism yang membagi kekuatan politik berdasarkan kelompok agama dan sekte sangat rentan menimbulkan perpecahan sosial- politik mengingat setiap kelompok politik berafiliasi pada kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi situasi regional. Seperti kelompok pro-Suriah, Pro-Iran, maupun pro-barat (AS dan Uni Eropa)

Dalam bidang politik, Lebanon menghadapi berbagai masalah seperti : krisis pemerintahan, kelompok paramiliter seperti Hezbollah dan pengungsi palestina, sistem hukum dan korupsi. Selain itu Lebanon memerlukan persatuan nasional dan dukungan masyarakat internasional dalam proses konsolidasi internal serta menghadapi tekanan kekuatan asing.

Situasi ekonomi Lebanon juga dipengaruhi situasi regional. Pertumbuhan ekonomi Lebanon berkembang cukup signifikan dan bisa lebih meningkat apabila konflik politik dapat diselesaikan secara damai. Harga minyak yang melambung tinggi memang menimbulkan kenaikan harga-harga, tetapi mengundang investasi dari negara-negara Teluk kaya minyak yang mendorong pertumbuhan di sektor keuangan dan properti.

Di bidang sosial-budaya pendekatan diplomasi melalui jalur non-formal perlu mendapat perhatian lebih. Saat ini Lebanon mempunyai banyak LSM yang bergerak di berbagai bidang, baik advokasi hukum, kesejahteraan masyarakat, maupun pariwisata. LSM-LSM ini tidak kalah profesional dengan lembaga pemerintah dan

banyak pula yang didanai oleh Uni Eropa. Pengenalan dan Penguatan citra Indonesia dapat dibantu melalui kerjasama dengan LSM-LSM yang hampir semuanya mempunyai jaringan media massa yang luas.

Secara keseluruhan, berbagai perkembangan di atas dapat dijadikan Acuan untuk meningkatkan hubungan bilateral Indonesia-Lebanon.

B. Situasi Politik Kontemporer

1. Krisis pemerintahan terjadi akibat tidak adanya visi dan program politik yang jelas dari pemerintahan hasil pemilu terakhir yang diselenggarakan dalam empat putaran pada 29 Mei, 5, 15, 19 Juni 2005 (pemilu berikutnya akan dilaksanakan pada tahun 2009). Kekuatan-kekuatan politik di parlemen terdiri dari tiga kubu utama:
 - a. Kubu Mayoritas yang terdiri dari Future Movement (Islam sunni) PSP DRUZE/ walid Jumblatt, dan Lebanese Force (Kristen)
 - b. Kubu Oposisi, yaitu Free patriotic Movement pimpinan Jenderal Michel Aoun

BAB III PENUTUP

1. Secara keseluruhan sambutan pihak Suriah baik dari pemerintah maupun parlemen serta sambutan Parlemen Suriah khususnya Komisi Luar Negeri sangat responsif dan positif, hal ini dapat dijadikan momentum untuk lebih mendorong hubungan di bidang – bidang strategis yang saling menguntungkan serta hubungan *Parliament to Parliament* khususnya.
2. Kunjungan kerja delegasi Komisi I DPR RI ke Suriah ini memiliki arti penting bagi peningkatan hubungan Indonesia dan Suriah di bidang-bidang yang bersifat strategis seperti antara lain khusus mengenai kerjasama di bidang pertahanan. Suriah sehingga membuka peluang untuk menjajaki kemungkinan kerjasama di masa yang akan datang.
3. Pihak Suriah menyambut baik kunjungan delegasi dan kunjungan ini memiliki nilai historis dan strategis bagi peningkatan hubungan Indonesia dan Suriah di berbagai bidang kerjasama mengingat kedua negara disamping memiliki kesamaan juga memiliki potensi dan peluang ekonomi yang sangat besar. Parlemen Suriah telah membentuk *Friends of Indonesia* semacam GKSB yang akan diresmikan dalam waktu dekat serta Parlemen Suriah yang juga berencana membentuk *Friends of Indonesia*. Dalam hubungan ini kami mengharapkan agar hal ini perlu segera direspons dengan pembentukan GKSB sebagai resiprositas sesuai mekanisme yang ada di DPR.

4. Dalam pertemuan dengan Dubes RI dan Staf, delegasi mendapatkan informasi mengenai situasi dan kondisi kedutaan sekaligus masyarakat Indonesia baik yang berada di Suriah maupun Beirut Lebanon, Yordania Terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh KBRI di Suriah dan, kiranya dapat menjadi bahan pertanyaan pada Rapat Kerja dengan Menlu di Komisi I DPR RI.
5. Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Suriah diharapkan dapat menjadi bahan penunjang bagi Komisi I DPR RI dalam melaksanakan tugasnya di luar negeri (pengawasan terhadap KBRI), komunikasi dan Informasi.

Demikianlah laporan kunjungan delegasi Komisi I DPR RI ke Suriah yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi DPR RI dalam melaksanakan fungsinya sekaligus meningkatkan hubungan bilateral antara kedua negara yang saling menguntungkan yang tentunya juga dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Sebelum mengakhiri laporan ini, maka segenap delegasi RI mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu kelancaran delegasi, terutama kepada Dubes RI beserta staf KBRI di Suriah, Beirut Lebanon, Yordania termasuk instansi-instansi yang telah membantu delegasi

Jakarta, November 2007

KETUA DELEGASI

TTD

DRS. SIDHARTO DANUSUBROTO, SH

A-328

Sumber:

<http://www.dpr.go.id/assets/berkas/kunjunganKerjaKomisi/Negara%20Syiria,%20Libanon,%20dan%20Yordania>, diakses pada tanggal 7 Juli 2009, pukul 20.00 WIB.